

H 36 - **RAGAM**

Menghargai Bambu, Menghargai Kehidupan

H 38 - **SOSOK**

Mohamad Hidayat MBA, MH

H 48 - **BISNIS**

Omus, Si "Jabang Bayi" Dagadu

shar*i*ng

inspirator ekonomi & bisnis syariah



Mengelola Keuangan Publik
Secara Islami

Rp 12.500,-
(Khusus JABODETABEK)

ISSN 1979-3863



Edisi 35 Thn IV November 2009



BNI iB Haji

Memantapkan ibadah haji
Anda di atas ketentraman.

www.bni.co.id

Insha Allah melalui **BNI iB Haji** (iB dibaca aibi, =Islamic Banking), Anda semakin tenang dalam menjalankan ibadah Haji karena didukung beberapa kelebihan a.l :

- Dikelola secara syariah, sehingga insha Allah membawa berkah.
- Calon haji ditutup asuransi kecelakaan diri dan kematian.
- On line dengan Siskohat.

Keunggulan lainnya :

- Memperoleh bagi hasil.
- Bebas biaya Administrasi.
- Dapat melakukan setoran di seluruh cabang BNI (online).

Informasi hubungi Kantor Cabang BNI Syariah atau melalui BNI Call (021) 5789 9999

AYO ke **BANK**

BNI
SYARIAH



Wacana Baitulmaal dalam Pengelolaan Keuangan Publik Kita

Baitulmaal adalah sistem yang memandu bagaimana negara mengelola harta dari dan untuk rakyat. Baitulmaal adalah inti keuangan moneter ala Islam. Kenapa kini konsep Baitulmaal menjadi penting? Dikarenakan, Indonesia yang notabene bukan negara Islam, namun berpenduduk mayoritas Muslim, bisa belajar dari konsep pengelolaan keuangan publik ala Islam ini.

Wacana pengelolaan keuangan publik negara kita untuk menoleh pada sistem Baitulmaal memang diapungkan oleh para penggiat ekonomi syariah di Indonesia. Sangat wajar, karena dalam kenyataannya, APBN kita selalu bermasalah. Defisit selalu terjadi, karena pengeluaran selalu lebih besar dari pemasukan. Akibatnya hutang negara pun semakin menumpuk. Menjadi warisan turun temurun dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Padahal kalau kita bisa mengadopsi konsep Baitulmaal dalam pengelolaan keuangan publik, maka problematika defisit yang kerap terjadi di atas selayaknya bisa dihindari. Karena salah satu prinsip keuangan publik Islam yang terdapat dalam Baitulmaal, tidak menganjurkan negara berutang. Pengeluaran disesuaikan dengan pemasukan, bukan sebaliknya.

Dalam sebuah riwayat, Qubaishah ibnul Mukhariq, mengisahkan: "Saya pernah mendatangi Rasulullah SAW untuk mengajukan aduan tentang bayaran diyat dan utang. Rasulullah bersabda, 'Tunggulah terlebih dahulu, sehingga zakat datang kepada kita...'. Maksudnya, Rasulullah tidak mengeluarkan uang negara di muka sebelum pemasukan datang, apalagi sampai berutang. Meski utang itu sendiri dibolehkan, namun tidak dianjurkan dalam Islam.

Selain anti berutang, prinsip utama

di dalam Baitulmaal yang dijalankan Rasulullah SAW adalah bagaimana menerapkan *balanced budget* (keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran) dalam kebijakan keuangan negara. Artinya pengeluaran negara sesuai dengan penerimaan. Sehingga, tidak boleh terjadi lebih besar pasak daripada tiang.

Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud Ath-Thahir, pakar ekonomi Islam dari Universitas King Sa'ud, Riyadh dalam *Muqqadimah fi Iqtishaiyat Al-Maliyah Al-Ammah* menilai telah terjadi hubungan antara pengeluaran dan pemasukan. Yaitu, penentuan terperinci antara pengeluaran dan pemasukan. Ini mirip dengan konsep keseimbangan umum anggaran negara modern (*balanced budget*). Pengeluaran harus seimbang dengan penerimaan.

Nah, pengelolaan Baitulmaal di masa Umar bin Al-Khatthab (13-23 H/634-644 M), keuangan publik diurus lebih serius. Kekhalifahan memiliki buku induk yang mendata rencana anggaran, pemasukan dan pengeluaran negara. Semua dihitung tahunan, kurang lebih sama dengan konsep waktu dalam APBN modern.

Karena itu, negara kita sebenarnya bisa mengadopsi konsep Baitulmaal dalam mengelola keuangan publiknya. Salah satu yang mendasar, agar negara kita bisa menerapkan konsep tersebut adalah bagaimana agar negara bisa mengelola zakat dengan maksimal, plus juga dana dari wakaf dan infaq-sedekah untuk menjadi sumber utama penerimaan negara. Karena diyakini, potensi Ziswaf di negara kita sangat besar.

"Dengan potensi zakat, plus wakaf di negara kita yang sangat besar, maka negara kita seharusnya tidak perlu berutang," demikian diyakini salah seorang tokoh ekonomi syariah kita. Sebuah kritikan yang

positif tentunya, mengingat selama ini, negara lebih terkesan menanggapi zakat, plus juga wakaf hanya sekadar kegiatan keagamaan ritual saja.

Dengan sangat jelasnya kewajiban peruntukkan zakat bagi 8 asnaf (yang berhak menerima zakat), maka konsep pengeluaran negara pun menjadi lebih simple. Negara tinggal mengaplikasikan itu untuk pengeluaran negara di APBN. Jadi tak perlu bertele-tele, menjadi perdebatan di DPR selama ini.

Karena itu, kami menurunkan laporan utama mengenai Baitulmaal ini, beranjak dari keinginan para penggiat ekonomi syariah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan publik di negara kita, dari yang tadinya, selalu defisit, agar menjadi *balanced budget* seperti yang diajarkan dalam konsep ekonomi Islam mengacu Rasulullah SAW.

Selain laporan utama di atas, pada edisi kali ini, *Sharing* juga menampilkan sosok Mohamad Hidayat, tokoh yang berperan aktif dalam penerbitan fatwa-fatwa ekonomi syariah di tanah air. Pembaca bisa mengetahui latar belakang keluarnya fatwa-fatwa tersebut, serta berbagai dinamika didalam penerbitannya.

Dalam rubrik bisnis, *Sharing* mengajak pembaca mengetahui bagaimana Dagadu, produsen kaos terkemuka dari Yogyakarta yang mencoba terjun pula di bisnis fashion Muslim. Pembaca bisa mengetahui berbagai jurus yang dimainkan Dagadu dalam merambah segmen khusus ini. Selamat membaca!

Salam,

Tia Setiati Mahatmi



Kritik Ekonomi Islam Terhadap APBN

Berutang untuk menutup Defisit APBN mestinya tidak terjadi jika kita menganut sistem Baitulmaal.



Hal 42 Entrepreneur
Modal Cekak Bukan Halangan



Hal 36 Ragam
Menghargai Bambu, Menghargai Kehidupan

01 Cover.....	
03 Dari Redaksi.....	
04 Daftar Isi.....	
06 Susunan Redaksi.....	
07 Surat.....	
08 Memo Bisnis.....	
10 Laporan Utama	
28 Peristiwa Analisa	
36 Ragam	
38 Sosok	
42 Entrepreneur	
44 Fokus	
48 Bisnis	
52 Opini	
54 Manajemen Risiko	
58 Advertorial	
60 Tentang Mereka	
62 Distribusi	

Kurban sedekat hati



Kurban Anda membuat semuanya jadi begitu dekat, meski dipisahkan oleh jarak nun jauh di pelosok Nusantara



FORMULIR PARTISIPASI

Nama :
Alamat :
No. Tlp/HP :
Pilihan Kurban : ☐ Kambing/domba Rp. 888.000 ☐ Sapi Rp. 6.550.000
Isi & kirimkan/fax formulir ini beserta bukti transfer ke: 021 - 721 1005, 727 96860

Rekening a/n Dompot Dhuafa Republika

- CIMB NIAGA Syariah Cab Sudirman Tower AC 502.01.00026.00.8
- Bank Syariah Mandiri Cab Pondok Indah AC 004 0019 001
- BCA Cab Pondok Indah AC 237.3014.443
- BNI Syariah Cab Jakarta Selatan AC 009.1538.940
- BMI Cab Fatmawati AC 304.00080.10

Sudah termasuk: Operasional & Distribusi, Publikasi nama di HU Republika & website www.tebarhewan.or.id. Layanan jemput kurban 0817 607 7779 (untuk kurban minimal Rp. 2.664.000,00). Foto hewan kurban Anda. Layanan komunikasi langsung di counter LAYANAN THK. Dukungan berkelanjutan untuk pemberdayaan peternak, Partisipasi untuk konservasi budaya domba unggul dunia.

Perkantoran Margaguna
Jl. Radio Dalam Raya No. 11 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. (021) 721 1035 Fax. (021) 721 1005, 727 96860
email : surat@tebarhewan.or.id

www.tebarhewan.or.id

Layanan Jemput Kurban 0817 607 7779





FORM LANGGANAN MAJALAH SHARING

Nama :
 Alamat :
 Kota : Kode pos :
 Telepon/Fax :
 Masa Langganan : ☐ 6 edisi Rp 60.000 ☐ 12 edisi Rp 125.000 ☐ 24 edisi Rp 225.000

Pembayaran (pilih salah satu dan beri tanda ☒)

Dibayar langsung ke bagian sirkulasi Majalah Sharing

Transfer ke rekening a/n : **PT TRIBUWANA CAHYA ANANTA**
BNI Cabang Syariah Jakarta Selatan
 no rek: 0145 206 359

Keterangan:

Formulir langganan dan bukti pembayaran dikirim melalui
 Faksimili : 021 - 7 19 4000

..... 2009

Pelanggan

Nama lengkap & Tanda Tangan

**HADIAH
BERLANGGANAN**



6 Bulan Mendapatkan :

- Gratis berlangganan selama 3 Bulan

12 Bulan Mendapatkan :

- Gratis berlangganan selama 3 Bulan
- Pilih salah satu :
 # Buku Direktori Produk Halal Indonesia (DPHI)
 # Buku Marketing Bahlul karya Syakir Sula.



24 Bulan Mendapatkan :

- Gratis berlangganan selama 3 Bulan
- Buku Direktori Produk Halal Indonesia (DPHI)
- Buku Marketing Bahlul karya Syakir Sula

Biaya Kirim :

- Luar JABODETABEK : Rp. 2.500,- / Eks
- Luar Pulau JAWA : Rp. 4.500,- / Eks

Note : Selama persediaan masih ada

Griya Cahya

Jl. Bangka I No. 8 Jakarta 12720
 Tel: 62-21-719 6000 (hunting) Fax: 62-21- 719 4000
 e-mail : sharing@cahyagroup.com



Penasihat Senior

PARNI HADI
 RIZQULLAH

Pemimpin Redaksi & Perusahaan

Tia Setiati Mahatmi

Wakil Pemimpin Perusahaan

Wawan Salim
 Nidhianti Larasati

Kepala Divisi Penerbitan Majalah

Enny Lenggogeni

Dewan Redaksi

Ir. Adiwarmar A. Karim, SE, MBA

Dr. M Syafii Antonio

Dr. Didin Hafiduddin

Dr. Jafril Khalil

Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS

Prof. Dr. Sofyan Syafri Harahap

Dr. Ahmad Satori Ismail

Drs. H. Mohamad. Hidayat, MBA, MH

Dr. Mustafa Edwin Nasution

Prof. Dr. Uswatun Hasanah

Iggi Achsin, SE

Drs. Agustianto, MAG

Redaktur Pelaksana

Siwi Soetanto

Redaktur Senior

Ibrahim Aji

Yudi Suharno

Redaksi

Reni Susanti

Vera Aldila

Sri Mustokoweni (Yogyakarta)

Marketing

JIP Megawati Hartono

Suzi Zebrina

Desain Grafis

Hairul Anwar

Photographer

Arul

Foto

Kontributor / Dok / Imagebank

Sekretaris Redaksi

Naya

Distribusi

Haryanto

Sirkulasi

Romli

Keuangan

Rita Artha K

Salut Laporan Utama Sejarah Ekonomi Syariah

Saya seorang praktisi perbankan syariah di Bandung, Jawa Barat. Saya telah membaca Majalah *Sharing* edisi 34/Oktober 2009 lalu yang menampilkan Laporan Utama mengenai Sejarah Ekonomi Syariah di Indonesia. Saya salut, karena laporan tersebut sangat lengkap, serta inspiratif. Sehingga saya yang sedang melakukan penelitian tentang kinerja bank syariah menjadi sangat terbantu. Terima kasih buat *Sharing*. Salam.

Budi Cahya Negara

Dago

Bandung

Terima kasih atas apresiasinya.

Distribusi *Sharing* ke Pesantren

Saya adalah guru sebuah Ponpes di Purworejo, Jawa Tengah. Saya mendapatkan Majalah *Sharing* dari rekan saya, ketika berkunjung ke Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Saya melihat majalah *Sharing* sangat bagus. Saya senang, karena kini sudah ada majalah yang khusus mengupas bidang ekonomi Islam di Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin bertanya bagaimana prosedur distribusi majalah ini, karena pesantren kami juga ingin berlangganan. Terima kasih.

Asifuddin

Purworejo

Jawa Tengah

Untuk berlangganan, silakan hubungi bagian distribusi majalah kami di (021) 7196000, dengan saudara Fahmi. Terima kasih atas perhatiannya.

Tampilkan Produk-Produk Bank Syariah

Saya adalah seorang pembaca awam, yang belum lama ini tertarik dengan bank syariah. Saya ingin agar *Sharing* menampilkan berbagai produk perbankan syariah, lengkap dengan paparan keunggulan-keunggulannya. Serta bagaimana perbandingannya dengan produk sejenis di perbankan konvensional.

Rahma Hartanti

Cempaka Putih

Jakarta

Saran anda kami perhatikan. Terima kasih.

Majalah *Sharing* di Internet

Pembaca juga bisa mengunjungi majalah *Sharing* di internet. Silakan kunjungi <http://issuu.com/sharing/docs/2709> untuk membaca majalah *Sharing* online berformat PDF. Ikutlah berkomentar dan bergabunglah untuk menulis di blog kami, <http://majalahsharing.wordpress.com>.

Di ranah social networking, kami juga ada di Facebook (FB), silakan ketik 'ekonomi syariah-sharing magazine' di groups search FB atau langsung kunjungi <http://www.facebook.com/group.php?gid=46278149508>. Kami tunggu ya!



* BANK DKI SYARIAH BUKA KANTOR KAS KEENAM



Bank DKI Syariah membuka kantor kas baru di RS Annisa, Bekasi, Jawa Barat. Pembukaan ini sebagai upaya untuk mendekati nasabah menggarap peluang bisnis yang ada.

"Kami memiliki dua kantor cabang syariah, tiga kantor cabang pembantu dan ini merupakan kantor kas kami yang keenam," ujar Direktur Operasional Bank DKI, Ilham Joenoes, Selasa (27/10/2009). Ia menambahkan, untuk 2009 pembukaan kantor kas ini merupakan yang terakhir. Bank DKI Syariah baru akan menambah kantor pada 2010 diantaranya di Pasar Tanah Abang dan Pelabuhan Utara.

Ilham menjelaskan, bentuk kerjasama yang dijalin berupa bantuan pembiayaan dan deposito untuk karyawan, tenaga medis, ataupun masyarakat sekitar. Jumlah karyawan RS tersebut mencapai 400 orang, dan mereka sudah mulai ekspansi dengan membuka empat cabang.

"Belum lagi Yayasan Annisa Mitra Husada yang menaungi RS Annisa sangat dekat dengan warga sekitar," tutur dia. Jika responnya positif, tidak menutup kemungkinan, kantor kas ini akan berubah menjadi kantor cabang.

Direktur Utama RS Annisa, dr Noor Arida Sofiana mengharapkan kehadiran kantor kas Bank DKI Syariah ini mampu memberikan pelayanan perbankan yang terbaik.

* BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PADANG TETAP BEROPERASI

Bank Syariah Mandiri (BSM) di wilayah Sumatra Barat telah kembali melayani nasabah sejak 2 Oktober 2009, menyusul gempa yang mengguncang Provinsi Sumatra Barat pada hari Rabu (30/9). Kantor BSM yang beroperasi tersebut

adalah Kantor Cabang (KC) Padang, Kantor Kas (KK) Pariaman, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Payakumbuh, KCP Bukittinggi, dan KCP Solok.

Layanan yang diberikan mencakup keseluruhan seperti layanan kas, ATM, RTGS, dan kliring.

BSM memiliki 9 outlet di Sumatra Barat. Outlet tersebut terdiri dari KC Padang, KCP Solok, KK Pariaman, KCP Payakumbuh, KCP Bukittinggi, KK Bandar Buat, KK Ulak Karang, KK Padang Panjang, dan Payment Point (PP) Universitas Andalas. Dari sembilan outlet tersebut,

tiga kantor sama sekali tidak terpengaruh oleh gempa. Ketiganya adalah KC Bukit Tinggi, KCP Payakumbuh, dan KCP Solok. Dengan begitu, ketiga kantor ini beroperasi normal. Sedangkan, KC Padang dan KK Pariaman melayani nasabah secara normal mulai 2 Oktober di atas.

Adapun kantor BSM di Ulak Karang, Bandar Buat, Padang Panjang, dan Universitas Andalas kembali melayani nasabah atau beroperasi secara normal 5 Oktober 2009.

BSM menyampaikan duka cita mendalam untuk korban gempa di Provinsi Sumatra Barat dan Jambi. Selain berusaha memulihkan operasional bank secepatnya agar dapat membantu korban gempa, BSM pada tahap awal menyalurkan makanan untuk korban gempa di sekitar Cabang Padang. Pada hari Jumat, BSM bersama Lembaga Amil Zakat (LAZ) BSM Ummat mengirimkan ambulans dan obat-obatan ke lokasi gempa.

* GREAT EASTERN PEDULI NASABAH & KORBAN GEMPA BUMI DI SUMATERA

PT Great Eastern Life Indonesia (GELIndo) menyalurkan donasi sebesar IDR 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk korban gempa di Padang dan Jambi, wilayah Sumatera. Donasi tersebut diberikan bersamaan dengan pemberian sponsor pada acara Insurance Day 2009 yang diadakan 18 Oktober 2009. Selain itu, Induk Perusahaan GELIndo Grup OCBC Bank dan Great Eastern Holdings, Singapore telah menyalurkan donasi sebesar IDR 700.000 (tujuh ratus juta rupiah) melalui Red Cross Singapore. Para karyawan GELIndo juga telah mengusahakan kontribusi

mereka pribadi untuk membantu para korban yang disumbangkan melalui "Dana Kemanusiaan Kompas".

GELIndo akan secara proaktif mendata dan mencari para Pemegang Polis yang berada di wilayah gempa tersebut. Para Pemegang Polis tersebut maupun keluarganya telah dihubungi GELIndo melalui "Call Center" dan saluran Distribusinya. Bersama dengan biro perasuransian - BAPEPAM-LK, Departemen Keuangan RI dan Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI), GELIndo akan bersama-sama mendata pengajuan klaim dengan membuka posko klaim di daerah tersebut.

* PORSENI ASBISINDO JAWA BARAT



Untuk pertama kalinya, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jawa Barat menggelar Porseni. Kegiatan ini sengaja diadakan untuk mempererat tali silaturahmi antar anggota dan mengenalkan Asbisindo kepada masyarakat Bandung.

"Selain ingin mengenalkan apa itu ekonomi syariah, kami juga ingin memperkenalkan apa itu Asbisindo," ujar Ketua Asbisindo Jabar, Suroso, di Soekarno-Hatta Sport Center Bandung, Sabtu, 24 Oktober 2009. Pasalnya selama ini banyak orang yang tidak tahu apa atau siapa Asbisindo. Karena memang harus diakui, Asbisindo tidak pernah menggelar acara yang besar. Dan inilah untuk pertama kalinya, Asbisindo menggelar acara besar.

Menurut Panitia Porseni Asbisindo Jabar, Ali Gustaf Siregar, kegiatan ini diikuti 18 dari 22 bank syariah anggota Asbisindo. Walaupun tidak diikuti semua anggota, acara berlangsung meriah. Itu bisa terlihat dari peserta yang ikut gerak jalan.

"Pesertanya banyak sekali mencapai 800 orang," kata Ali. Ratusan orang ini tak hanya mengikuti gerak jalan, mereka mengikuti rangkaian perlombaan yang diadakan panitia seperti futsal, badminton, tenis meja dan panco. Dari

perlombaan tersebut, BNI Syariah Bandung membawa pulang trofi bertuliskan juara umum.

Sebagai acara puncak, panitia menggelar acara 'bank performance'. Disini, setiap perwakilan bank peserta menampilkan kepiawaian berkesenian. Rupanya, mereka tak hanya pintar menghitung uang, karena ternyata mereka mahir memainkan calung, alat band hingga teater. Untuk penampilan terbaik, panitia menyediakan trofi khusus. Trofi itu dimenangkan BPRS Amanah Rabaniah yang menampilkan alat musik khas Jabar, calung.

"Alhamdulillah acaranya sukses," ungkap Ali. Rangkaian acara dilaksanakan setiap akhir pekan minggu kedua hingga empat bulan Oktober 2009. Melihat suksesnya acara ini, kemungkinan besar tahun depan akan digelar acara serupa.

❁ BAHANA ARTHA VENTURA UNIT SYARIAH SALURKAN RP 17 M

Bahana Artha Ventura, turut berperan serta dalam pengembangan industri keuangan syariah Indonesia, melalui Unit Syariahnya. Sampai dengan Agustus 2009 unit syariah Bahana Artha Ventura telah menyalurkan Rp 17 miliar, sehingga dengan angka tersebut maka sudah lebih dari 50 persen dari target mereka tahun ini terlewati. Target penyaluran pembiayaan Bahana Artha Ventura sendiri sebesar Rp 30 milyar tahun ini.

Seperti dijelaskan, Edy Tri Suarwadi, Kepala Unit Syariah Bahana Artha Ventura, bahwa sebanyak total pembiayaan tersebut, disalurkan kepada 423 perusahaan pasangan usaha (PPU). Rata-rata pembiayaan per PPU adalah sebesar Rp 40 juta. Dan sebagian besar mereka salurkan ke sektor mikro (65%), sektor jasa (33%) dan telekomunikasi (2%). Pembiayaan tersebut dilakukan dengan skema pembiayaan langsung, executing dan channeling melalui koperasi jasa keuangan syariah dan perusahaan modal ventura. Bahana Artha Ventura tercatat memiliki 27 kantor penyaluran pembiayaan yang tersebar di 26 provinsi, seperti di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, NTB, NTT, Bali, Jawa Timur, Surakarta, Yogyakarta, Maluku, dan Papua.

❁ WISUDA STEI TAZKIA DENGAN TEMA "KEBIJAKAN PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM SERANTAU"

Ada yang istimewa dengan prosesi wisuda Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia kali ini. Jika tahun-tahun sebelumnya Wisuda STEI Tazkia dilaksanakan di luar kampus, untuk pertama kalinya prosesi wisuda dihelat di kampus baru STEI Tazkia, tepatnya di Multifunction Hall Masjid Al-Hambra, Andalusia

Islamic Center Sentul Bogor. Acara yang berlangsung pada Sabtu (24/10) ini mengangkat tema "Kebijakan Pengembangan Ekonomi Islam Serantau" dengan Keynote Speaker Mantan Perdana Menteri Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim.

Pembantu Ketua I STEI Tazkia, Ahmad Affandi M.Ec mengatakan, wisuda V ini menjadi wisudawan terbanyak dalam sejarah STEI Tazkia. Sebanyak 60 Mahasiswa menjadi wisudawan angkatan V dengan komposisi 18



orang dari Program Studi Akuntansi Islam, 35 orang Program Studi Bisnis dan Manajemen Islam, dan 7 orang dari Program Studi Ekonomi Islam.

Dari sisi prestasi, dengan standar akademik yang lebih ketat, wisudawan pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Kenaikan yang sangat drastis, menurut Affandi, terjadi pada perbandingan antara tahun 2008 dan 2009. "Kondisi ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin meningkatkan prestasi di

tahun-tahun sebelumnya dengan memperketat aturan akademik, kurikulum yang baik, dan meningkatkan kualitas dosen dan mahasiswa untuk mentradisikan excellent academic culture," kata Affandi

Ketua STEI Tazkia, Dr Syafii Anton sambutannya mengatakan bahwa pesatnya perkembangan industri syariah membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan qualified. Sebagai respon dari fenomena ini,

STEI Tazkia telah melakukan beberapa penyesuaian, baik dari kurikulum, peminatan program studi, dan sarana-prasarana. "Kami juga sedang menyusun standarisasi buku teks ekonomi Islam yang terdiri dari bisnis dan manajemen Islam, akuntansi Islam, dan Ilmu Ekonomi Islam, yang diharapkan akan menjadi rujukan bahan ajar seluruh program studi Ekonomi Islam dari PTAI di Indonesia" ujar Syafii.

Tampil sebagai wisudawan terbaik umum pada wisuda kali ini, Taufiq Adi Pradhana dari Jurusan Bisnis dan Manajemen Islam dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.74. Sementara untuk terbaik jurusan, Abdussalam dari Ilmu Ekonomi Islam dengan IPK 3,52, jurusan Akuntansi Islam Arna Agustin dengan IPK 3.67 dan Taufiq Adi Pradhana dengan IPK 3.74 dari Bisnis dan Manajemen Islam.



Refat Abdullah, GM Strategic Planning perwakilan Saudi Telecom Company meresmikan Kafalah Office Gallery, yang merupakan kantor baru dari Kafalah Communication Advertasing Syariah pada 28 Oktober 2009, disaksikan oleh Managing Director Kafalah, Eka Santy, dan pelukis muslim, Goes Noeg.

Mengelola Keuangan Publik Secara Islami

Kabinet baru sudah terbentuk, APBN 2010 sudah disusun dan disahkan, negara pun siap dijalankan. Sejak zaman pemerintahan Soekarno, negara biasa berutang, alasannya, menutup defisit anggaran negara. Mengapa defisit? Pengeluaran lebih besar dari pemasukan.

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah Muslim, tapi Indonesia bukan negara Islam. Sistem pemerintahannya adalah presidensial, bukan model kekhalifahan. Sistem pengelolaan keuangan publiknya juga bukan seperti yang diterapkan sebuah kekhalifahan.

✧ BALANCE BUDGET

Salah satu prinsip keuangan publik Islam tidak menganjurkan negara berutang. Pengeluaran disesuaikan dengan pemasukan, bukan sebaliknya. Dalam sebuah riwayat, Qubaishah ibnul Mukhariq, mengisahkan: "Saya pernah

Muqqadimah fi Iqtishaiyat Al-Maliyah Al-Ammah menilai telah terjadi hubungan antara pengeluaran dan pemasukan. Yaitu, penentuan terperinci antara pengeluaran dan pemasukan. Ini mirip dengan konsep keseimbangan umum anggaran negara modern (*balance budget*). Pengeluaran harus seimbang dengan penerimaan.

Jadi, menurut Dr. Mustafa Edwin Nasution, pakar ekonomi Islam dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), ekonomi konvensional mengenal pengelolaan keuangan publik terpusat, tertata, dan seimbang ditandai dengan pemikiran-pemikiran John Maynard Keynes pada 1930-an. "Ekonomi Islam sudah mengatur fungsi pemerintah di dalam perekonomian di tahun 600-an M, sementara Keynes di 1930-an. Suatu hal luar biasa," kata Mustafa kepada *Sharing*.

✧ BAITULMAAL

Di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Azis (717-720 H), Kekhalifahan 'pusing'

kepada yang masih bujangan dan tidak punya dana untuk menikah. Abdul Hamid menjawab sama. Akhirnya, Khalifah Umar memberikan kelonggaran pembayaran pajak warganya.

Bagaimana Islam mengatur anggaran negara, pemasukan, dan pengeluarannya? Semua dilakukan melalui sebuah lembaga bernama Baitulmaal yang secara harfiah berarti 'rumah harta'. Baitulmaal memiliki bangunan sendiri, pegawai sendiri, buku induk sendiri, dan independensi terhadap penguasa.

"Memang tidak *apple to apple* membandingkan *plek-plek* Baitulmaal dengan sistem APBN sekarang, instrumennya berbeda, masanya berbeda, sistem sosial masyarakat juga berbeda", komentar Yusuf Wibisono, Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEUI kepada *Sharing*. Namun, Yusuf menilai, paling tidak ada nilai-nilai yang bisa disarikan dari Baitulmaal dan digunakan sebagai kritik atas APBN saat ini. Salah satunya adalah, *the power of*

"Ekonomi Islam sudah mengatur fungsi pemerintah di dalam perekonomian di tahun 600-an M, sementara Keynes di 1930-an. Suatu hal luar biasa!"

mendatangi Rasulullah untuk mengajukan aduan tentang bayaran diyat dan utang. Rasulullah bersabda, 'Tunggulah terlebih dahulu, sehingga zakat datang kepada kita...'. Maksudnya, Rasulullah tidak mengeluarkan uang negara di muka sebelum pemasukan datang, apalagi sampai berutang.

Di masa Umar bin Al-Khathab (13-23 H/634-644 M), keuangan publik diurus lebih serius. Kekhalifahan memiliki buku induk yang mendaftarkan rencana anggaran, pemasukan dan pengeluaran negara. Semua dihitung tahunan, kurang lebih sama dengan konsep waktu APBN modern.

Dr. Abdullah Asy-Syaikh Mahmud Ath-Thahir, pakar ekonomi Islam dari Universitas King Sa'ud, Riyadh dalam

karena tidak ditemukan orang miskin di negara Islam. Sebagaimana diriwayatkan Athiyyah bin Qais, Khalifah Umar bin Abdul Azis memerintahkan Abdul Hamid bin Abdurrahman, 'Menteri Zakatnya', yang tengah berada di Irak untuk membagikan harta kepada kaum miskin. Sebelumnya, Khalifah menemukan kelebihan harta di kas negara. Abdul Hamid kerepotan, "Sesungguhnya aku telah membagikan gaji dan bagian harta itu kepada umat manusia. Tetapi, di dalam Baitulmaal masih terdapat sisa".

Khalifah lalu menyuruh Abdul Hamid mencari orang yang terlilit utang untuk dibagikan harta tersebut. Jawaban Abdul Hamid sama dengan di atas, "Tidak ada yang berutang". Khalifah Umar lalu menyuruh Abdul Hamid membagikannya

voluntary sector. Yang secara kentara membedakan Baitulmaal dengan sistem APBN saat ini, menurut pakar ekonomi Islam, Dr. Muhammad Syafii Antonio adalah *the power of voluntary sector*. Baitulmaal memang menerima pemasukan dari pajak, tapi ada juga dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). "Hasil dari ziswaf dijadikan sebagai perbendaharaan negara juga. Hanya ada special entry and allocation-nya". Nah, jika ingin mengambil nilai-nilai Baitulmaal ke masa kini, menurut Syafii, "Yang penting adalah menjadikan *voluntary sector* sebagai salah satu kekuatan pemasukan negara, ini sebagai instrumen pemberdayaan, saat ini kan dilepas begitu saja".

■ IA



Kritik Ekonomi Islam Terhadap APBN

Berutang untuk menutup Defisit APBN mestinya tidak terjadi jika kita menganut sistem Baitulmaal.

Dalam APBN 2010, Pendapatan Negara dan Hibah 2010 ditargetkan sebesar Rp949,7 triliun atau 15,9% dari produk domestik bruto (PDB) dengan Anggaran Belanja Negara sebesar Rp1.047,7 triliun atau setara 17,5 persen dari PDB. Defisit anggaran dalam APBN 2010 diperkirakan sebesar Rp98 triliun atau 1,6% PDB.

UU APBN 2010 disahkan dalam rapat Paripurna DPR-RI pada Rabu, 30 September 2009. Berikut adalah beberapa kritik terhadap APBN 2010 yang mengemuka di masyarakat. Di antaranya adalah soal defisit dibayar dengan utang, pengeluaran besar untuk belanja pegawai negara, dan penerimaan dari pajak tetap menjadi prioritas utama. Bagaimana keuangan publik Islam menilainya?

Dua pakar ekonomi Islam, Dr. Mustafa Edwin Nasution dan Karnaen Perwataatmadja memberikan pandangannya. Mustafa adalah salah satu pelopor pendidikan ekonomi Islam di perguruan tinggi Indonesia. Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) ini kini adalah Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Sedangkan

Karnaen adalah Wakil Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sejarah pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, ulama satu ini dikenal sebagai salah satu tokoh-tokoh awal yang membidani lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1992. Berdirinya BMI dianggap banyak kalangan sebagai tonggak lahirnya ekonomi syariah di Indonesia dalam format modern.

❖ UTANG, CARA TUTUP DEFISIT

Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah membuka opsi pendanaan melalui empat sumber. Pertama, pinjaman luar negeri dengan persyaratan lunak dan jangka panjang. Kedua, mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rupiah di pasar dalam negeri. Ketiga, membuka akses sumber pembiayaan di pasar internasional, seperti obligasi global dan sukuk global.

Dalam Nota Keuangan APBN 2010, defisit tersebut akan ditutup masih mengandalkan utang baik dalam bentuk penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp104,4 Triliun dan utang luar negeri sebesar Rp57,6 Triliun.

Menurut PLT Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu I (demisioner), Sri Mulyani, Pemerintah sepakat dengan DPR tentang perlunya

mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam pembiayaan negara, khususnya untuk membiayai defisit tersebut.

Tahun ini pemerintah akan membayar utang senilai Rp 127,607 triliun. Ini membuat total pinjaman luar negeri pemerintah menurun dari USD 66,69 Miliar menjadi USD 63,8 Miliar. Jumlah pembayaran utang ini adalah yang terbesar sejak 2004. Ini pun akan membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto turun ke level 30%.

Sementara itu, lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) memperkirakan di angka 32% dari PDB 2009. Menurun hampir setengah dibandingkan rasio utang terhadap PDB pada 2004. Jika dilihat data Departemen Keuangan (Depkeu), total pinjaman luar negeri yang ditarik masih lebih rendah (Rp69,3 Triliun) dibandingkan utang luar negeri yang dibayar tahun ini (Rp 82,024 Triliun).

Dalam siaran persnya pada 23 Oktober 2009, S&P menilai penurunan rasio utang terhadap PDB karena konsistensi pemerintah Indonesia dalam mencapai surplus anggaran dan kuatnya pertumbuhan PDB nominal. Sementara, cadangan devisa mencetak angka USD62,3 Miliar pada Oktober 2009.

Oleh karena itu, S&P menaikkan *outlook* Indonesia



dari 'Stabil' ke 'Positif'. Peringkat utang valas jangka panjang Indonesia ke 'BB-' dan peringkat utang dalam Rupiah ke 'BB+'. S&P juga mempertahankan peringkat *sovereign* utang jangka pendek Indonesia di 'B'.

Sementara itu, total utang yang diperoleh tahun ini ditargetkan Rp 214,139 Triliun. Utang-utang tersebut berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp 144,84 Triliun, pinjaman program dari sejumlah lembaga keuangan dan negara asing Rp 30,316 Triliun, serta pinjaman proyek Rp 38,984 Triliun.

Sharing: Bolehkah Baitulmaal berutang?

Dr. Mustafa Edwin Nasution:

Misalnya tentang utang. Utang-mengutang dalam teori ekonomi itu suatu hal yang wajar saja. Misalnya, kalau kita ingin bertumbuh, dengan pertumbuhan penduduk sekian, maka jumlah tenaga kerja yang harus dibuka adalah sekianpersen per tahun, maka dibutuhkan perusahaan-perusahaan baru yang dibuka adalah sekian, lalu untuk menumbuhkan perusahaan-perusahaan itu dibutuhkan modal sekian, maka untuk itu, perlu utang untuk menyelamatkan itu. Jadi, itu logika konvensional, maka sah-saja berutang.

Kalau dalam ekonomi Islam, utang itu sah, tapi bukan kegiatan yang disukai atau dianjurkan. Sedapat mungkin harus dihindari. Justru yang diajarkan dalam Islam itu adalah kita harus menyiapkan diri, bukan berutang. Seperti kisah Nabi Yusuf, ada masa paceklik, dan ada masa subur. Nah, siapkan panen kamu untuk masa paceklik, agar kamu pada waktu paceklik (krisis) siap. Itu berarti kita dianjurkan

untuk mempersiapkan *saving* (menabung).

Atau dalam ajaran lainnya tentang konsep pengeluaran. Kita diajarkan melakukan pengeluaran di jalan Allah. Seperti yang ada di Al Quran, surat Al Baqarah 261;

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. Al Baqarah : 261).

Nah, di dalam sistem keuangan Islam, sumber penerimaan itu bisa macam-macam. Bisa dari zakat, wakaf, infaq, sodaqoh, warisan, tanah, pampasan perang, pajak dari Non Muslim yang dalam perlindungan. Itu yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran di jalan Allah, sehingga manfaatnya tidak terhingga.

Lalu, kalau kita melihat Al Quran dan hadits, maka untuk pengeluaran-pengeluaran ada pula contoh-contohnya di jaman rasul. Tinggal disesuaikan dengan kompleksitas jaman kini.

Karnaen Perwataatmadja:

Ada dua sisi, penerimaan dan pengeluaran. Di sisi penerimaan, seharusnya zakat menjadi tumpuan penerimaan, juga wakaf. Dari sisi pengeluaran, penyaluran kepada 8 asnaf di dalam Alquran, menjadi prioritas. Itu langkah-langkah yang perlu dilakukan, kalau kita ingin menerapkan Baitulmaal seperti jaman Rasulullah.

Kemudian kita juga harus mengacu pada konsep *balance budget*. Agar utang dihilangkan. Sehingga secara

berangsur, utang ini harus terus dikurangi-dikurangi, sehingga akhirnya tidak lagi berutang. Lalu dengan kita tidak memakai konsep bunga, namun menerapkan prinsip bagi hasil, maka dengan bunga itu dilarang, kita harapkan *saving* itu menjadi investasi.

*** PENERIMAAN NEGARA SEBAGIAN BESAR DARI PAJAK**

Memasuki tahun 2010, kondisi perekonomian Indonesia diharapkan mulai pulih dari krisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan mencapai level yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan realisasi 2009. Demikian juga halnya pada beberapa indikator makroekonomi lainnya yang secara umum diperkirakan akan mengalami perbaikan.

Berdasarkan asumsi perbaikan kondisi ekonomi, pemerintah menargetkan penerimaan negara terdiri dari pajak sebesar Rp 742,7 Triliun dan penerimaan bukan pajak Rp 205,4 Triliun. Belanja Negara akan dialokasikan untuk pusat sebesar Rp 725,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 322,4 triliun.

Sharing: Kalau kita kaji satu persatu, bagaimana sumber-sumber pendapatan Baitulmaal?

Dr. Mustafa Edwin Nasution:

Kalau kita lihat, berkaitan dengan sumber pendapatan, maka ada pendapatan yang rutin dan yang non rutin. Pendapatan itu ada dari penerimaan pembangunan, terus terutama dari pinjaman. Kalau kita lihat pendapatan rutin, itu berasal dari pajak, dan pajak yang terutama atau yang terbesar dari pajak pendapatan, pajak perusahaan atau pajak dari kegiatan perminyakan.

Nah, sumber pendapatan secara Islami itu masuk, nggak? Sekarang ini belum!Belum ada usaha-usaha untuk memasukkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam ini, misalnya, zakat, yang potensinya besar, ataupun wakaf juga, sebagai bagian dari sumber pendapatan negara. Zakat dan wakaf ini masih dianggap sebagai bagian dari kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, sehingga tidak tercatat. Padahal, kalau ini dimasukkan, suatu hal yang potensinya luar biasa besarnya? Dan kalau kita lihat besarnya hutang kita itu, maka, kalau perlu, dengan adanya wakaf dan zakat itu, sebetulnya kita nggak perlu ngutang! Tapi syaratnya satu, dibenarkan atau didukung penuh itu kegiatan zakat dan wakaf.

Karnaen Perwataatmadja:

Kebijakan yang paling menentukan dalam keberhasilan Baitulmaal, bagaimana Rasulullah memanfaatkan pendapatan zakat itu untuk kemashalatan ummat.

Nah, yang menarik, di kita sekarang ini, untuk 8 asnaf, kita terjemahkan seolah-olah pengeluarannya rata dibagi masing-masing asnaf. Nah, menurut saya ini masih harus dikaji lagi. Karena kalau menurut saya, apa betul masing-masing persis mendapat 1/8. Jangan-jangan seharusnya ada juga semacam prioritas-prioritas di sana. Saya ambil contoh, seperti dalam Alquran, berapa kali fakir dan miskin, gharimin, dan fisabilillah disebutkan? Lalu berapa kali amil di sebut? Ternyata amil disebut cuma sekali. Dan yang paling banyak fisabilillah. Karena itu, seharusnya fisabilillah yang diutamakan. Nah, fisabilillah ini mungkin harus dirumuskan kesepakatannya, yang masuk golongan ini siapa saja.

Karena ada yang mengatakan di fisabilillah, pendidikan juga masuk ke golongan ini. Karena makna fisabilillah, bukan hanya fisik (perang), tapi bisa juga perjuangan untuk meningkatkan pengetahuan. Karena, konon kalau orang mengembara, menuntut ilmu, itu sahid,. Jadi ini harus dibiayai, orang-orang yang hendak mencari ilmu atau bisa kita terjemahkan ini sebagai pendidikan.

❖ CUMA BELANJA PEGAWAI YANG NAIK

Di APBN 2010, terjadi kenaikan anggaran belanja negara hanya di pemerintah pusat yang didominasi oleh belanja pegawai (Rp161,7 Triliun) dan belanja barang (Rp100,2 Triliun) serta pembayaran bunga utang (Rp115,6 Triliun). Jumlah pembayaran bunga utang bahkan lebih besar dari belanja modal pemerintah yang hanya sebesar Rp76,8 Triliun. Kenaikan pembayaran bunga utang pada APBN 2010 mencapai lebih dari Rp 5 Triliun.

Peningkatan anggaran untuk belanja pegawai ini dikarenakan Pemerintah akan menambah jumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang mendapat remunerasi. Selain itu, pada 2010 nanti pemerintah bakal menambah 100.000 pegawai baru di tingkat pusat.

Untuk 2010, anggaran belanja pegawai menjadi Rp161,7 Triliun atau naik Rp 28 Triliun atau 21% dari perkiraan realisasinya di 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 %.

Sharing: Bagaimana kebijakan pengeluaran

Baitulmaal?

Mustafa Edwin Nasution:

Pengeluaran itu kan juga tergantung kebutuhan, ya? Harus skala prioritas, maka pengeluaran berkenaan dengan pendidikan, seharusnya ditingkatkan, dan ini dampaknya jangka panjang. Kemudian mendorong gerak ekonomi yang ada, misalnya di bidang pengangkutan, transportasi. Karena kalau kita lihat, salah satu sebab ekonomi biaya tinggi karena mahalnya transportasi ini. Lalu untuk orang miskin, apa yang kita keluarkan? Perlu adanya peningkatan peran daripada APBN untuk orang miskin ini dan juga terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Karnaen Perwataatmadja:

Rasulullah itu juga melakukan yang namanya prioritas. Jadi mana yang diprioritaskan, itu yang diutamakan, sehingga secara bertahap, beliau pertama mengutamakan pegawai. Jadi pegawai itu harus cukup. Semua, dari mulai karyawan Baitulmaal, itu sudah mulai digaji, kemudian utusan-utusan yang kemana-mana dikirim, itu digaji. Jadi tahapannya mulai dari pegawai dulu. Bagaimana supaya mental pegawai ini jangan rusak, apalagi petugas-petugas zakat, karena petugas ini kan dikirim kemana-mana. Mereka juga tak boleh menerima hadiah, terkait dengan tugas-tugasnya.

Karena ini terkait dengan tugas, maka petugas-petugas amil zakat dicukupi, sehingga dia bisa kuat mentalnya. Ini untuk mencegah dia melakukan penyimpangan.

Kemudian diperhatikan Rasulullah berikutnya adalah prioritas pengeluaran pendidikan. Ketika Rasulullah menang perang, dia selalu mengambil orang-orang yang ditawan, untuk bisa

mengajarkan berbagai hal, misalnya mengajar, menulis, membaca. Kalau dia dokter maka disuruh mengobati, lalu mengajarkan bagaimana cara mengobati. Sampai tukang pandai besi sekalipun, juga diminta mengajarkan ilmunya.

■ IA/YS

❖ Asumsi Ekonomi APBN 2010:

- 1 Pertumbuhan Ekonomi 5,5%
- 2 Inflasi 5%
- 3 Nilai tukar rupiah Rp 10.000/US\$
- 4 Suku bunga SBI 3 bulan 6,5%
- 5 Harga Minyak (ICP) US\$ 65 per barel
- 6 Lifting Minyak 965 ribu barel per hari
- 7 Nominal PDB Rp 5.981,37 triliun

❖ Data Umum APBN

Pos	Nominal (Triliun Rupiah)
Pendapatan Negara	949,7
Pen. Perpajakan	742,7
Pen. Bukan Pajak	205,4
Hibah	1,5
Belanja Negara	1.047,7
Belanja Pem. Pusat	725,2
Belanja Daerah	322,4
Pembiayaan	98,0
-Dalam negeri	107,9
-Luar Negeri	-9,9

PAJAK

PAJAK

"APBN Kita Bisa Mengadopsi

Dalam pengelolaan keuangan negara, Rasulullah SAW sebagai pemimpin selalu berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan ummat. Prinsip utama yang Rasulullah ajarkan adalah bagaimana menerapkan balanced budget (keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran) dalam kebijakan keuangan negara, serta juga menghindari utang.



Karnaen Perwataatmadja

Wakil Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI)



Pemerintahan kita pun sebenarnya bisa menerapkan hal di atas, demi mengupayakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian menurut **Karnaen Perwataatmadja**, salah satu pelopor ekonomi syariah di Indonesia kepada **Sharing**. Karnaen kini menjadi Wakil Ketua Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dekan FE Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA), Jakarta.

☒ Anda bicara soal Balanced Budget dan Baitulmaal, bagaimana bisa diterapkan di masa kini?

Konsep anggaran APBN modern sebenarnya bisa mengadopsi konsep Baitulmaal dengan apa yang disebut *balanced budget*. Seimbang antara yang diterima dengan yang dikeluarkan. Maka dari itu, meski utang itu dibolehkan, tapi tidak dianjurkan dalam Islam, bahkan secara perorangan utang itu bisa membahayakan diri sendiri. Karena ada riwayatnya, ketika ada sahabat Rasulullah yang meninggal, namun dia

berutang, Rasulullah tidak mau menyalatkannya. Itu artinya, utang itu boleh namun tidak dianjurkan dan utang itu tidak boleh dibawa mati.

Jadi *balanced budget*, artinya pengeluaran sesuai dengan penerimaan. Jadi Indonesia tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Kalau kita ingin ikuti jejak sukses Rasulullah, artinya mengikuti jejak suksesnya. Rasulullah itu memakmurkan, dalam waktu boleh dikatakan kurang dari 10 tahun. Itu adalah dengan *balanced budget*. Dengan *balanced budget* itu, tentunya penerimaannya dinamis. Semakin banyak orang yang berzakat, semakin banyak pengeluaran. Karena zakat itu dilakukan bukan untuk melestarikan kemiskinan, namun dimaksudkan untuk mengubah yang tadinya tangannya di bawah, jadi di atas.

Kalau yang perlu diaplikasikan sekarang, jadi yang pertama bagaimana mengurangi utang. Kalau sekarang kita sudah terlanjur berutang, bahkan utang itu menjadi beban

generasi berikutnya, maka harusnya terus dikurangi bebannya.

Masalah kita sekarang, memang masih utang-utang terus. Dulu utang dari luar negeri, sekarang juga utang dalam negeri.

☒ Secara umum bagaimana praktik Baitulmaal di jaman Rasulullah?

Kita harus kembali ke sejarah, bagaimana Rasulullah SAW sukses dalam mengelola negara, termasuk mengelola keuangan negara. Masa yang Beliau tempuh ketika hijrah ke Madinah sampai wafat, hanya 12 tahun. Jadi kalau aktifnya barangkali 10 tahun. Baitulmaal tumbuh sejak adanya penerimaan negara pertama, ghanimah (rampasan perang) sampai kemudian mendapat tanah-tanah wakaf yang menghasilkan, semua masuk ke Baitulmaal.

Jadi Baitulmaal itu sebenarnya konsep negara. Konsep kenegaraan, karena penerimaan-penerimaan negara masuk ke dalam Baitulmaal. Hal itu berlangsung sampai

kemudian saat ketika turun ayat tentang zakat, surat Al Hasyr tahun 7 H. Nah, itu merupakan suatu indikasi, bahwa masyarakat Arab pada waktu itu, sudah mulai naik pendapatan perkapitanya. Paling tidak dia sudah mencapai nisab. Sudah muzakki kebanyakan. Bahkan ada riwayat, ketika beberapa masa kemudian, di masa kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz, diceritakan, Bahkan orang sampai kesulitan mencari orang yang berhak menerima zakat. Itu tidak ketemu yang namanya mustahik, semua sudah kecukupan.

Jadi, konsep Baitulmaal itu pada akhirnya ketika sudah hampir tidak ada lagi peperangan, sumber pendapatan Baitulmaal terutama dari zakat kemudian wakaf. Dan wakaf ini lalu sangat berkembang pesat, terutama pada zaman kekhalifahan yang terakhir, Utsman. Sehingga wakaf sampai sekarang menjadi rujukan.

☒ Bagaimana sebenarnya

Konsep Rasulullah dengan **Balanced Budget**"

fungsi-fungsi kelembagaan yang ada pada Baitulmaal di jaman Rasulullah?

Kelembagaan pasti ada. Namun saya tidak tahu, nama-namanya. Bahkan pada masa Sayyidina Utsman, mulai dipisahkan antara pengadilan dengan masjid, dan juga antara Baitulmaal dengan masjid. Jadi pasti ada kelembagaannya yang mengatur bagaimana kemashlatan itu dijalankan. Tapi persisnya nama departemennya apa saja, saya kurang hafal.

Sebenarnya Baitulmaal itu sendiri apa?

Kantor perbendaharaan negara.

Prasyarat apa saja yang harus dimiliki suatu negara untuk menjalankan konsep Baitulmaal?

Pertama, ya tentu, negara harus ada komitmennya. Kalau di Indonesia, semua orang bisa menjadi amil. Asal dia punya tanah wakaf, lalu dia mengangkat dirinya menjadi amil, lalu mencari dana. Nah, ini harusnya negara yang menjalankan.

Untuk menuju sistem Baitulmaal, tahap pertama, bagaimana agar negara bisa sebagai pengelola zakat. Ini tentunya ada kontroversinya, karena mungkin ada yang menentangnya. Karena katanya zakat ini masyarakat, padahal jaman rasulullah ini negara yang mengelola. Baitulmaal ini negara.

Namun, minimal sudah ada

kemajuan, sekarang ini sudah mulai diatur, untuk bisa menjadi amil, maka bentuknya ada Baziz, dan Lazis. Sebenarnya ini sudah mulai ke arah sana.

Namun yang di masyarakat sebelumnya tidak diatur, kan? Semua orang boleh. Karena itu, sekarang sudah mulai dibatasi. Lazis sama Basis adalah yang sudah mendapatkan ijin. Syaratnya ijin adalah transparansi, dia harus diaudit-akuntan publik dan diumumkan berapa pendapatannya. Lalu kemajuan yang lain, dengan membawa tanda bukti dia membayar zakat, maka dia akan mengurangi kewajiban pajak. Jadi di SPT Pajak sudah dicantumkan. Sebenarnya kita mulai mengarah ke yang lebih baik. Apalagi, kalau departemen keuangan, barangkali bisa dibuat direktorat jendral khusus zakat dan pajak.

Jamannya Rasulullah, yang wajib zakat adalah umat silam. Jadi tidaklah wajib zakat kepada orang yang non Islam. Namun mereka membayar

yang lain, bukan zakat, tapi pajak misalnya. Dulu jaman Rasulullah, dua-duanya juga ada, yaitu zakat untuk orang Islam, sementara yang pajak (kharaj) adalah kewajiban bagi orang bukan muslim yang mendapat perlindungan, atau pelayanan dari negara. Kemudian prasyarat kedua, negara harus membuat organisasinya. Komitmen itu harus dibuatkan wadahnya. Seperti kita sekarang punya perbankan syariah, maka lalu departemennya diakomodasi. Dengan adanya direktorat perbankan syariah di BI, di depkeu juga sudah ada unit-unitnya. Nah, ini 'kan untuk zakat belum. Jadi ini bisa bertahap. Kalau ada komitmen, maka nanti akan sampai ke situ.

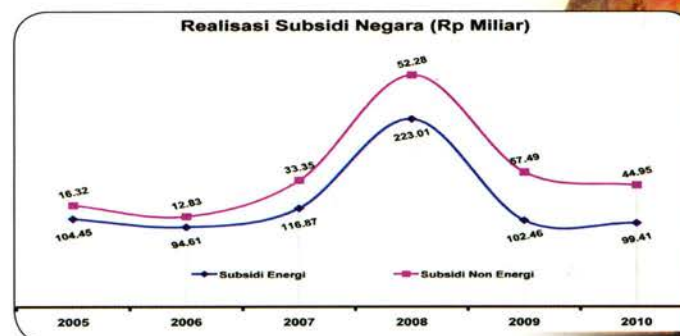
Faktor-faktor pendukung agar Baitulmaal bisa berjalan dengan baik?

Ya, pemahaman. Terutama sosialisasi akan kewajiban zakat tadi. Kewajiban zakat itu kan terkait dengan kemampuan, atau yang namanya nisab. Jadi orang yang pendapatannya rendah belum wajib. Jadi, bagaimana agar yang wajib zakat ini bertambah, maka

yaitu dengan meningkatkan kemakmuran. Meningkatkan kemakmuran itu bisa dari dua arah. Dari sisi moneter bisa, juga dari fiskal atau keuangan negara bisa. Kalau keuangan negara dengan menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan. Kemudian kalau dari sisi moneter, larangan riba seharusnya menjadikan saving itu investasi.

■ YS

"Rasulullah itu memakmurkan, dalam waktu boleh dikatakan kurang dari 10 tahun. Itu adalah dengan *balanced budget*".





Dr. Mustafa Edwin Nasution
Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)

“Dengan Baitulmaal, Pemerintah Menjadi Lebih Amanah”

P“Pengaturan keuangan yang ada di zaman modern ini, sebenarnya sudah dilakukan di masa pemerintahan awal-awal Islam” ujar Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) ini kepada *Sharing*.

Dalam kaitannya dengan keuangan negara, dalam sejarah peradaban Islam ada Baitulmaal. “Fungsi mengumpulkan pendapatan, fungsi menyalurkan dan fungsi distribusi. Sehingga perekonomian bisa bertumbuh dengan cepat, sekaligus mengatasi kepincangan penerimaan pendapatan”, tambah Dr Mustafa Edwin Nasution.

Nah, apa sebenarnya Baitulmaal itu, bisakah diterapkan di masa kini? Pakar ekonomi syariah yang doktor ekonominya adalah soal public finance di University of Colorado, Amerika Serikat (AS) ini menuturkan kepada *Sharing*.

✳ APA ITU BAITULMAAL?

Baitulmaal berasal dari kata ‘bait’ (rumah) dan ‘maal’ (harta). Jadi, arti harfiahnya ‘rumah harta’. Baitulmaal dari sisi ekonomi Islam, sudah ada ketentuan-ketentuan tentang penerimaan hartanya, lalu ketentuan-ketentuan bagaimana cara mengeluarkannya. Pembagiannya jelas. Jadi ada

fungsi penerima, dan ada fungsi penyaluran.

Ini menarik, karena kalau dari segi ilmu ekonomi konvensional, hal tersebut baru dipikirkan di era tahun 1930-an oleh Keynes. Yaitu fungsi pemerintah di dalam perekonomian. Bayangkan di ekonomi Islam sudah ada di tahun 600-an M, sementara Keynes di 1930-an. Suatu hal luar biasa, ekonomi Islam sudah mengatur fungsi pengumpulan harta dan pendistribusiannya kepada orang-orang yang layak sejak jaman Rasulullah!

Jadi pengaturan keuangan yang ada di zaman modern ini, sebenarnya sudah dilakukan di masa pemerintahan awal-awal Islam. Dilanjutkan khalifah-khalifah seterusnya. Di zaman Kulafaurasyidin ini adalah puncaknya model, di mana pengumpulan harta dan pendistribusiannya adalah semata-mata untuk kemashalatan umat.

✳ APA KELEBIHAN BAITULMAAL DIBANDING SISTEM APBN?

Ditinjau dari ilmu keuangan negara modern, kenapa perlu ada peranan pemerintah di dalam keuangan publik? Itu tak lain karena adanya kegagalan pasar, atau *marketing distortion*, gangguan pasar. Karena pasar tidak bergerak, perekonomian jadi macet. Kemudian, ada juga faktor

perlunya ketersediaan barang publik, faktor eksternalitas, serta adanya monopoli. Maka, pemerintah perlu campur tangan untuk mengatasi persoalan itu semua.

Saya ambil contoh, misalnya, zakat. Itu kita *nggak* bisa macam-macam, karena saat zakat kita terima, maka lalu kita salurkan untuk 8 asnaf (yang berhak menerima zakat).

Sementara kalau dalam APBN itu, masih ada perdebatan akan disalurkan kemana? Misalnya, perlukah BLT? Atau subsidi untuk siapa? Apa orang kaya atau miskin?

Dalam Alquran sudah jelas, *nggak* ada tawar menawar. Tinggal kita kaji, sesuaikan, dan jalankan. Karena, sudah lama kita tinggalkan itu.

Di Baitulmaal juga, tidak ada kepentingan-kepentingan partai politik. Di sini nilai positif Baitulmaal untuk kepentingan umat. Dengan konsep Baitulmaal, jadinya Pemerintah bisa menjalankan fungsinya dengan lebih amanah, karena di Baitulmaal itu sudah ada *guidance*-nya.

✳ MUNGKINKAH BAITULMAAL DITERAPKAN PADA KONDISI BANGSA KITA YANG SEKARANG?

Misalkan, sekarang ini permasalahan bangsa kita semakin kompleks, itu ‘kan sebetulnya produk dari tingkah

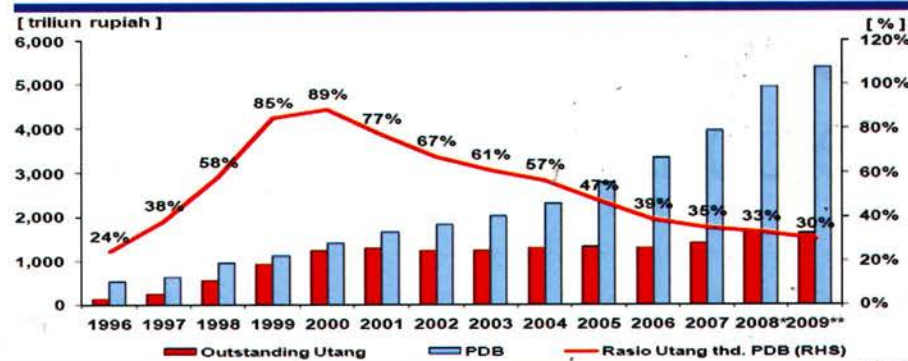
laku kita sendiri, yang tidak sesuai dengan Alquran dan hadits, atau yang materialistik. Itu problemnya.

Yang penting adalah penggiat-penggiat ekonomi Islam tetap berusaha menjalankan kaidah-kaidah agar sesuai dengan ekonomi Islam yang ada di Alquran dan hadits. Yang penting kita tetap berniat melakukan proses, kalau tidak bisa, 100%, 50%, atau 20%. Yang penting kita sadar, bahwa harus dilakukan suatu perubahan. Agar pengeluaran-pengeluaran negara yang dilakukan adalah terutama untuk menyejahterakan masyarakat, dan untuk mengerakkan ekonomi.

✳ BAGAIMANA TANGGAPAN ANDA TENTANG APBN KITA DI 2009? DAN YANG AKAN DATANG 2010?

APBN kita umumnya memang masih terkendala dengan relatif kecilnya sumber penerimaan, dibandingkan dengan rencana pengeluarannya yang banyak. Nah, dalam kaitan itu, ilmu ekonomi mengajarkan, kalau jumlah uang yang kita miliki lebih sedikit dibanding dengan rencana pengeluaran, maka yang harus dilakukan adalah mengambil langkah prioritas. Menentukan skala prioritas. Nah, prioritas yang ada saat ini ditentukan oleh wakil-wakil rakyat di DPR. Di sini, dalam arti, wakil

Perkembangan Rasio Utang Indonesia terhadap PDB 1996-2009



	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*	2009**
Pinjaman Luar Negeri	129	238	453	502	583	613	655	649	662	637	620	559	588	730
Surat Berharga Negara	-	-	100	502	652	661	655	649	662	637	620	559	588	730
Total	129	238	553	940	1,234	1,273	1,225	1,300	1,313	1,302	1,389	1,637	1,616	1,616

Tambahan utang 2004-2008 menghasilkan tambahan PDB yang jauh lebih besar, sehingga rasio utang menurun tajam dari 57% akhir 2004 dan diproyeksikan menjadi sekitar 32% akhir 2009 atau lebih baik dari sebelum krisis 1997 sekitar 38%.

Catatan:
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara per Agustus 2009
Angka PDB 2009 menggunakan asumsi PDB APBN-P 2009.
Rasio Pembayaran Kewajiban = Bunga Utang LN + Amortisasi Pinjaman LN

rakyat mewakili kepentingan rakyat. Namun, apakah selama ini mereka sudah berpihak kepada rakyat? Karena dalam memunculkan skala prioritas untuk pengeluaran itu, masih berbeda-beda, tergantung kepentingannya.

Namun demikian, APBN yang sudah ada kemarin itu, saya melihat sudah merupakan putusan yang optimal. Misalkan, masalah biaya pendidikan. Saya lihat

pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan anggaran pendidikan. Karena kalau kita tinjau dengan ekonomi Islam, itu sudah benar, untuk memprioritaskan pendidikan. Meskipun begitu, menurut saya, seharusnya pendidikan mendapat perhatian yang jauh lebih besar lagi oleh pemerintah. Harusnya subsidi-subsidi terutama menyangkut kesejahteraan orang kaya, misalnya berkaitan dengan BBM, itu perlu dikaji dengan

lebih teliti lagi, agar bisa tepat sasaran. Lalu pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya masih bisa dihemat, misalkan, untuk fasilitas pejabat, DPR, itu bisa lebih dihemat.

* SOAL UTANG, TAHUN INI PEMBAYARAN UTANG KITA CUKUP BESAR. BAGAIMANA MEREDUKSINYA?

Seyogyanya, kita mempunyai potensi yang sangat besar, untuk bisa mengurangi tingkat utang yang ada, kalau kita pandai mengatur kegiatan ekonomi kita, sehingga tak perlu bergantung pada mereka (negara pendonor). Kita bisa meningkatkan kapasitas sumber daya dalam negeri kita, tapi syaratnya satu, kita harus bisa mengatur pola konsumsi kita. Karena banyak konsumsi-konsumsi yang kita lakukan, sangat tidak mencerminkan tingkat pendapatan kita, terutama di kota-kota besar. Jadi kalau kita balik, kita tingkatkan zakat, karena dengan zakat tersebut, kita akan tahu makna dari zakat. Makna

■ YS

"Sementara kalau dalam APBN itu, masih ada perdebatan akan disalurkan kemana? Misalnya, perlukah BLT? Atau subsidi untuk siapa? Apa orang kaya atau miskin? Dalam Alquran sudah jelas, *nggak* ada tawar menawar. Tinggal kita kaji, sesuaikan, dan jalankan. Karena, sudah lama kita tinggalkan itu".

Outstanding Utang Pemerintah, 1997-2009



	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008*	2009**
Pinjaman	100%	82%	47%	47%	48%	47%	47%	47%	42%	42%	46%	46%	45%
Surat Berharga Negara	0%	18%	53%	53%	52%	53%	51%	51%	58%	58%	54%	54%	55%
Total Utang Pemerintah Pusat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kenalkan Pinjaman Luar Negeri, terutama karena volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap berbagai denominasi mata uang dalam Pinjaman Luar Negeri

Hendri Saparini:

"Untuk Perbaikan, Harus Ada Perubahan Politik Anggaran"

Tahun 2010, tinggal sepelemparan batu lagi. Pemerintah sudah sibuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2010. Banyak orang berharap dengan APBN 2010. Karena APBN ini akan menentukan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan ekonomi selama setahun.

Tak hanya pemerintah, semua masyarakat Indonesia memupuk harapan yang sama. Kalangan akademisi dan pengamat ekonomi pun memberikan berbagai komentarnya tentang nota keuangan yang disampaikan Presiden. Apakah APBN di 2010 akan lebih baik dibanding 2009 dan tahun-tahun sebelumnya? Atau tak ada satu pun perubahan yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki bangsa ini? Untuk mengetahui kemungkinan tersebut, wartawan *Sharing*, Reni Susanti mewawancarai Direktur Utama Econit, Hendri Saparini.

* BAGAIMANA PENDAPAT ANDA TENTANG APBN 2010?

Kalau kita bicara anggaran, maka kita berbicara tentang politik anggaran, apakah ada perubahan atau pergeseran politik anggaran. Saya melihat, baik di sisi penerimaan atau

pengeluaran pada APBN 2010 tak ada perubahan politik anggaran dibanding tahun sebelumnya. Misalnya, upaya untuk mengurangi kebijakan politik terhadap subsidi masih tetap sama. Sebut saja, subsidi pendidikan yang dikurangi dengan adanya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP). Sedangkan sumber penerimaan pun tidak banyak yang berubah.

* JIKA DIBANDINGKAN DENGAN APBN SEBELUMNYA, APAKAH APBN 2010 LEBIH BAIK ATAU LEBIH BURUK?

Di tahun 2008, kita memiliki sisa anggaran lebih (SAL), Rp 51 Triliun. Ternyata kalau kita bandingkan antara defisit dengan pinjaman, selisihnya sama, Rp 51 Triliun. Itu berarti SAL tadi terjadi karena tidak berhasil merealisasikan penurunan defisit, sedangkan pembiayaan berjalan terus sesuai dengan rencana. Ini pemborosan. Karena bagaimanapun, harus ada komitmen *fee*, bunga yang harus dibayar, dan akhirnya Rp 51 Triliun tidak terpakai. Kondisi ini kemungkinan akan terjadi lagi, jika tidak ada terobosan yang dilakukan pemerintah. Yang akan dilakukan di 2010 adalah pemotongan stimulus. Pemotongan dilakukan jika mereka tidak mampu mengalokasikan dana. Tapi yang harus diperhatikan, kita

tidak bisa pukul rata.

Kemudian jika ini dikaitkan dengan masyarakat. Sebenarnya, apakah masyarakat perlu dengan anggaran tadi. Karena selama ini tak pernah ada koreksi. Bahkan, di tahun 2009 Menkeu membolehkan pmda membeli surat utang negara lewat *private placement* tidak perlu lewat pasar sekunder. Ini memberi peluang kepada pmda untuk membeli SUN, dengan bunga tinggi, tenang, tidak ada risiko kesalahan penggunaan, dan BPK serta KPK pun tidak marah. Semua pihak akan senang. Yang tidak senang cuma rakyat, karena itu tidak dimanfaatkan. Jadi, ada tidak koreksi seperti itu? Terlebih saat ini ada peningkatan anggaran, dulu Rp 1.037 Triliun kini Rp 1.047 Triliun.

* LALU BAGAIMANA DENGAN KEBIJAKAN STIMULUS FISKAL?

Sama saja. Sampai sekarang tidak ada koreksi terhadap stimulus fiskal sebelumnya, baik secara desain maupun pembiayaan. Bagi saya, desain yang dibutuhkan Indonesia adalah sebagian besarnya untuk direct spending (anggaran untuk pengeluaran). Dengan direct spending yang cukup besar, akan ada gerakan ekonomi di berbagai sektor dan inilah yang akan menimbulkan ekonomi di dalam negeri. Tapi di Indonesia, 80 persennya

dialokasikan untuk pajak. Sedangkan dari berbagai *experience* negara maju seperti Amerika Serikat, efektivitasnya rendah. Di Amerika, masyarakatnya memiliki NPWP dan membayar pajak. Ketika terjadi krisis, mereka lakukan saving. Di Indonesia, berapa yang memiliki NPWP? Sebagian besar mereka membuat NPWP agar bebas biaya fiskal saat ke luar negeri. Artinya, stimulus fiskal itu penting. Tapi, desainnya seperti apa? Karena sampai sekarang pun belum menyentuh sasaran. Dari dana Rp 12 Triliun baru 31 persennya yang terserap hingga Oktober 2009. Kalaupun ada penumpukan anggaran di tiga bulan terakhir, maka harusnya kita melihat adanya jalan yang macet karena perbaikan jalan, gorong-gorong, ini tidak. Karena ternyata, realisasi itu hanya akuntansinya bukan realnya. Rupanya realisasi menurut BPK adalah pencatatan oleh bendahara bahwa uang sudah ditransfer, bukan gerakan di masyarakat.

Dalam kondisi seperti ini, kita memaksakan diri sementara sumber penerimaan terbatas, akibatnya pembiayaan mahal. Indonesia terpaksa mengeluarkan obligasi dan surat utang negara. Belum lagi bunga obligasi yang besar, sekitar 10%, sedangkan negara tetangga hanya 3-5%. Jika kita memaksakan diri, akan menjadi beban untuk APBN kita.

❖ **APBN 2010, DIPERKIRAKAN MENGALAMI DEFISIT 1,6%. BAGAIMANA PENGARUHNYA PADA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN?**

Harus jelas dulu, defisit karena apa? Peningkatan belanja harus meningkat, tapi untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. Misalnya infrastruktur seperti bendungan dan tanggul yang rusak. Jika dilakukan secara masif, SAL 2008 sebesar Rp 51 Triliun, akan termanfaatkan dengan baik. Dana Rp 51 Triliun, tak hanya digunakan untuk semen, batu, dan sebagainya. Namun juga menjadi tahu, tempe, transportasi, baju, dan sebagainya.

Program-program seperti BLT, harus dilihat tujuannya. Apakah ini kebijakan transisi menuju Indonesia yang memiliki jaring pengaman sosial atau "apapun diobati dengan BLT". Kita naik BBM, ada BLT. Ada krisis dan pemilu juga BLT. Alokasi anggaran untuk BLT tidak jelas. Dari tahun pertama diluncurkan, penerima BLT tetap itu-itu juga, tak ada perubahan. Saya lebih memilih bantuan hanya boleh diberikan kepada mereka yang sudah tidak produktif secara ekonomi seperti cacat, lanjut usia, atau yang tidak produktif secara ekonomi. Di luar itu, tetap melakukan berbagai cara seperti proyek untuk UKM, proyek irigasi, nah nanti dari berbagai sektor akan ada pembelanjaan. Pembelanjaan inilah yang akan menyelamatkan ekonomi dalam negeri.

❖ **DALAM NOTA KEUANGANNYA, PRESIDEN MAU EKSPANSI PASAR LEBIH BANYAK DI 2010. BEBERAPA PENGAMAT MENILAI ITU**

BERTENTANGAN DENGAN 3P YANG DIGALAKKAN PRESIDEN. BAGAIMANA MENURUT ANDA?

Akan lanjutkan liberalisasi di sektor perdagangan ritel. Sekarang ini, ritel domestik turun dari 74% menjadi 63%. Indonesia dikategorikan, paling liberal dalam hal ritel. Lalu diprediksi *share* hanya 25%. pertanyaannya, jika Korea hanya 3% untuk ritel asing, dan Jepang hanya 1%, tidak bolehkah kita mengoreksi dengan membatasi persoalan tadi?

Mengenai konsep 3P, apakah dengan *pro pure*, itu berarti pro terhadap rakyat miskin sehingga rakyat miskin harus ada. Lalu *pro job, job* seperti apa? Apakah untuk informal sektor. Padahal kita tahu definisi orang bekerja di Indonesia sangat *loose*, satu orang per jam selama satu minggu terakhir.

❖ **DARI SEMUA PENJELASAN YANG ANDA BERIKAN, APAKAH APBN 2010 SUDAH PRO RAKYAT?**

Selama ini, kata pro rakyat seolah pro terhadap ekonomi rakyat yang kecil. Padahal ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berorientasi terhadap kepentingan masyarakat. Jadi, dalam mengelola SDA, manajemen pendidikan dan lainnya harus berorientasi terhadap rakyat, bukan hanya mengatur orang-orang kecil. Sehingga tidak perlu ada kalimat, "ini loh alokasi untuk pedagang kecil sudah meningkat", tapi kebijakan tidak ada yang diubah. Kita sudah salah kaprah antara ekonomi kelompok bawah dengan kerakyatan. Ekonomi kerakyatan harus sesuai dengan pasal 33 ayat 2 UUD 1945, seluruh rakyat

harus ikut berproduksi sebesar-besarnya dan menikmati sebesar-besarnya. Makanya berikan kekuatan dari sisi pendidikan. Laksanakan pasal 31. Beri dia energi, gunakan kekayaan alam semaksimal untuk mendukung mereka. Bukan berarti punya sumur minyak tapi tidak bisa beli BBM.

❖ **LALU, APA YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN?**

Dalam kondisi seperti ini kenapa tidak memilih strategi yang lain, seperti realokasi anggaran. Harus ada politik anggaran yang tegas dari pemerintah maupun dari DPR. Misalnya: memotong sektor tidak penting seperti tidak boleh membeli mobil baru, membangun gedung, dan harus ada *re sharing* antara pimpro dan pelaksana yang ditandatangani menteri, sehingga jika terjadi sesuatu menteri akan bertanggungjawab. Tidak seperti sekarang dengan penyisiran pukul rata, misalnya 30%. Akibatnya setelah membeli bibit, Deptan tak bisa memonitor karena terjadi pukul rata tadi. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya termasuk dengan ekonomi Islam.

■ Ren





M. Arie Mooduto:

"Pesan Abadi" Baitulmaal"

Jika ada yang meragukan penerapan Baitulmaal di jaman sekarang, wajar. Salah satu pelopor ekonomi syariah di Indonesia ini menilai "Tentu saja, "zaman" di mana Baitulmaal dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin sudah sangat berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Kompleksitas dan permasalahan sosial, ekonomi, politik dan kemasyarakatan pun sudah sangat jauh berbeda. Namun esensi dan fungsi Baitulmaal, tujuan dan norma-norma serta sistem nilai dan etika yang terkandung dan dipraktikkan pada lembaga tersebut, tentu saja mengandung 'pesan yang abadi'".

Apa pesan abadi tersebut? Berikut wawancara *Sharing* dengan Dikretur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

* ADAKAH NILAI-NILAI BAITULMAAL YANG BISA KITA AMBIL SEKARANG DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK?

Tentu ada! Pertama: adanya kemauan politik, komitmen dan keberanian yang jelas dan konsekuen dari semua pihak, seperti ulama, umaro, agniya, serta umat Islam, masyarakat, bangsa dan negara secara komprehensif, integral dan konsisten, untuk mendukung

upaya mewujudkan tujuan serta sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara. Dilakukan melalui lembaga keuangan negara sebagai amanah dari Allah SWT, rakyat, kaum muslimin, dan bangsa secara keseluruhan.

Berikutnya adalah, mencerminkan adanya kepemimpinan yang kuat dan berwibawa, untuk mendukung upaya mewujudkan tujuan serta sasaran negara sehingga ditaati oleh seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, penegakkan keadilan, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, dan seterusnya, dengan *rule of the game and law enforcement* yang tegas.

* APA KUNCI SUKSES BAITULMAAL?

Kesuksesan pelaksanaan praktik Baitulmaal di zaman kejayaan peradaban Islam dalam kepemimpinan Rasulullah saw. dan Khulafaurrasyidin, kuncinya terletak pada penerapan syariah secara murni dan konsekuen, semata-mata mencari ridho Allah swt.

Tentu saja, "zaman" di mana Baitulmaal dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin sudah sangat berbeda dengan zaman kita sekarang ini. Kompleksitas dan permasalahan sosial, ekonomi, politik dan kemasyarakatan pun sudah sangat jauh berbeda. Namun

esensi dan fungsi Baitulmaal, tujuan dan norma-norma serta sistem nilai dan etika yang terkandung dan dipraktikkan pada lembaga tersebut, tentu saja mengandung "pesan yang abadi". "Pesan abadi" tersebut adalah "syariah Islam". Dengan kata lain, keberadaan, fungsi, maksud/ tujuan dan peran serta tata-cara operasional pengelolaannya, hendaklah dan harus sesuai syariah! Sehingga maksud dan tujuan dari Baitulmaal tersebut bukan hanya insya Allah dapat tercapai dengan baik, melainkan juga berkah dan Allah AWT.

* APAKAH KONSEP BAITULMAAL TERSEBUT BISA KITA AKOMODASI SAAT INI?

Sistem nilai dan etika, prinsip-prinsip, paradigma atau pola pikir dan filosofi serta sikap mental berdasarkan syariah yang mendasari awal keberadaan dan pengelolaan Baitulmaal, patut dicontoh dalam penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

Kondisi penyelenggaraan perencanaan keuangan negara kita (Indonesia) dalam bentuk RAPBN, dan kemudian menjadi APBN, selalu menjadi dilema, karena kompleksitas permasalahannya, antara lain; tarik ulur berbagai kepentingan politik, serta defisit utang luar negeri yang sangat besar.

Dengan mempelajari nilai-nilai Baitulmaal, dilema

APBN tersebut, Insya Allah dapat dipecahkan. Mengapa? Karena jika seluruh proses penyusunan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban APBN dilakukan dengan cara-cara yang jujur, adil, secara konsekuen, istiqomah "sesuai syariah", dengan sendirinya insya Allah akan membuahkan hasil sukses yang Allah SWT..

* BAGAIMANA DENGAN MASALAH UTANG LUAR NEGERI?

Karena "utang" dengan kandungan "bunga atau riba" di dalamnya, jelas tidak dibenarkan di dalam Islam sehingga komponen utang luar negeri jelas tidak akan dijumpai dalam APBN yang berbasis konsep Baitulmaal, apalagi sampai menjadi masalah. Sebab berdasarkan syariah, bunga atau riba diharamkan di dalam Islam.

Sedangkan bunga atau riba, jelas diharamkan dalam Islam. Baik berdasarkan firman Allah SWT maupun sabda Rasulullah..

Oleh karena itu, perlu ada *political will, political commitment, and political courage* untuk menyelesaikannya, *lillahirabbil'alamien!* Adapun teknis penyelesaiannya, banyak jalan menuju ke Roma.

■ YS

"Kondisi penyelenggaraan perencanaan keuangan negara kita (Indonesia) dalam bentuk RAPBN, dan kemudian menjadi APBN, selalu menjadi dilema, karena kompleksitas permasalahannya, antara lain; tarik ulur berbagai kepentingan politik, serta defisit utang luar negeri yang sangat besar".

Seluruh
Iuran Peserta
DIKEMBALIKAN !

Perlindungan Terbaik Bagi Anda dan Pasangan Tercinta

call BSM 021-5299 7755
www.syariahmandiri.co.id

Lebih Adil dan Menenteramkan

Manfaat:

- Santunan rawat inap Rumah Sakit sampai dengan 90 hari/tahun.
- Santunan rawat ICU Rumah Sakit sampai dengan 45 hari/tahun.
- Santunan duka sampai dengan Rp200 juta.
- Iuran peserta dikembalikan 100% pada akhir kontrak.
- *Surplus underwriting* akan diberikan pada akhir tahun ke-10 (bila ada).
- Bebas iuran peserta apabila menderita cacat tetap total, tanpa menghilangkan hak peserta mendapatkan santunan rawat inap dan santunan duka.



Oleh:

Khairunnisa Musari

(Mahasiswi S3 Prodi Ilmu Ekonomi Islam Unair, Surabaya)

Sukuk dapat menjadi instrumen keuangan publik yang berkontribusi dalam menjaga fiscal sustainability perekonomian Indonesia.

Dalam Simposium Nasional IV Ekonomi Islam di Yogyakarta pada 8-9 Oktober lalu, Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan (Depkeu) mengemukakan setidaknya lima alasan mengapa pemerintah Indonesia

Ketiga, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung pengembangannya. Keempat, industri keuangan syariah berpotensi menjadi penyelamat jika terjadi ketidakpastian. Kelima, pemerintah menyadari keberadaannya yang penting sebagai regulator sekaligus supervisor dalam menciptakan efisiensi, transparansi, dan keadilan.

Salah satu instrumen dalam industri keuangan syariah yang diadopsi pemerintah Indonesia

Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, pemerintah diberi landasan hukum kuat untuk melakukan transaksi pengadaan pembiayaan dan pengelolaan portofolio berbasis syariah. Di bulan Oktober 2009 lalu, pemerintah untuk kesekian kalinya menerbitkan sukuk untuk pasar domestik. Jika biasanya mekanisme yang digunakan adalah bookbuilding, kali ini mekanisme yang digunakan adalah sistem lelang. Lelang perdana yang menetapkan target indikatif sebesar Rp 1,5

menjadi acuan bahwa sukuk ini telah memenuhi prinsip syariah.

* PETA KEBIJAKAN FISKAL

Sukuk memang diakui sebagai instrumen keuangan publik yang disarankan dalam ekonomi Islam. Sukuk berperan besar dalam menyeimbangkan kekayaan yang terdapat dalam neraca keuangan pemerintah, otoritas moneter, perusahaan, bank, dan lembaga keuangan

Sukuk Untuk Fiscal Sustainability

perlu melakukan intervensi dalam mengembangkan pasar keuangan syariah. Pertama, meski kontribusinya masih relatif sangat kecil, namun industri keuangan syariah memberi dampak positif yang nyata bagi perekonomian Indonesia. Kedua, industri keuangan syariah memiliki ketahanan yang cukup tinggi terhadap goncangan krisis keuangan dunia dan domestik.

adalah sukuk. Dengan maksud untuk mendiversifikasi sumber-sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memperluas basis investor, menciptakan benchmark, mengembangkan pasar keuangan syariah, dan menciptakan alternatif instrumen keuangan investasi, pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk negara. Melalui Undang-Undang (UU)

triliun pada tahap awal akan melelang seri IFR0003 dan IFR0004 dengan tenor 6 tahun dan 11 tahun. Dengan agen lelang Bank Indonesia (BI), sukuk negara akan dilelang secara terbuka dengan metode multiple price. Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor B-273/DSN-MUI/VIII/2009 per tanggal 10 Agustus 2009

serta berbagai bentuk entitas lain yang memobilisasi dana masyarakat.

Pada kebanyakan negara yang mengadopsi sukuk, instrumen ini lazimnya diposisikan sebagai alat kebijakan fiskal untuk membiayai pembangunan. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang terkait dengan aspek pengelolaan



Penerbitan sukuk perdana Republik Indonesia, IFR 001 dan IFR 002, 26 Agustus 2008. Sukses mendulang dana sebesar Rp7,1 Triliun atau *oversubscribed* 1,6 kali dari target indikatif senilai Rp5 triliun. Sukuk ini digunakan untuk pembiayaan defisit APBN 2009 dan pembiayaan proyek negara.

anggaran pemerintah. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro dalam mengendalikan stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal digunakan untuk mengatur permintaan maupun penawaran agregat melalui komponen dan besaran APBN untuk kepentingan alokasi, distribusi, dan stabilisasi untuk menggerakkan sektor riil, dengan memperhitungkan besaran defisit dan kemampuan pembiayaan.

Dalam peta kebijakan fiskal di Indonesia, penerbitan sukuk termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pengelolaan utang selain terkait dengan cara mengisi kesenjangan pembiayaan, dalam jangka panjang juga berperan dalam pengelolaan portofolio yang mendukung fiskal sustainability.

Menurut konsensus opini di kalangan pakar hukum Islam, apabila terdapat kesenjangan antara pemasukan dari sumber daya dengan pengeluaran pemerintah, syariah mengizinkan negara untuk berutang asal tanpa melibatkan bunga dan karena terpaksa

(Iqbal & Mirakhor, 2008). Chapra, dalam Sophiana (Ed.) (1997), juga mengemukakan bahwa Islam memperkenankan untuk melakukan pinjaman. Namun, pinjaman hanya dilakukan untuk keperluan yang produktif dan membawa maslahat bagi masyarakat serta meniadakan riba. Meski demikian, Chapra memberi catatan bahwa anggaran belanja yang dibiayai dari modal pinjaman cenderung menyebabkan inflasi jika tidak disertai dengan naiknya pasokan barang dan jasa. Tentu saja ini akan mengakibatkan stabilitas moneter terganggu. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, pinjaman dapat dilakukan jika ada jaminan yang disertai dengan kenaikan output. Pinjaman dengan sedikit kenaikan produksi dapat dilakukan selama tingkat inflasinya kecil daripada ketimpangan yang ditimbulkan oleh kepentingan ekonomi dan nonekonomi. Hal ini selaras dengan prinsip bahwa bahaya yang lebih kecil boleh dikorbankan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

✿ FISCAL SUSTAINABILITY

Sukuk memiliki potensi

besar dalam meningkatkan kapasitas fiskal di Indonesia yang sedang mengalami krisis pembiayaan. Krisis pembiayaan menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk melakukan pola kebijakan fiskal budget defisit. Kebijakan ini harus diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Secara teoretis, ada dua kegiatan yang biasa dianut pemerintah dalam menutup kebutuhan budget defisit. Pertama, utang. Kedua, mencetak uang. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun demikian, keduanya dapat dikategorikan sebagai money creation yang menambah jumlah uang beredar (base-money) dalam perekonomian. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan permasalahan peningkatan tingkat harga barang/jasa yang berujung pada inflasi. Pada akhirnya, inflasi yang merupakan penyakit ekonomi akan menimbulkan beban pengeluaran pemerintah. Berbeda dengan dua kegiatan tersebut, esensi dari penerbitan sukuk dalam kebijakan fiskal adalah keberadaannya yang meninggalkan money creation. Sukuk bekerja dengan memanfaatkan dana-dana idle tanpa harus menambah base-money. Sukuk mengakumulasi modal publik dengan risiko yang minimal. Hal ini tidak lepas dari konsep syariah yang melarang transaksi perdagangan uang tanpa adanya kewajiban yang ditunaikan. Dalam pengelolaan keuangan publik, sukuk memiliki implikasi terhadap fiskal sustainability. Riset Halid (2008) menunjukkan, perubahan stok utang pemerintah relatif konstan dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan *uncovered interest*

parity yang menimbulkan perbedaan antara return sukuk domestik dan sukuk dari negara lain dalam jangka panjang akan sama dengan nol. Kondisi inilah yang akan menetralkan outstanding debt negara penerbit sukuk sebagai akibat adanya perbedaan nilai tukar. Oleh karena itu, penerbitan sukuk negara akan berdampak positif terhadap fiskal sustainability sebagai akibat tidak melonjaknya outstanding debt yang mengalami perubahan nilai tukar. Selain itu, dengan adanya underlying asset dalam sukuk, maka aktivitas ekonomi yang dibiayai dengan sukuk negara juga terbebas dari aspek spekulatif sehingga akan mencerminkan kegiatan ekonomi riil. Implikasi dari kondisi ini akan meningkatkan surplus primer dalam anggaran pemerintah sebagai syarat terciptanya fiskal sustainability.

Fiskal sustainability tercermin dari kemampuan jangka panjang pemerintah dalam membiayai kebutuhan belanja dan membayar utang. Tingginya outstanding debt Indonesia, khususnya yang bersumber dari utang LN, merupakan potensi besar dilakukannya debt switching dalam bentuk penjualan sukuk negara. Sebagai salah satu negara dengan tingkat kekuatan fiskal yang rendah, Indonesia sangat membutuhkan sukuk untuk pembiayaan budget defisit. Dengan pendekatan matematis, Sriyana (2009) menyimpulkan bahwa perekonomian yang menerbitkan sukuk untuk pembiayaan budget defisit maupun proyek-proyek pemerintah akan memiliki potensi peningkatan fiskal sustainability dalam jangka panjang. Wallahu'alam bishowab.

"Bahwa perekonomian yang menerbitkan sukuk untuk pembiayaan budget defisit maupun proyek-proyek pemerintah akan memiliki potensi peningkatan fiskal sustainability dalam jangka panjang"

Agustianto MA:

"Penggunaan Dana Sukuk Harus Syariah"



Salah satu yang membedakan investasi syariah dengan konvensional adalah kejelasan penggunaan dananya, untuk apa dan berapa banyak. Lebih lagi, investasi semaksimal mungkin diarahkan ke sektor riil.

Dalam Undang-undang Surat Berharga Syariah Negara (UU SBSN), disebutkan sukuk adalah surat utang negara yang dananya digunakan untuk membiayai defisit APBN dan pembiayaan proyek. Hingga lima kali menerbitkan sukuk, pemerintah Indonesia mendulang dana triliunan rupiah.

Tapi, banyak dikeluhkan penggunaannya, terutama dari kalangan penggiat ekonomi syariah. Penggunaan sukuk seperti di UU tersebut dinilai masih kurang pas dengan tujuan ekonomi syariah, yaitu menciptakan kemaslahatan.

"Pemerintah harus menjelaskan, dana sukuk itu kemana saja sasarannya. Karena sukuk itu diperoleh dari dana investor dan masyarakat, maka harus digunakan untuk sektor-sektor penting yang produktif. Misalnya untuk infrastruktur, bukan untuk pengeluaran yang tidak jelas", ujar Agustianto MA, pakar ekonomi syariah dari Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta kepada *Sharing*.

Kepada kontributor *Sharing*, Sri Mustokoweni, pakar fikih ekonomi ini memaparkan pandangannya tentang sukuk, termasuk mengomentari wacana

sukuk sebagai instrumen fiskal dan moneter.

*** SUKUK SAAT INI SEBATAS DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI DEFISIT ANGGARAN. ADA WACANA SUKUK MENJADI INSTRUMEN FISKAL DAN MONETER. KOMENTAR ANDA?**

Sebenarnya bisa. Meskipun APBN kita belum bisa dikatakan baik, tapi masih ada peluang untuk itu. Kalau pemerintah menerbitkan sukuk, maka yang harus diperhatikan adalah bukan aspek darimana sukuk didapatkan, apakah itu dari lelang atau bukan, tapi pemanfaatan dana sukuk.

"Kalau sukuk jadi pengganti SBI, itu bertentangan. Jangan sampai sukuk menjadi semacam SBI, apalagi BLBI, tidak benar itu. Dana yang berasal dari sukuk itu harus jelas pos-posnya, lalu pengeluarannya digunakan untuk apa saja".

Pemerintah harus menjelaskan, dana sukuk itu kemana saja sasarannya.

Karena sukuk itu diperoleh dari dana investor dan masyarakat, maka harus digunakan untuk sektor-sektor penting yang produktif. Misalnya untuk infrastruktur, bukan untuk pengeluaran yang tidak jelas, apalagi untuk hura-hura dan foya-foya. Seperti kasus

di beberapa daerah, yang kebingungan menyalurkan dana. Padahal, dananya sebenarnya melimpah, tapi karena tidak tepat dalam pemanfaatannya sehingga salah sasaran. Itu harus menjadi perhatian pemerintah.

Sasaran sukuk itu harus betul-betul untuk kepentingan pembangunan ekonomi rakyat, dalam bentuk infrastruktur. Misalnya untuk sarana telekomunikasi, pembangunan rel kereta api yang menghubungkan satu kota dengan kota lain, pembangunan bandara, pembangunan jalan tol. Atau untuk sektor-sektor produktif dan semi produktif sehingga ekonomi rakyat bisa diberdayakan. Karena sukuk itu adalah dana yang syariah, jadi penempatannya juga harus yang syariah.

*** KALAU SUKUK DIGUNAKAN SEBAGAI PENGGANTI SBI, MENURUT ANDA APAKAH BISA?**

Kalau sukuk jadi pengganti SBI, itu bertentangan. Jangan sampai sukuk menjadi semacam SBI, apalagi BLBI, tidak benar itu. Dana yang berasal dari sukuk itu harus jelas pos-posnya, lalu pengeluarannya digunakan untuk apa saja. Kalau tidak jelas, khawatirnya hanya digunakan oleh pejabat-pejabat saja. Kalau sampai seperti itu, apa terus kita meng-iya-kan saja.

*** TAPI KALAU DANA SUDAH MASUK KE ANGGARAN, KAN SUDAH BERCAMPUR DENGAN SUMBER DANA YANG LAIN, DAN TIDAK BISA LAGI DIBEDAKAN APAKAH**

ITU DARI SUKUK ATAU DARI SURAT UTANG YANG LAIN?

Itu yang harus diperbaiki. Dari dana-dana yang masuk, harus dibedakan, yang dari sukuk berapa, dari surat utang yang lain berapa, dari pajak berapa. Lalu harus dijelaskan lagi, pos-pos pengeluarannya untuk apa saja, misal dana sukuk digunakan untuk apa saja, begitu juga penggunaan dana-dana yang lain.

*** MENURUT ANDA, BAGAIMANA CARA MENGOPTIMALKAN SUKUK DI MASA MENDATANG?**

Kalau untuk mengoptimalkan pemasukan sukuk, perlu sosialisasi ke masyarakat luas sampai ke investor. Sukuk itu kan ada SBSN dan sukuk ritel yang dijual ke masyarakat. Kalau untuk sukuk ritel, sosialisasinya ke masyarakat luas. Kalau sasarannya ke investor, ya ke investor. Cara sosialisasinya juga beda.

Yang jadi perhatian adalah mengenai yield. Kalau yield rendah, ada yang menganggap produk syariah itu untuk ibadah saja. Kalau ditinggikan, maka akan menjadi beban negara karena mahal. Tapi kalau dibuat sama, akan sama dengan yang konvensional. Jadi, baik yield rendah atau tinggi, harus dipahami masyarakat. Selama ini memang mahal. Karena mahal, maka masyarakat memburunya. Tapi bagaimanapun, lebih baik kita berutang pada orang-orang kita sendiri daripada harus berutang ke luar negeri.

Nilai-nilai Keuangan Publik Islam

Menelusuri beberapa pustaka tentang Keuangan Publik Islam, Sharing mencoba menyarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.



❖ DIKELOLA NEGARA

Keuangan publik terpusat di tangan pemimpin sudah diatur Islam sejak usai perang Badar pada 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadhan 2 Hijriah di Kota Badar, 80 Mil baratdaya Kota Madinah.

Pasukan Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW (Rasulullah) yang hanya berjumlah 313 orang berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang bukan Muslim dan berjumlah 1000 orang. Kemenangan ini mengejutkan kaum Muslim sendiri akan kemampuannya yang demikian hebat. Ketakjuban pun berlanjut kegagahan soal harta rampasan perang.

Dalam kitab klasik Al Amwal ('harta', ditulis pada 221 H) karangan Abu Ubaid Al Qasim bin Salam dikisahkan kegagahan itu: "Dari Sa'id bin Abi Waqqash, ia berkata: Ketika Perang Badar, aku berhasil membunuh Sa'id ibnul-Ash dan

aku merampas pedangnya... Kemudian aku membawanya ke hadapan Rasulullah... Lalu Rasulullah bersabda kepadaku, 'Bawalah pedang itu dan letakkan di dalam tumpukan harta ghanimah'. Setelah itu aku pun pulang dan di dalam diriku masih terdapat perasaan yang tidak ada seorang mengetahuinya selain Allah... Tidak lama setelah aku melangkah dan meninggalkan Rasulullah, maka turunlah surat al-Anfaal (ayat 1). Rasulullah bersabda, 'Pergilah dan ambillah pedangmu itu'".

Kegagahan melebar hingga perselisihan di antara kaum Muslimin tentang harta rampasan perang. Ubadah bin Shamit, sahabat Rasulullah dari suku Anshar meriwayatkan latar belakang turunnya surat al-Anfaal ayat 1:

"Kami pergi bersama-sama Rasulullah dan saya turut menghadiri Badar. Orang-orang yang bertugas mengumpulkan harta rampasan perang berkata: "Kamilah yang merampas dan mengumpulkannya, maka

tak ada seorang pun yang mendapat bagian selain kami." Sedang orang-orang yang maju mengejar musuh berkata: "Kamu tidak lebih berhak untuk mendapatkannya daripada kami. Kamilah yang merampas harta rampasan perang itu dan kamilah yang menyerang mereka." Sedang Orang-orang yang melindungi Rasulullah, berkata: "Kamu tiadalah lebih berhak untuk mendapatkannya daripada kami, Kamilah yang melindungi Rasulullah, sedang kami khawatir kalau-kalau musuh menyerang beliau, kami sibuk melindungi Beliau." Maka turunlah ayat ini. Setelah itu Rasulullah SAW membagi harta rampasan itu di antara kelompok kaum Muslimin." (H.R Ahmad dan Al Bukhari dari Ubadah bin Samit).

Jawaban Allah SWT atas perselisihan ini adalah surat al-Anfaal ayat 1. "Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu

bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”.

Sampai ayat 40, tidak ada penjelasan apakah kaum Muslim berhak atas harta tersebut dan berapa banyak. Baru pada ayat 41 disebutkan: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan Ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Meski sudah dikatakan harta itu untuk siapa, kehalalannya belum jelas hingga turun ayat 67-69 keesokan hari setelah Perang Badar. Sementara, Rasulullah telah membagikan harta itu.

Abu Ubaid menuliskan, “Dari Umar, kemudian aku datang pada keesokan harinya. Tiba-tiba Rasulullah dan Abu Bakar sedang menangis. Aku

bertanya, ‘Apa sebabnya kalian berdua menangis?’ Rasulullah menjawab, ‘Aku telah diperlihatkan siksa kalian lebih dekat dari jarak pohon ini (Yaitu sebuah pohon yang berdekatan dengan Rasulullah)’. Kemudian Allah menurunkan ayat ini:

“Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (al-Anfal: 67-69)

Imperatif “Makanlah...” memberikan kehalalan pada harta ini untuk diambil kaum Muslim pemenang perang. Tampak sekali nilai kehati-

hatian terhadap hak dan kehalalan harta, karena harta dalam Islam adalah amanah.

✳ SEBAGAI AMANAH

Konsep keuangan publik dalam Islam adalah amanah yang harus diemban pemimpin. Abu Ubaid menuliskan, “Umar bin Al Khathab mengatakan, ‘Sesungguhnya aku, demi Allah bukanlah seorang raja lalu aku memperbudak kamu, tapi aku hanyalah hamba Allah yang Dia berikan amanah kepadaku. Jika aku mengembalikannya kepada kamu dan aku mengikuti kamu hingga kamu kenyang di rumah-rumah kamu, maka aku bahagia; dan jika aku mengembannya dan merepotkan kamu ke rumahku, maka aku celaka, karena aku hanya senang sebentar dan gelisah dalam waktu lama”.

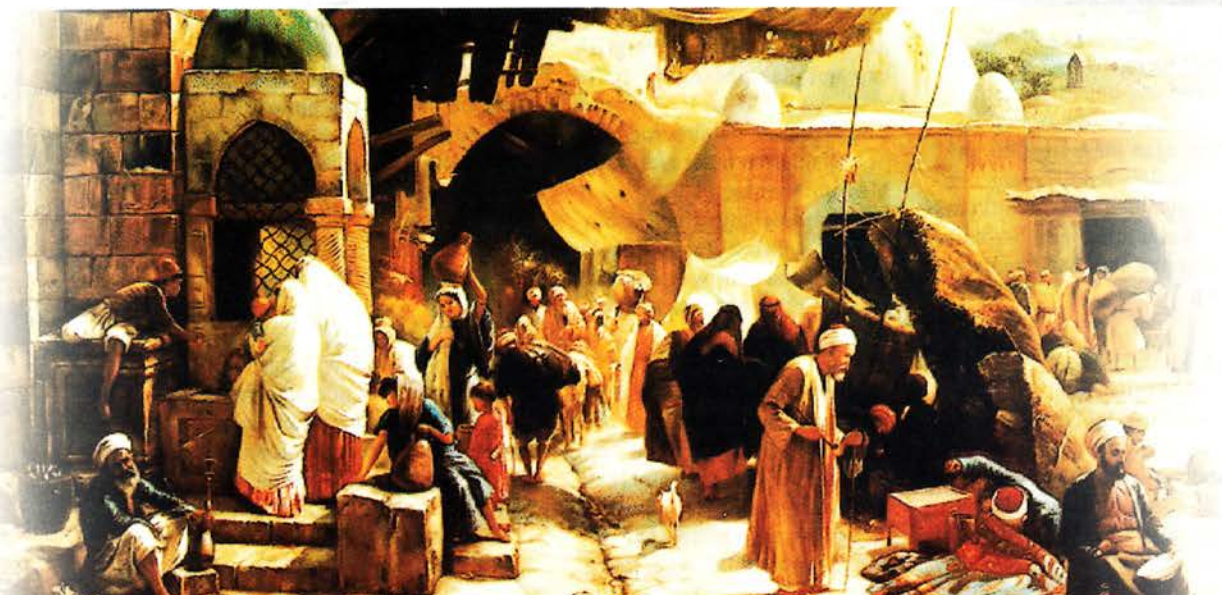
Khalifah Umar bin Al Khathab, memimpin kaum Muslim selama 10 tahun enam bulan (634-644 H). Sejarah peradaban Islam mencatat Umar sebagai salah satu khalifah unggulan yang layak dijadikan contoh

kenegarawanan dalam Islam.

Di masa Umar ini juga, Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab (Khalifa: 2006) menilainya sebagai masa pelaksanaan sistem ekonomi dan manajemen Islam dalam format lebih tertata di era awal peradaban Islam ini. Di masa Umar, misalnya lembaga Baitulmaal sudah memiliki organisasi dan bangunannya sendiri.

Satu contoh amanah adalah apa yang diriwayatkan Athiyyah bin Qais, sebagaimana dikutip Abu Ubaid dalam *Al Amwaal*.

“Jaminan kemaslahatan dari negara bahkan sudah diberikan sejak lahirnya anak-anak Muslim. Di masa Khalifah Umar bin al-Khathab, subsidi dari Baitulmaal diberikan kepada tiap bayi Muslim yang dilahirkan sebanyak 10 dirham dan jika sudah dewasa mendapat gaji”.



“Pada suatu hari, Muawiyah (Khalifah Umar bin Abdul Azis yang memerintah pada 717-720 H-red) memberikan khotbah. ‘Sebenarnya di dalam Baitulmaal kalian masih terdapat kelebihan dari sisa gaji kalian. Aku telah membagikannya di antara kalian mengenai hal demikian itu. Jika masih ada sisa dan kelebihan di dalam Baitulmaal, maka kami akan membagikannya di antara kalian. Tetapi jika tidak ada sisa dan lebihnya, maka janganlah kalian mencela dan mencaci kami dalam persoalan ini. Sebab perkara itu bukanlah harta kami, akan tetapi merupakan sebuah harta Fa’i Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian”.

Di rangkaian hadits selanjutnya dari Athiyyah bin Qais dikisahkan “reputnya” khalifah Umar bin Abdul Azis membagikan kelebihan harta Baitulmaal kepada umat Muslim karena semua sudah berkecukupan. Umar bin Abdul Azis memerintahkan ‘Menteri Zakatnya’, Abdul Hamid bin Abdurrahman yang tengah berada di Irak via surat untuk membagikan harta berlebih tersebut. Abdul Hamid membalas surat itu dengan jawaban: “Sesungguhnya aku telah membagikan gaji dan bagian harta itu kepada umat manusia. Tetapi, di dalam Baitulmaal masih terdapat sisa”.

Lalu Umar mengirim surat kembali menyuruh memberikan harta itu kepada umat yang berutang bukan karena kebodohnya dan pemborosannya. Abdul Hamid membalas lagi dengan jawaban sama seperti di atas.

Umar mengirim surat lagi menyuruh dibagikan kepada umat yang bujangan, ingin menikah tapi tidak memiliki dananya. Abdul Hamid menjawab sama. Akhirnya Umar memerintahkan Abdul Hamid untuk meringankan pembayaran Jizyah (pajak untuk para Ahli Kitab-lihat bagian: “Sumber Pemasukan Baitulmaal”) yang memang benar-benar tidak mampu membayar sesuai tarifnya hingga mereka bisa memaksimalkan produksinya. Karena, “Kami kurang membutuhkan mereka selama satu tahun ke depan ini”.

Dikisahkan dalam *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, sejak jaman Khalifah Umar bin Al Khattab, dipisahkan antara harta Baitulmaal dan harta pribadi Khalifah. Di negeri Non Muslim, misal

di Romawi, hal ini tidak terjadi, harta negara adalah milik kaisar.

❖ KEMASLAHATAN

Seluruh harta yang dikumpulkan Umat Muslim disetorkan sebagiannya kepada Baitulmaal lalu didistribusikan sesuai kebutuhan dan peruntukannya sebagaimana diatur Alquran dan Hadits. Sikap Abu Ubaid dalam *al-Amwaal* jelas soal ini, demi kemaslahatan umat. Dia

“Umar bin Al Khathab mengatakan, ‘Sesungguhnya aku, demi Allah bukanlah seorang raja lalu aku memperbudak kamu, tapi aku hanyalah hamba Allah yang Dia berikan amanah kepadaku. Jika aku mengembalikannya kepada kamu dan aku mengikuti kamu hingga kamu kenyang di rumah-rumah kamu, maka aku bahagia; dan jika aku mengembannya dan merepotkan kamu ke rumahku, maka aku celaka, karena aku hanya senang sebentar dan gelisah dalam waktu lama”.

mendukung ijtihad Khalifah Umar bin al-Khathab, harta Fa’i dibagikan kepada seluruh Muslim baik kaya maupun miskin.

Di masa awal perjuangan Islam, pilihan untuk hijrah dan masuk Islam adalah berat. Seperti nilai yang terkandung dari hijrah ke Yastrib (Madinah) itu sendiri. Kaum Muhajirin berkorban nyawa dan harta, pun dengan kelapangan hati kaum Anshar di Yastrib menerima Rasulullah dan umatnya. Golongan yang berhijrah dan berjuang dalam berbagai peperangan di masa awal ini,

yang menurut surat al-Hasyr ayat 8 dan 9, memiliki hak atas harta Fa’i. Sabda Rasulullah menguatkan ini, “Mereka tidak mempunyai hak sedikitpun di dalam harta Ghanimah dan harta Fa’i”.

Namun setelah Rasulullah wafat dan kaum Muslim memetik banyak kemenangan atas kaum Non Muslim (ahli dzimmah dan kafir harbi), Khalifah Umar bin al-Khathab berijtihad. Umar berkata, “Tidak seorangpun di antara kaum Muslimin melainkan dia mempunyai hak di dalam harta ini, baik dia telah diberikan atau tertolak”.

Dalam sebuah hadits Umar dari Malik ibnu Aus ibnul-Hadatsan, diriwayatkan jawaban Umar atas pertanyaan kaumnya, untuk siapa harta Fa’i itu? Umar membacakan surat al-Hasyr 7-10. Yang ditekankan Umar adalah ayat 10: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka”. Sebelumnya di ayat 7-8-9 disebutkan haknya harta tersebut untuk Allah, Rasul dan kerabat, anak yatim, orang miskin, Ibnuabil, Muhajirin, dan Anshar.

Akan halnya Khumus, harta ini memang ditujukan untuk golongan sebagaimana disebutkan dalam al-Hasyr ayat 7. Namun di jaman Khalifah Umar juga dibagikan merata kepada Muslimin. Abu Ubaid menilai, “Jika dia (pemimpin-red) melihat bahwa harta ini lebih bermaslahat dan lebih bermanfaat dibagikan kepada seluruh umat Islam, maka dia boleh melakukan kebijakan itu sesuai dengan kemaslahatan yang ada”.

Jaminan kemaslahatan dari negara bahkan sudah diberikan sejak lahirnya anak-anak Muslim. Di masa Khalifah Umar bin al-Khathab, subsidi dari Baitulmaal diberikan kepada tiap bayi Muslim yang dilahirkan sebanyak 10 dirham dan jika sudah dewasa mendapat gaji.

Di jaman Muawiyah, subsidi tidak diberikan sebelum masa menyusuinya usai (2 tahun). Dasarnya adalah surat al-Baqarah ayat 233 yang mengatur kewajiban nafkah bayi adalah dari ayahnya, kecuali sang Ayah meninggal. Di jaman Khalifah Umar bin Abdul Azis, subsidi diberikan sesuai kebijaksanaannya.

■ IA

Tata Kelola Baitulmaal

Bait al Maal atau Baitulmaal adalah perwujudan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan keuangan publik.

Konsepnya sederhana, kumpulan harta dari berbagai sumber, simpan di satu tempat, catat, lalu bagikan merata kepada rakyat. Itulah yang pernah terjadi di peradaban Islam sejak tahun kedua Hijriah (7 M) hingga runtuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki pada 1924.

Ya, Baitulmaal memang sistem keuangan publik berlandaskan ajaran Islam yang meski diterapkan pada abad 7 M, sifatnya modern. Di antara sifat modern itu adalah: pengelolaan terpusat, berorientasi pemasukan, menggunakan berbagai instrumen fiskal dan moneter, dan pemisahan kepemilikan yang jelas. Di kerajaan Romawi, Persia, bahkan Inggris tak jauh dari masa-masa Baitulmaal, tidak ada pemisahan kepemilikan yang jelas. Harta negara adalah juga harta pemimpin, raja, sultan, atau kaisar.

❖ KELEMBAGAAN BAITULMAAL

Di masa Rasulullah, selesai perang Badar (2 H), Baitulmaal hanya sebagai pihak, belum berbentuk bangunan. Jika datang harta untuk negara, Rasulullah dibantu para sahabat mencatat dan langsung membagikannya kepada yang berhak.

Penyegeraan pembagian harta Baitulmaal juga dilakukan sejak masa Rasulullah.

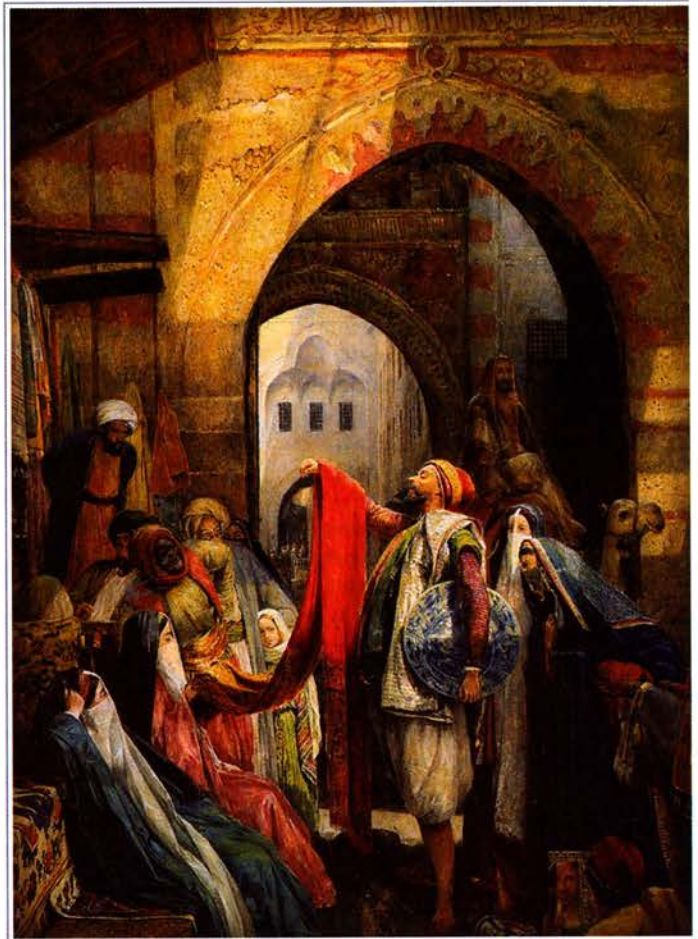
Penyaluran harta dilakukan berdasarkan jumlah yang masuk, bukan berdasar pengajuan atau penganggaran.

Sebuah riwayat dari Qubaishah ibnul Mukhariq: "Saya pernah mendatangi Rasulullah untuk mengajukan aduan tentang bayaran diyat dan utang. Rasulullah bersabda, 'Tunggulah terlebih dahulu, sehingga zakat datang kepada kita...'".

Setelah kewafatan Rasulullah, Abu Bakar ash-Shiddiq menjadi Khalifah (11-13 H/632 M) keadaan Baitulmaal masih berlangsung seperti jaman Rasulullah. Namun sudah ada kemajuan di bidang penyimpanan harta. Karena jumlah harta yang masuk ke negara bertambah, mulai disediakan karung-karung dan kotak harta yang ditumpangkan di Mesjid Nabawi. Tapi, belum ada bangunan khusus untuk itu.

Mesjid Nabawi di Madinah memang difungsikan sebagai kantor pusat negara. Penyimpanan harta di sana, hanya untuk harta berupa emas, perak, dan pakaian. Sedangkan harta berupa hewan tetap ditempatkan di alam terbuka.

Setelah Abu Bakar wafat dan ke-Khalifahan diteruskan oleh Umar bin al-Khattab (13-23 H/634-644 M), dalam ke-Khalifahannya banyak kemajuan yang dialami umat Islam. Khalifah Umar melakukan reorganisasi Baitulmaal dengan mendirikan Diwan Islam (DI) yang pertama disebut dengan al-Divan. Sebuah rumah khusus



untuk menyimpan harta dibangun yang seringkali disebut juga sebagai al-Divan tersebut. Khalifah Umar juga mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal.

Yang menarik, Baitulmaal memiliki cabang-cabang di tiap ibu kota provinsi. Tiap cabang dan pusat memiliki buku induk yang mencatat segalanya. Banyak pakar, baik dari Barat maupun Timur mengatakan ini meniru yang dilakukan Persia dan Romawi.

Dalam sebuah riwayat, administrator Baitulmaal Abdurrohman bin Abdul Qari' berkata: "Saya menjadi penjaga baitul mal di zaman Umar bin al-Khattab, maka jika ia keluar.... Beliau mengumpulkan harta - harta para pedagang lalu menghitungnya baik yang ada dihadapan atau yang tidak, lalu beliau mengambil harta dari yang terlihat di hadapannya maupun tersembunyi....".

❖ SUMBER PEMASUKAN BAITULMAAL

Tidak hanya di jaman Khalifah Umar, menurut Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dalam *al-Amwaal*, pemasukan Baitulmaal umumnya berasal dari jenis Fa'i, Khumus, dan Zakat. Jenis-jenis ini sejatinya adalah milik Allah SWT dan diamanahkan kepada pemimpin ummat untuk dikelola sebaik mungkin demi kemaslahatan ummat.

Dalam literatur klasik Islam lainnya yang bertema keuangan publik ditemukan istilah lain. Oleh karena itu, Abu Ubaid men-*disclaimer*: "Ini merupakan nama-nama umum, sebagaimana telah disepakati ulama, bahwa pada setiap bagiannya terdapat pecahan-pecahan bagian kecil tertentu.

Zakat sebagai salah satu pemasukan negara Islam hanya dikenakan kepada kaum Muslim. kitab *al-Amwaal* menuliskannya sebagai berikut. "Ini meliputi zakat harta umat Islam, seperti emas dan perak, unta, sapi, kambing, biji-bijian, dan buah-buahan".

Akan halnya harta Fa'i, kitab *al-Amwaal* menuliskannya sebagai berikut. "Harta Fa'i adalah harta yang dipungut dari Ahli Dzimmah sesuai dengan perjanjian perdamaian bersama mereka, yaitu sebagai pajak kepala yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya (Jizyah--red). Termasuk bagian Fa'i adalah pajak tanah yang dilakukan secara kekerasan, kemudian pemimpin menyerahkannya kepada Ahli Dzimmah untuk mengelolanya dengan syarat membayar pajak (Kharaj--red). Termasuk harta Fa'i adalah pajak sepersepuluh harta harta Ahli Dzimmah yang dikenakan ke atas impor perdagangan mereka. Termasuk di antara Fa'i adalah pajak yang dikenakan ke atas harta rakyat

kafir Harbi apabila mereka masuk negeri Islam untuk mengadakan perdagangan".

Untuk harta Khumus, kitab *al-Amwaal* menuliskannya sebagai berikut: "Sedangkan Khumus, maka ia adalah seperlima harta ghanimah kafir harbi, rikaz, barang tambang, dan mad'an.

* JIZYAH

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada kaum Non Muslim di luar Madinah yang dalam fikih klasik disebut Ahli Dzimmah. Soal takarannya, ulama terdahulu memiliki perbedaan pendapat. Atas perbedaan tersebut kitab *al-Amwaal* mengambil ukuran umum saja. Hadits yang diriwayatkan Dawud bin Kurds dan Zur'ah atau an-Nu'man adalah yang dijadikan landasan aplikasi. Yaitu, mereka bekwajiban membayar dua kali lipat dibandingkan kewajiban pembayaran yang dilakukan oleh kaum Muslimin.

Ahli Dzimmah ini tidak berkewajiban membela negara Islam jika terlibat peperangan malah mendapat perlindungan dari kaum Muslim. Rasulullah juga tidak memaksa mereka untuk memeluk agama Islam. Beberapa sumber hukum Jizyah yang utama menurut *al-Amwaal* adalah Surat At Taubah Ayat 29 dan hadits dari Abu Hurairah.

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk" (at-Taubah: 29).

Sedangkan dari Abu Hurairah: "Bahwa Umar berkata kepada Abu Bakar ketika bertekad memerangi orang-orang yang murtad bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, 'Aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengatakan, 'Tiada tuhan selain Allah'. Barangsiapa yang mengatakan, 'Tiada tuhan selain Allah', maka harta dan jiwanya telah terpelihara, terkecuali berkaitan dengan haknya, sedang hitungan amalnya diserahkan kepada Allah".

* KHARAJ

Bisa disandingkan dengan pajak atas hasil pengelolaan tanah oleh Non Muslim yang dikalahkan baik secara kekerasan maupun tidak. Pengenaan Kharaj mulai dilakukan ketika perang Khaibar di abad 7 H (Masa Rasulullah). Sebagai pemenang perang, kaum Muslim mengizinkan kaum Yahudi yang berdiam di Khaibar untuk tetap hidup dan mengelola tanah Khaibar. Pertimbangannya, karena saat itu kaum Muhajirin dan Anshar pengikut Rasulullah tidak lebih paham dan ahli mengelola tanah di Khaibar.

Segolongan Yahudi dari keluarga Ibnu Abil Huqaiq memohon kepada Rasulullah untuk tetap di sana. Rasulullah memberi syarat, sebagian hasil kelolaan tanah Khaibar menjadi milik kaum Muslim.

Sumber sejarah Islam memaparkan kisah Kharaj berikutnya, termasuk yang kemudian dijadikan rujukan

adalah ketika diterapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khathab kepada penduduk daerah Sawad, tanah subur di negeri Syam.

Dari banyak hadits tentang Kharaj, kitab *al-Amwaal* menilai hadits Mujalid dari asy-Sya'bi lebih dihafal kaum Muslim saat buku ini ditulis. Hadits itu juga menerangkan ukuran Kharaj. Hadits yang ditetapkan adalah hadits Amru bin Maimun: "Aku mendengar Amru bin maimun berkata, Aku telah menyaksikan Umar ibnul Khaththab didatangi Ibnu Hunaif, kemudian mereka berbicara. Aku mendengarnya berkata, 'Demi Allah, jika aku meletakkan pada setiap satu hektar tanah satu Dirham dan satu Qafiz, maka tidak akan memberatkan mereka dan juga tidak akan menyusahkan mereka".

* USYUR

Usyur kerap kali disebut Nisful 'Usyur atau 1/10 adalah pungutan atas pedagang Non Muslim yang masuk ke negeri Islam untuk berdagang. Dalam Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, Dr Jaribah menerangkan bahwa tidak ada penetapan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk ini, namun murni ijtihad Khalifah Umar bin Al-Khathab.

Sebelumnya di masa Rasulullah, Usyur malah dilarang. Seperti dikutip *al-Amwaal*, salah satu hadits Rasulullah dari Uqbah bin Amir, "Pengumpul cukai barang impor tidak akan masuk ke dalam surga".

Ketika menulis *al-Amwaal* dengan mengkaji hadits-hadits seputar usyur, Abu Ubaid menemukan larangan itu

"Maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap 20 Dinar mesti dikenakan cukai 1 Dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar kekurangannya, hingga ia mencapai 10 Dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari 3 dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya".

berlaku hingga Khalifah Umar berijtihad. Menarik usyur atau cukai impor adalah makruh hukumnya karena itu adalah kebiasaan jaman jahiliyah.

Ketika Khalifah Umar berkuasa, Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Rasulullah menemukan kenyataan bahwa pedagang Muslim, ketika masuk ke negeri Non Muslim untuk berdagang dikenakan usyur. Abu Musa mengirim surat kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar pun memutuskan kebijakan yang sama dengan dua pertimbangan. Pertama, pada masa pemerintahannya, telah banyak perjanjian damai tercapai dengan negeri-negeri Non Muslim. Kitab *al-Amwaal* menuliskan, "Hal ini tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, sebab Ahli Dzimmah yang telah mengadakan perjanjian damai bersama Rasulullah tidak pernah menandatangani syarat pembayaran cukai. Demikian juga pada zaman pemerintahan Abu Bakar. Hal ini disebabkan bahwa negeri-negeri non-Arab telah ditaklukkan pada zaman Umar. Dan, pengumpulan cukai hanya diberlakukan di negeri non-Arab. Oleh sebab itulah diberlakukanlah kebijakan ini".

Mengenai besaran tarifnya, Imam Maliki (Anas bin Malik) menuliskan hadits yang isinya bahwa pada setiap 20 Dirham harta Ahli Dzimmah wajib dikenakan bayaran 1 dirham. Di jaman Khalifah Umar bin Abdul Azis, Ruzaiq bin Hayyan ad-Dimisyyi, petugas cukai di perbatasan Mesir menerangkan perhitungan lebih lengkap seperti dikutip *al-Amwaal*. Barangsiapa melewati dari kalangan Ahli Dzimmah, maka pungutlah barang dagangan impor mereka. Yaitu, pada setiap 20 Dinar mesti dikenakan cukai 1 Dinar. Apabila kadarnya kurang dari jumlah tersebut, maka hitunglah dengan kadar



kekurangannya, hingga ia mencapai 10 Dinar. Apabila barang dagangannya kurang dari 3 dinar, maka janganlah engkau memungut apapun darinya. Kemudian buatlah surat pembayaran cukai kepada mereka bahwa pengumpulan cukai akan tetap diberlakukan sehingga sampai satu tahun".

* ZAKAT

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah:60).

Dari banyak firman Allah SWT tentang zakat, surat inilah yang seringkali dipakai. Tafsir terhadapnya juga sudah banyak dari kalangan ulama dan sebagian besar merujuk kepada yang tersurat bahwa zakat ditujukan untuk 8 golongan (asnaf) di atas.

Berbeda dengan instrumen pemasukan negara sebelumnya yang diterangkan di atas,

zakat ditujukan untuk kaum miskin dari orang kaya. Kitab *al-Amwaal* lebih menekankan soal ini. Fungsi zakat sebagai distribusi harta secara adil di kalangan Muslim.

Peruntukkan untuk orang miskin sudah diterangkan dengan surat at-Taubah di atas. Sedangkan kewajibannya bagi orang kaya diterangkan dengan berbagai hadits.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Kewajiban zakat adalah apabila telah menjadi orang kaya. Tangan yang di atas lebih mulia dibandingkan tangan yang di bawah. Dan, mulailah pemberian nafkah itu kepada orang yang menjadi tanggungjawabmu".

Dalam sistem Baitulmaal, zakat jelas dibedakan dengan harta Fa'i dan Khumus. Pertama, tidak ada sumber Alquran dan sunnah Rasulullah yang

menyebutkan zakat untuk Allah SWT. Kedua, ia adalah milik kaum Muslim yang diambil dari sebagian kaya dan diserahkan kepada kaum 8 asnaf. Ketiga, ia tidak diambil dari kaum Muslim.

Sedangkan harta Fa'i dan Khumus, sebagaimana diriwayatkan Sufyan bin 'Uyainah, "Sebenarnya penyebab Allah membuka pembahasan harta Fa'i dan ketentuan seperlima dengan cara menyebutkan diri-Nya, disebabkan bahwa kedua harta itu merupakan usaha yang sangat mulia. Setiap segala sesuatu yang mulia dan agung mestilah dinisbahkan kepada-Nya. Penyebab Allah tidak menisbahkan zakat kepada diri-Nya disebabkan zakat merupakan kotoran manusia".

■ IA

"Sebenarnya penyebab Allah membuka pembahasan harta Fa'i dan ketentuan seperlima dengan cara menyebutkan diri-Nya, disebabkan bahwa kedua harta itu merupakan usaha yang sangat mulia. Setiap segala sesuatu yang mulia dan agung mestilah dinisbahkan kepada-Nya. Penyebab Allah tidak menisbahkan zakat kepada diri-Nya disebabkan zakat merupakan kotoran manusia".

Skema Grand Design Strategy Pengembangan Pasar



Untuk mewujudkan visi baru pengembangan pasar perbankan syariah dilakukan melalui serangkaian program utama Grand Strategy yaitu:

(1) Program Pencitraan baru perbankan syariah

Visi baru pengembangan sebagai pasar yang atraktif dipayungi program pencitraan baru dengan memposisikan perbankan syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, yang ditunjang berbagai keunikan antara lain keanekaragaman produk dengan skema variatif dan dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak, oleh tenaga perbankan yang kompeten dalam keuangan dan beretika, didukung IT system yang up date & user friendly, serta fasilitas ahli investasi, keuangan dan syariah. *Positioning* dan diferensiasi tersebut akan membawa arti bahwa sesungguhnya perbankan syariah "lebih dari sekedar bank".

Citra yang melekat selama ini pada perbankan syariah adalah bank yang diperuntukkan untuk kalangan muslim/orang yang mau naik haji, dengan atribut yang menekankan kepada simbol keislaman, produk yang hampir serupa dengan produk konvensional dan layanan yang masih terbatas dengan brand "bank yang adil dan menentramkan".

Perbankan syariah adalah untuk semua kalangan yang menginginkan keuntungan kedua belah pihak, bank dan pelanggan dengan atribut yang lebih menekankan ke substansi (*universal values*) sebagai kemandirian bagi semua.

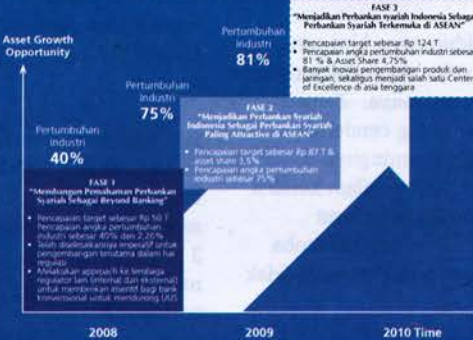
(2) Program Pengembangan Segmen Pasar Perbankan Syariah

Program pengembangan segmentasi berguna untuk mengkonkretkan langkah *positioning* ke benak konsumen yang menjadi *target market*. Hasil riset menunjukkan ada lima segmen baru konsumen perbankan syariah Indonesia berdasarkan orientasi perbankan dan profil psikografisnya yaitu: (1) sangat mengutamakan penggunaan bank syariah ("pokoknya syariah"), (2) ikut-ikutan, (3) mengutamakan benefit seperti kepraktisan transaksi dan kemudahan akses, (4) mengutamakan penggunaan jasa bank konvensional yang telah ada. Melalui riset pasar terhadap nasabah perbankan syariah dan konvensional terlihat adanya paradoks dalam perilaku konsumen perbankan. Paradoks pengguna disebabkan oleh pengguna perbankan syariah di Indonesia cenderung berperilaku pragmatis, bahkan nasabah dari segmen "pokoknya syariah" ternyata juga adalah nasabah bank konvensional.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah dirumuskan oleh Bank Indonesia dalam kerangka program akselerasi pengembangan pasar perbankan syariah Indonesia. Dalam Grand Strategy ini Bank Indonesia menetapkan visi 2010 pengembangan pasar perbankan syariah nasional, yaitu: **sebagai perbankan syariah paling terkemuka di ASEAN**.

Visi Grand Strategy Pengembangan Pasar



(3) Program pengembangan produk

Program pengembangan produk bertujuan untuk mendorong pelaku (industri perbankan) melakukan inovasi produk dan mengeksplorasi kekayaan skema yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaannya dengan perbankan konvensional. Program ini menjadi keharusan agar keunikan dan *value proposition* yang solid yang dimiliki perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional lebih terlihat jelas. Beberapa inisiatif program pengembangan produk antara lain dalam perumusan keunikan dan *value proposition* produk dan jasa perbankan syariah yang akan ditawarkan kepada masyarakat, mendorong *mirroring* produk dan jasa internasional, mendorong *foreign owned sharia banks* untuk membawa produk-produk yang sukses di luar negeri ke Indonesia, serta *streamlining* perizinan produk.

(4) Program peningkatan pelayanan

Peningkatan kualitas layanan perbankan syariah diarahkan ke memperkecil gap ekspektasi dan layanan sebagai lembaga yang universal dan handal. Agar kualitas layanan perbankan syariah bisa menjadi solid di masa depan, maka peningkatan kualitas layanan mesti dilakukan di area yang terkait keunikan maupun bersifat umum. Dari survei tingkat kepuasan terhadap simpanan bank konvensional dan bank syariah, kualitas layanan perbankan syariah dinilai oleh responden lebih baik di *core benefit* yang ditawarkan sementara kualitas layanan perbankan syariah masih perlu ditingkatkan dalam aspek jaringan pelayanan. Sedangkan dilihat dari tingkat kepuasan terhadap pinjaman bank konvensional dan bank syariah, kualitas perbankan syariah dinilai oleh responden lebih baik hampir di semua aspek. Kualitas layanan perbankan syariah yang ternyata tidak kalah dibandingkan perbankan akan terus diupayakan.

(5) Program sosialisasi dan komunikasi terhadap stakeholders

yang terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk pengembangan pasar untuk mensosialisasikan paradigma baru pengembangan industri perbankan syariah Indonesia yang modern, terbuka, dan melayani seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Berbagai program sosialisasi dan komunikasi dalam rangka edukasi publik seluruhnya diarahkan agar sejalan dengan *positioning* bank syariah yang telah direkomendasikan oleh Grand Strategy, yaitu sebagai "Lebih dari Sekedar Bank (*Beyond Banking*)".

Temukan logo iB di bank-bank terkemuka di seluruh Indonesia, dan nikmati kelebihan layanan perbankan syariah yang modern, melayani, adil dan transparan.

Karena perbankan syariah lebih dari sekedar bank

Informasi lebih lanjut:

Gerai Info Bank Indonesia Lobby Menara Sjafruddin Prawiranegara atau Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, T. 6221 381 8371 F. 6221 350 1989 www.bi.go.id

BANK INDONESIA



Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Ekspor Indonesia Syariah, Bank IFI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, BSI Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, BTPN Syariah, HSBC Amanah, BPD Syariah, BPR Syariah.

Grand Strategy Pengembangan Pasar Perbankan Syariah



BANK INDONESIA



Perbaiki Gaya Hidup



Pernah mendengar istilah “angin duduk” atau dalam bahasa kedokterannya Angina Pectoris?

Ciri-cirinya adalah penderita mengalami pusing, mual dan kembung. Angina pectoris memang nyaris serupa dengan penyakit masuk angin biasa, namun penderita juga merasakan dada sesak, nyeri dibagian ulu hati, keluar keringat sebesar jagung, serta badan terasa dingin. Sayangnya, hal ini sering tidak disadari sebagai indikasi adanya gangguan pada jantung yang sifatnya kritis. Penyakit ini merupakan gangguan pada jantung akibat adanya kelainan pada pembuluh koroner, sehingga darah tidak mampu mengantarkan zat-zat yang dibutuhkan oleh jaringan dinding rongga jantung. Karena itu, jika tidak terdeteksi sejak awal penderitanya bisa mengalami sudden death. Sumber masalah sesungguhnya terletak pada penyempitan pembuluh darah jantung (vasokonstriksi).

Penyempitan ini diakibatkan oleh empat hal, yaitu:

- **Pertama**, adanya timbunan lemak (aterosklerosis) dalam pembuluh darah akibat konsumsi kolesterol tinggi.
- **Kedua**, sumbatan (trombosis) oleh sel beku darah (trombus);
- **Ketiga**, vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus menerus.
- **Keempat**, infeksi pada pembuluh darah.

Gaya hidup masa kini yang kurang sehat dan tidak teratur adalah pemicunya. Zaman sekarang orang cenderung melupakan pentingnya olahraga, hidup dalam kondisi stress, sering tidur larut malam, dan sering mencoba bermacam pola diet yang tidak sehat.

Kurang atau tak pernah olahraga akan menghambat kelancaran metabolisme tubuh. Akibatnya, akan terjadi pengendapan lemak yang perlahan-lahan dapat menyumbat lajunya aliran darah ke jantung.

Sementara itu, orang sekarang banyak yang mengaku tak punya cukup waktu olahraga dan tidak menjaga diri dari kemungkinan obesitas (kelebihan berat badan).

Kelebihan lemak dapat meminimalkan gerak pompa jantung.

“Your waist is your heart”. Jaga ukuran pinggang anda, karena di perutlah semua jenis lemak menumpuk. Untuk wanita, maksimal 80 cm, dan untuk pria, maksimal 90 cm. Oleh karena itu jaga pola makan, hindari junk food, perbanyak asupan buah dan sayuran serta fiber.

Jika kita merasa sering makan-makanan yang berlemak atau berlebih seperti daging, jeroan, sering ngemil, makan 2 piring atau selalu nambah, usahakan perbanyak berpuasa untuk mengimbangnya.

Menjauhkan diri dari stres, juga bisa mencegah kita dari penyakit jantung koroner, pasalnya dalam keadaan stres kinerja tubuh serta otak dipaksa untuk bekerja secara berlebihan. Hasilnya, kondisi tubuh selalu dalam keadaan letih dan porsi istirahat berkurang. “Kurangnya istirahat dapat mengakibatkan pengentalan darah, yang dapat meningkatkan hormon adrenalin, akibatnya bisa ditebak serangan jantung lebih gampang terjadi”

Orang yang sedang emosi juga perlu waspada. Pasalnya, saat marah kondisi darah bergerak cepat, sehingga jika ada penyumbatan di pembuluh darah, maka darah akan berkumpul di suatu

tempat dan karena tidak kuat menampung banyaknya darah yang datang pembuluh yang halus akan pecah dan sudah bisa ditebak akibatnya.

Kondisi ini juga berlaku ketika dia berolahraga ekstra keras (seperti main bola), yang juga memicu jantung berdenyut lebih cepat dan darah juga bergerak cepat. Jika ada sumbatan dalam tubuh, maka kejadian pembuluh darah pecah pun akan menyimpannya (seperti Almarhum Benyamin S dan Basuki, mereka meninggal selagi bermain bola).

Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan, yaitu:

1. Minum air putih minimal 8 gelas sehari
2. Banyak makan buah-buahan dan sayuran (serat alami)
3. Hindari stres dan selalu sabar
4. Perbanyak berpuasa
5. Tidur yang cukup
6. Olahraga ringan secara rutin

Bagi yang sudah berumur, seharusnya sudah tidak cocok lagi untuk olahraga keras semacam itu, karena kita tidak tahu apakah didalam tubuh kita ada penyumbatan atau tidak. Olah ragalah yang ringan seperti jalan kaki, lari pagi, senam, bersepeda santai atau olahraga pernapasan.

Pola hidup sehat dan seimbang harus kita jalani, “Mencegah lebih baik daripada mengobati.”

Berusalahlah untuk hidup sehat dan seimbang, agar kita bisa hidup dan beribadah dengan nyaman.



Penawaran Khusus untuk pemegang kartu BSM Priority, dapatkan diskon khusus di beberapa rumah sakit sebagai berikut:

 Sahid Sahirman Jend. Sudirman	RS Sahid Sahirman JL. Jend. Sudirman No.86 Jakarta Pusat	10% Medical Check Up, 10% Radiologi & 10% Rawat Inap
 RUMAH SAKIT Puri Mandiri Kedoya	RS Puri Mandiri JL. Raya Kedoya No.2 Kebon Jeruk, Jakarta Barat	10% Medical Check Up, 10% Klinik Tumbuh Kembang Anak, 10% Rawat Inap, 5% Jasa dokter & 5% Lab.
 Mahkota Medical Center	Mahkota Medical Center Jl. Merdeka No.3, Mahkota Melaka, Malaysia	10% medical check up, 5% rawat inap & 5% jasa dokter
 Normah Medical Center	Normah Medical Center Jl. Tun Abdul Rahman Yakub, Kuching, Malaysia	5% medical check up, 5% rawat inap & 5% jasa dokter
 JOGJA INTERNATIONAL HOSPITAL	Jogja Int'l Hospital JL. Ring Road Utara No.160 Sleman- Yogyakarta	10% Rawat Inap, 5% Lab & Radiologi
 RS Pertamina	RS Pertamina JL. Jend Sudirman, Balikpapan	30% Rawat Inap
 RS PAVILION ZAINAB	RS Paviliun Zainab JL. Ronggowarsito No.1, Pekanbaru	10% Rawat Inap

Ingin Sehat, Bergeraklah..

Dr Kunkun K Wiramihardja (Dokter gizi, Nasabah BSM Priority)

Dokter gizi kelahiran Bandung 69 tahun yang lalu ini, mulai tertarik dengan dunia gizi diawali dengan kekagumannya terhadap Al Qur'an surat Al Mu'min ayat ke 67 yang berbunyi "Dia-lah yang menciptakan kamu dari sari pati tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak ...". Dapat diartikan bahwa zat pembentuk manusia terdiri dari gabungan nutrisi yang terdapat di alam. Sudah selayaknya manusia bertoleransi dengan cara memelihara alam ini, sehingga alam pun bisa bersahabat dengan kita.

persepsi yang salah di masyarakat bahwa nasi perlu dihindari karena cepat membuat gemuk dan diganti dengan kentang atau makanan yang berbahan dasar terigu/ gandum.

Beliau menuturkan bahwa begitu banyak petunjuk di Al Qur'an mengajarkan kita untuk hidup sehat. Diantaranya pada surat 'Abasa ayat 24 s.d 32 terdapat anjuran Allah untuk memakan makanan yang terbuat dari biji-bijian, seperti yang mudah di jumpai di sekitar kita yaitu nasi, tempe, tahu. Pada surat Al Baqarah ayat 168 berbunyi "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi,...". Mengandung arti makanan yang baik adalah

menggunakan nasi dengan alasan tidak praktis dan mengenyangkan. Pada akhirnya menjadi kebiasaan lebih mengutamakan makanan ringan daripada makanan pokok.

Dewasa ini tanpa disadari aktifitas yang mendominasi keseharian kita adalah duduk. Dalam waktu sehari berapa lama kita habiskan untuk duduk. Dimulai dari rumah, ketika sarapan, nonton tv, makan siang, naik kendaraan, di meja kerja, di ruang rapat. Semua dalam kondisi duduk. Sedikit sekali kita habiskan waktu dalam sehari untuk bergerak. Mulai saat ini banyaklah bergerak, karena olahraga tidak perlu berkerenget.

Dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi, usia harapan

... karena olahraga tidak perlu berkerenget.

Beberapa bulan yang lalu beliau baru saja mengikuti seminar mengenai gizi yang diadakan di Amsterdam - Belanda dan dihadiri oleh seluruh anggota negara-negara di Eropa, yang menghasilkan beberapa anjuran diantaranya adalah mengganti bahan makanan pokok yang bersumber dari gandum menjadi beras dan mengganti pola konsumsi makanan ringan (snack) menjadi buah-buahan, karena makanan ringan dalam jangka waktu tertentu dapat menghilangkan kemampuan lidah untuk merasakan sayur.

Dari salah satu hal anjuran tersebut timbul pertanyaan, kenapa negara maju mulai beralih ke beras? Alasan utama adalah beras adalah sumber karbohidrat dan makanan yang tidak cepat dicerna oleh tubuh. Sehingga dampaknya tubuh tidak cepat pula mengalami kelebihan gizi, yang berujung kepada obesitas (kegemukan). Sangat disayangkan pula beredar

halal akan zat yang terkandung didalamnya dan halal dari cara mendapatkannya.

Dokter Kunkun mengamati bahwa sekitar tahun 60-an masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi, ditandai dengan banyaknya penderita busung lapar, gondok dan kekurangan darah. Tetapi setelah tahun 80-an ada kecenderungan timbul penyakit yang termasuk kategori kelebihan gizi. Ternyata hal ini pun turut melanda penduduk dunia. Salah satu pemicu adalah berubahnya gaya hidup masyarakat saat ini membuat kualitas hidup manusia kurang baik.

Kemajuan teknologi, khususnya sektor transportasi dan komunikasi yang menyebabkan pola hidup bergeser. Contohnya seseorang enggan naik ke lantai 1 atau 2 dengan menggunakan tangga, ia cenderung memilih lift. Sedangkan bila ia berangkat kerja di pagi hari, ia enggan untuk sarapan

hidup masyarakat saat ini diatas 65 tahun. Tetapi karena tidak diikuti dengan pola hidup yang sehat maka pada umumnya orang pada usia lanjut menderita tiga macam penyakit. Dan lansia adalah pengguna obat-obatan maupun fasilitas kesehatan paling besar. Hingga timbul opini bahwa bila seseorang lanjut usia harus mempersiapkan biaya berobat yang tidak sedikit.

Alhamdulillah, di usia yang sudah hampir 70 tahun, dokter Kunkun terlihat sehat wal afiat. Beliau masih aktif praktek sebagai dokter di beberapa tempat, menjadi komisaris di suatu perusahaan swasta dan menjadi pembicara di seminar-seminar. Di akhir pembicaraan beliau berpesan kita harus dapat memilah dan memilih pola hidup mana yang baik, tidak semua budaya barat baik untuk kita tiru. Lakukanlah olahraga, bila anda terlalu sibuk cukup dengan berjalan di tempat secara teratur. ■



Diperlukan, Penguatan Kelembagaan Ekonomi Islam



Untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang kuat, diperlukan suatu kelembagaan yang baik

Masalah kelembagaan (institusi) sering diabaikan karena dianggap tidak perlu. Padahal, bukti empiris menunjukkan peran kelembagaan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Soal kelembagaan ini menjadi topik utama dalam Simposium Nasional IV Ekonomi Islam yang diselenggarakan di Yogyakarta, 8 – 9 Oktober 2009.

Sebagai tuan rumah adalah P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Simposium diselenggarakan selama dua hari, dengan dua kali seminar. Tema yang diambil adalah *Strengthening Institutions on Islamic Economics*.

Seminar hari pertama menampilkan empat pembicara. Yakni Bambang Kiswono SH, LL.M (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia BI), Dr Lincoln Arsyad, M.Sc dari Universitas Gajah Mada (UGM), Masyudi Muqorobin, M.Ec, PhD dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Munrohim Misanam, MA, Ec, PhD dari UII.

Dalam seminar tersebut terungkap bahwa ekonomi kelembagaan termasuk barang langka. Masyudi Muqorobin menjelaskan bahwa dari 4.580 literatur ekonomi Islam, hanya tiga yang fokus membicarakan tentang kelembagaan ekonomi. Sisanya didominasi oleh masalah perbankan dan keuangan. Sebaliknya di negara barat, malah banyak yang membahas tentang kelembagaan ini. Perkembangan kelembagaan di negara barat tumbuh pesat dan menjadi *new institutional economics*.

* RULE OF THE GAME

“Ekonomi kelembagaan tergolong

barang langka. Ekonom muslim selama ini menganggap ekonomi kelembagaan tidak perlu karena ada isu lain yang dianggap lebih penting, misalnya masalah kemiskinan. Selain itu, mereka yang berminat memperdalam ilmu ekonomi kelembagaan juga minim. Kalau UII ingin mengembangkan hal ini, itu bagus,” kata Masyudi.

Lincoln Arsyad menambahkan institusi merupakan *rule of the game* (aturan main) yang mengatur bagaimana masyarakat berinteraksi baik formal maupun informal pada pasar atau non pasar. Institusi juga merupakan organisasi yang mengimplementasikan aturan-aturan tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Menurutnya, institusi yang baik akan menurunkan biaya transaksi. Dalam menciptakan institusi yang baik, harus memperhatikan tingkatan institusi yang di atasnya. Oleh karena itu, tatanan institusi harus kontekstual yakni sesuai dengan kondisi historis, geografi, ekonomi politik,

modal sosial suatu masyarakat dan kondisi-kondisi awal yang sudah berlaku di masyarakat sebelumnya.

“Sistem nilai Hinduisme telah mempengaruhi tata kelola mikro pada masyarakat Bali dan hasilnya bagus. Ini tantangan bagi kita, bagaimana kita membangun institusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya lagi di Cina, menerapkan sistem pasar pada sistem ekonomi terencana, dengan tidak menghilangkan sama sekali sistem perencanaan terpusat,” paparnya.

Untuk mengukur apakah institusi itu sudah baik, kata Lincolin, bisa dilihat dari kualitas tatakelola, misalnya bagaimana tingkat korupsi, bagaimana hak-hak politik masyarakatnya, sektor publiknya sudah efisien atau belum serta beban aturan yang diterapkan. Selain juga derajat

syariah dari sisi kelembagaan. Tantangan dalam kelembagaan terutama adalah permodalan yang masih terbatas dalam menghadapi periode pertumbuhan dan jaringan kantor yang masih belum memadai sehingga masyarakat masih kesulitan menemukan layanan perbankan syariah.

“Dalam bidang hukum, tantangan yang harus dihadapi adalah perlunya dukungan aturan yang mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di perbankan syariah. Salah satunya ketentuan terkait PPN untuk transaksi murabahah. Masalah sumber daya manusia (SDM) di perbankan syariah juga masih jadi kendala, baik secara kualitas maupun kuantitas,” ujarnya.

✳ PROSPEK DI TENGAH KENDALA

Kebijakan Pembiayaan Syariah Dahlan Siamat, SE, MM.

Mustafa Edwin Nasution berpendapat masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggerakkan kegiatan bank Islami karena masyarakat tidak sepenuhnya paham tentang hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan bank Islami yang ada. Sebagai industri baru yang muncul di Indonesia, masyarakat belum terlalu terbiasa dengan keberadaan dan kegiatan bank Islami.

Rendahnya partisipasi masyarakat ini ditunjukkan dengan masih sedikitnya jumlah rekening di bank Islami, yakni hanya 5,31 juta rekening saja per Juni 2009. Jumlah ini sangatlah kecil dibanding jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas adalah muslim. Ini pula yang membuat jumlah

negara berkembang, yakni kurang terdistribusinya harta dengan baik. Dengan menerapkan Islamic finance, akan mampu memerdekakan umat dan menciptakan kemakmuran yang merata. Butuh waktu yang panjang untuk mewujudkan hingga 100 persen menjadi Islami.

“Bank syariah itu bukan untuk semua, tapi untuk segmen tertentu. Seperti juga organisasi, kan juga bukan untuk semua. Segmen tertentu di sini adalah dana-dana yang halal dan dana yang halal itu bukan soal dia muslim atau non muslim. Muslim-pun, kalau dia mendapatkan dana dengan cara yang haram, ya tidak bisa diterima. Sebaliknya, non muslim yang jujur, yang mendapatkan dana dengan cara yang halal dan dia mau menjalankan sistem perbankan secara syariah, ya bisa

“Ekonomi kelembagaan tergolong barang langka. Ekonom muslim selama ini menganggap ekonomi kelembagaan tidak perlu karena ada isu lain yang dianggap lebih penting, misalnya masalah kemiskinan. Selain itu, mereka yang berminat memperdalam ilmu ekonomi kelembagaan juga minim”

perlindungan hukum terhadap pemilikan kekayaan pribadi dan sejauh mana hukum tersebut dilaksanakan.

Sebuah institusi sudah memiliki karakteristik yang baik jika telah memberikan hak kepemilikan kepada masyarakat secara luas sehingga setiap individu memiliki insentif untuk berinvestasi dan ambil bagian dalam kehidupan ekonomi produktif. Hal ini juga bisa dilihat dari dibatasinya tindakan kelompok elite, politisi dan kelompok-kelompok kuat lainnya sehingga mereka tidak dapat seenaknya mengambil alih pendapatan dan investasi orang lain.

Bambang Kiswono dalam kesempatan tersebut juga menyoroti tantangan pengembangan perbankan

Walaupun masih menghadapi berbagai kendala, pengembangan perbankan syariah tetap memiliki peluang dan prospek yang masih bagus. Hingga Agustus 2009, jumlah bank umum syariah (BUS) sebanyak lima buah, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 24 buah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) mencapai 135 buah. Jumlah kantor BUS sebanyak 654, UUS sebanyak 262 dan BPRS sebanyak 135 buah.

Seminar hari kedua menampilkan empat orang pembicara. Yakni Direktur ECONIS, Prof Abdul Gaffar Ismail, Ph D dari Malaysia, Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Dr. Mustafa Edwin Nasution, Direktur ASBISINDO Riawan Amin, M. Sc dan Direktur

aset perbankan Islam masih jauh tertinggal, yakni hanya 2,14 persen dibanding total aset perbankan nasional.

“Mayoritas masyarakat masih berpola pikir konvensional. Mereka mengasosiasikan kegiatan lembaga keuangan yang ada dengan bunga. Kondisi ini didukung minimnya informasi yang mereka dapat tentang perbankan Islami. Anggaran promosi bank-bank Islami memang rendah. Biaya promosi untuk tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp 180 miliar. Sehingga makin lebarlah jurang ketidakpahaman masyarakat tentang keberadaan dan kegiatan bank-bank Islami,” papar Mustafa.

Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Riawan Amin menyoroti problem utama di negara-

diterima,” tuturnya.

Dahlan Siamat dalam kesempatan tersebut mengatakan prospek keuangan syariah sangatlah prospektif mengingat Indonesia adalah negara muslim terbesar. Pemerintah mendukung sepenuhnya dari sisi regulasi. Untuk mewujudkan perbankan syariah menjadi perbankan Islam yang sepenuhnya, pemerintah memberi kemudahan dari sisi jumlah permodalan. Proses konversi dari UUS menjadi BUS diperlunak permodalannya hanya dengan Rp 1 triliun. Sementara untuk mendirikan bank konvensional, modalnya sebesar Rp 3 triliun.

■ SM



Menghargai Bambu,

Bambu Nusantara 3 semakin meriah. Digelar di Kota Bandung, pusat budaya yang melahirkan angklung, alat musik dari bambu, sebuah pesan disampaikan: betapa besar arti bambu untuk kehidupan.

Hentakan musik Ozenk Percussion membahana di Parijs Van Java (PVJ) Bandung, Sabtu, 17 Oktober 2009. Iramanya yang cepat membuat ribuan penonton tak kuasa menahan gerak tubuh. Mereka berdendang, berjoget, dan lebur dalam pembukaan Bambu Nusantara 3 World Music Festival yang digelar 17-18 Oktober 2009.

Ozenk tampil dengan begitu semangat. Unikny, selama pertunjukan mereka mengenakan topeng dari bambu, kostum

yang sama digunakan oleh puluhan pengisi acara yang menari-nari di samping panggung. Harus diakui, seperti semangat yang ditularkan Ozenk, pelaksanaan Bambu Nusantara ke tiga ini lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Lihat saja jumlah pengisi acara ini, mencapai 900 orang yang tergabung dalam 60 grup berbasis bambu.

Angka yang besar dan cukup mewakili pesan moral yang ingin disampaikan yakni betapa berartinya bambu dalam kehidupan, sehingga harus terus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. "Bambu ada

dalam kesenian, kebudayaan, lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Karena dari lahir hingga mati, manusia tidak pernah lepas dari bambu," ujar pemilik Republic of Entertainment sebagai penyelenggara, Wawan Juanda.

✧ SAMBA SUNDA

Semakin sore, acara semakin meriah. Setelah penampilan Ozenk Percussion, 200 siswa SMPN 1 Karawang dan SMPN 2 Cileunyi bermain angklung dan membawakan beberapa lagu daerah di Indonesia. Mereka memainkan alat musik yang kini menjadi rebutan itu dengan fasih.

Alhasil kepiawaian mereka dihadiah tepuk tangan yang meriah dari penonton.

Teriakan dari penonton tiba-tiba terdengar ketika Ganiati dan Bengkel Kostum berjalan berlenggak-lenggok dalam acara bertajuk karnaval. Ganiati yang sudah terkenal grup orang gila dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini, seperti biasa membuat penonton tertawa terpingkal-pingkal.

Menginjak malam, penonton semakin padat untuk menonton penampilan grup musik kaliber dunia, Samba Sunda. Bersama dengan Patrick dan Iversen dari Norwegia, Samba Sunda membawakan beberapa lagu, sebelum akhirnya menutup hari pertama Bambu Nusantara 3.

Di hari kedua, artis yang ditampilkan makin 'gila'. Ada Seratus Persen feat Ebith Beat A, Samba Sunda feat Patrick, Fransesco, Bathandwa, Ramli, dan Khadijah. Penampilan yang paling ditunggu-tunggu malam itu adalah Balawan yang diiringi Batuan Ethnic Fusion yang sengaja dibuatnya untuk mengeksplorasi musik tradisional Bali. Malam itu, dia memperlihatkan kepiawan jari-

untuk mengokohkan musik bambu di nusantara. "Kami tidak mau bicara internasional, jika di Indonesianya sendiri tidak kokoh," ujar Sekretaris Ditjen Pemasaran Departemen Budaya dan Pariwisata, Noviendi Makalan.

Noviendi menjelaskan, setiap ada event internasional, pihaknya selalu membawa angklung (salah satu musik bambu) yang kini sedang didaftarkan di Unicef. Orang yang melihat selalu penasaran dan ingin bermain ke Indonesia untuk melihat pertunjukkan aslinya. Sampai sekarang, ada empat negara tetangga yang mengklaim angklung dari negara dirinya. Namun mereka tidak memiliki bukti, angklung berasal dari negaranya. "Kita punya catatan sejarahnya, mudah-mudahan angklung bisa menyusul batik dan keris," cetus dia. *Ren

"Bambu ada dalam kesenian, kebudayaan, lingkungan hidup dan kehidupan manusia. Karena dari lahir hingga mati, manusia tidak pernah lepas dari bambu," ujar pemilik Republic of Entertainment sebagai penyelenggara, Wawan Juanda".



Menghargai Kehidupan

jemarinya melumpuhkan gitar unik miliknya. Itu pula yang membuatnya dijuluki sebagai Magic Fingers. Setelah bercengkrama lewat beberapa lagu dari Balawan, acara ditutup kembali oleh Ozenk Percussions.

* MENUJU WORLD MUSIC CIRCUIT

Event tahunan yang masuk agenda Visit Indonesia Year ini sedang diupayakan masuk ke World Music Circuit dengan mendaftarkannya ke World Music Expo di Spanyol 2007 lalu. Proses untuk masuk world music ini memang membutuhkan waktu. Hal ini dimanfaatkan Indonesia



"Noviendi menjelaskan, setiap ada event internasional, pihaknya selalu membawa angklung (salah satu musik bambu) yang kini sedang didaftarkan di Unicef. Orang yang melihat selalu penasaran dan ingin bermain ke Indonesia untuk melihat pertunjukkan aslinya".

Tokoh **Penting** Dibalik Layar Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah

Mohamad Hidayat MBA, MH

Perembangan industri ekonomi syariah yang sangat pesat di tanah air dalam satu dekade belakangan ini, antara lain didukung dengan terus bermunculannya bidang-bidang bisnis baru di industri ini.

Setelah perbankan syariah terus menggeliat, lalu asuransi syariah semakin berkembang, maka bisnis baru ekonomi syariah lainnya, seperti gadai syariah, pasar modal syariah, multi finance syariah, MLM syariah, dan lainnya, menyusul hadir di masyarakat kita. Tentu saja, keberadaan bisnis baru syariah tersebut diiringi pula dengan produk-produk syariahnya yang sangat beragam. Kesemuanya itu membuat perkembangan industri ekonomi syariah di tanah air menjadi semakin bergairah.

Bermunculannya berbagai bisnis baru syariah, berikut produk-produknya di atas, antara lain, tak lepas dari keluarnya fatwa-fatwa ekonomi syariah dari Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan fatwa-fatwa ekonomi syariah DSN MUI tersebut, maka eksistensi suatu lembaga keuangan syariah (LKS), atau suatu perusahaan berbasis syariah, menjadi dimungkinkan.

Lalu siapa tokoh dibalik layar keluarnya fatwa-fatwa ekonomi syariah tersebut? Ternyata salah satunya adalah Mohamad Hidayat, anggota DSN MUI. Hidayat memang banyak terlibat membidani beragam fatwa ekonomi syariah sejak lama. Sejak awal berdirinya DSN tahun 1995, Hidayat memang selalu terlibat semua perencanaan sampai penggolangan berbagai fatwa ekonomi syariah. "Saya ikut serta dalam pembahasan semua fatwa ekonomi syariah, mulai dari fatwa pertama, yaitu produk tentang mudharabah sampai terakhir keluar fatwa





tentang MLM syariah baru-baru ini,” kata Hidayat kepada *Sharing*, di rumahnya yang apik di bilangan Kebon Nanas, Jakarta Timur baru-baru ini.

Hidayat memang salah seorang senior di DSN MUI. Dan meskipun, keanggotaan di DSN terus berubah, namun posisi Hidayat di DSN MUI tak tergoyahkan sampai kini. Dengan pengalaman dan wawasannya yang luas di bidang ekonomi syariah, serta juga di bidang dakwah, Hidayat kini menjadi salah satu figur penting dalam setiap pembahasan mengenai fatwa-fatwa ekonomi syariah. Pandangan-pandangannya yang kritis, kerap menjadi faktor penting di dalam penyepakatan sebuah fatwa.

Nah, kepada *Sharing* Hidayat banyak bercerita seputar fatwa-fatwa ekonomi syariah dalam wawancara berikut ini;

Mohon diceritakan latar belakang MUI mendirikan DSN, yang kemudian menggulirkan fatwa-fatwa ekonomi syariah?

Seiring berkembangnya perbankan syariah dan juga asuransi syariah di masa itu (sekitar tahun 1995-red), maka MUI perlu mengeluarkan suatu lembaga yang concern mengembangkan fatwa syariah yang akan menjadi acuan bagi industri ini dan juga mengawasi operasional dari lembaga keuangan syariah. Itu latar belakang berdirinya DSN.

Bagaimana teknis lahirnya suatu fatwa ekonomi syariah itu sendiri?

Fatwa yang dikeluarkan dari DSN, salahsatunya memang berdasarkan kebutuhan dari industri syariah ini. Ambil

contoh, suatu fatwa itu ada yang keluar karena diminta oleh suatu lembaga. Lembaga itu hendak me-launching suatu produk, boleh atau tidak? Kalau boleh, akadnya seperti apa? Kemudian kisi-kisinya bagaimana? Kemudian proses itu kita lakukan, mulai dari pengkajian sampai pleno, kemudian kita keluarkan fatwanya.

Dalam kenyataannya, ada fatwa yang ternyata tidak dimanfaatkan oleh industri ekonomi syariah. Ini bagaimana?

Jadi fatwa itu memang terkait kebutuhan dari emiten atau lembaga tersebut. Misalnya, fatwa itu untuk suatu produk multi jasa. Kita keluarkan akadnya, kemudian kita berikan choice. Pilihannya, anda boleh melakukan akad kafalah, atau dengan akad ijarah. Tentunya sangat wajar, kalau misalnya emiten atau lembaga berkata, “Ok, saya memilih akad yang ini, dan tidak mau akad yang itu.”

Baiklah, sejauh mana fatwa itu mengikat suatu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan suatu kegiatan bisnisnya?

Ketika suatu LKS sudah menggunakan fatwa itu untuk produknya, maka ada konsekuensinya, yaitu dia terikat pada pengawasan atau pemeriksaan, yang tak hanya internal di dewan syariah mereka, tapi nanti juga ada pemeriksaan dari BI, kalau itu lembaga bank. Atau pemeriksaan oleh Depkeu, kalau itu asuransi. Atau pemeriksaan oleh Bapepam, kalau itu pasar modal. Dan kepatuhan kepada syariah itu sekarang sudah dalam bentuk regulasi.

Namun sejauh mana kekuatan suatu fatwa dalam hukum negara?

Fatwa di Indonesia itu sudah dipositivasi. Artinya, suatu fatwa yang tadinya sebuah opini hukum syariah dari sebuah lembaga keagamaan yang representatif, yaitu MUI, sekarang sudah terproses menjadi suatu hukum positif. Jadi positivasi dari fatwa tentang bank syariah, bentuknya PBI. Lalu fatwa tentang asuransi syariah, bentuknya peraturan biro asuransi. Sementara, fatwa tentang pasar modal, nanti akan masuk ke peraturan Bapepam.

Kalau kedudukan fatwa dalam hukum Islam?

Dalam *al masodir* (kebenaran sumber) syariah, atau dalam sumber-sumber hukum Islam, yang pertama adalah Al Quran, berikut yang kedua sunnah, lalu yang ketiga ijtimia ulama dan yang keempat qiyas (analogi hukum). Ini yang disepakati. Sementara ada sumber-sumber lain di urutan dibawahnya (meski ini tidak disepakati oleh ulama), adalah qoruf, adat istiadat, ihtisan (mengambil jalan yang baik), kemudian masalah, mursahah dan seterusnya. Dimana posisi fatwa? Karena fatwa itu disepakati oleh DSN MUI, itu bisa dianggap sebagai ijtimia dari DSN. Sehingga mungkin ijtimia-nya tidak global, tapi *region* di Indonesia. Paling tidak itu dianggap sebagai fikih. Namun fiqh itu bisa juga sebagai bagian dari qiyas DSN.

Adakah suatu beban mental pribadi saat merumuskan fatwa ekonomi syariah ini, karena ini menyangkut kemaslahatan banyak orang?

Pertama adalah kami semata-mata memandang amanat ini sebagai bagian dari dakwah, yaitu dakwah ekonomi syariah. Kebetulan DSN menjadi gerbong utama yang membawa isu, kemudian fatwa, sosialisasi, dan juga mengarahkan ini menjadi hukum-hukum positif. Sehingga kami menjadi bersemangat sekali. Selain semangat, yang kedua kami ikhlas, karena kami yakin, bahwa apa yang kami lakukan ini adalah suatu ilmu yang bermanfaat dan amal jariyah, yang nanti Insya Allah akan terus berputar manfaatnya. Yang ketiga, kami di DSN solid sekali, karena kami punya visi dan persepsi yang sama, dari yang senior dan yang muda, sehingga kami tidak merasa letih. Dan kami menikmatinya. Semua fatwa DSN mengacu pada Al Quran dan sunnah. Dan kami sadar betul, bahwa ini adalah amanah, yang pertanggungjawabannya bukan hanya duniawi, tapi juga ukhrowi. Anda bisa bayangkan, kalau fatwa yang dikeluarkan menyenangkan.

Sampai saat ini sudah berapa fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI?

Sekarang ini sudah 63, yang menyangkut fatwa perbankan syariah, mulai dari semua aspeknya, termasuk produk dan operasionalnya. Lalu fatwa asuransi syariah, pasar modal, multi finance, MLM, dan bisnis syariah lainnya.

Adakah perbedaan signifikan dari fatwa ekonomi syariah yang telah kita keluarkan dibandingkan fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh lembaga sejenis di negara-negara Islam lainnya?

Sekarang ini, fatwa dari DSN MUI telah menjadi sumber atau rujukan di lembaga keuangan Malaysia, Singapura, serta Brunei. Sekarang kita menjadi acuan, dan tidak sedikit fatwa kita yang menjadi rujukan di Asia Tenggara ini. Kenapa? Karena fikih di Indonesia dianggap fikih yang mutawasit (ditengah-tengah). Ijtihad kita dianggap lebih diterima oleh berbagai kalangan. Kalau di Malaysia, sebuah fatwa bisa saja hanya berdasarkan dari satu ulama, sementara fatwa kita kan berlapis-lapis prosesnya. Kita dianggap lebih prudential.



Kyai yang suka nonton bola liga Inggris

Mohamad Hidayat adalah seorang anak betawi asli, karena ia lahir di Jakarta pada 3 Mei 1968. Masa kecilnya, banyak ia habiskan di daerah kelahirannya, Kebon Nanas, Jakarta Timur, dengan rajin mengaji. Karena orangtuanya adalah ulama kondang di seputaran Jakarta, yaitu ayahnya, KH Muhammad Kuliin dan ibunya, Hj. Masiah Razak. Sementara Kakek Hidayat sendiri adalah juga seorang ulama kondang di Jakarta, KH Muhammad Tarmun.

Karena sejak kecil sudah pandai mengaji, maka semenjak kelas 3 SMP, Hidayat sudah mulai berdakwah di berbagai mimbar. "Dari orangtua dan kakek saya, kemampuan berceramah menurun kepada saya," katanya sambil tersenyum mengenang.

Selepas SMA, Hidayat mengambil kuliah di fakultas syariah IAIN (sekarang UIN-red) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta. Dari kuliahnya itulah, ia mulai mengenal konsep ekonomi syariah. Ia kemudian belajar hukum bisnis di The A Team, Jakarta pada 1994 dan belajar ilmu perbankan syariah di Islamic Banking BIRTH di Langkawi Malaysia pada 1996. Sementara jalur pendidikan formil lanjutannya ia selesaikan di IPWI, Jakarta (MBA) pada 1999 dan IBLAM, Jakarta (MH) pada 2003. Saat ini, Hidayat tercatat sedang mengejar gelar Doktorat Ekonomi Islam di program pasca sarjana Economy & Islamic Finance di Universitas Trisakti, Jakarta.

Nah, dengan dua latar belakang yang kuat di atas, yaitu bekal pendidikan agama dari orangtua dan kuliahnya, serta bekal pendidikan ekonomi syariah yang ditekuninya selama ini, membuat Hidayat kini menjadi tokoh yang dikenal sebagai ulama (dai), sekaligus juga pakar ekonomi syariah. Karena itu, dalam ceramah-ceramahnya sebagai dai, ia kadang kala turut pula memperkenalkan ilmu ekonomi syariah kepada para pendengarnya. Sementara saat ia berbicara dalam forum atau mimbar ekonomi syariah, ia bisa menjelaskan ilmu ekonomi syariah, lengkap dengan dalili-dalil agamanya dengan sangat fasih.

Karena kiprahnya dan komitmennya yang kuat selama ini sebagai salah seorang tokoh ekonomi syariah di tanah air, Hidayat kerap dipercaya memberikan masukan kepada orang nomor satu di negeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengenai konsep-konsep ekonomi syariah. Sebagai dai pun, ia kerap kali berceramah di lingkungan istana, maupun departemen pemerintahan lainnya.

Sebagai cendekiawan muslim, Hidayat juga cukup rajin menulis buku. Buku terbarunya "An Introduction to Sharia Economic" yang akan keluar sebentar lagi, rencananya Presiden SBY sendiri yang akan memberikan kata pengantarnya. "Insya Allah," ujar Hidayat sambil tersenyum.

Suami dari Hj. Connie Utari dan ayah dari Muhammad Harusn Al Rasyid (kelas 1 SMP) dan Fayruz Zabadhia Nasya (kelas 5 SD) ini, ternyata senang berolahraga bulutangkis. "Kalau saya bersama istri dan anak-anak bepergian ke luar kota, untuk acara dinas, ataupun liburan, pasti tak lupa kami membawa raket. Kami pun selalu bermain bulutangkis untuk olahraga," jelas Hidayat.

Namun, yang unik, Hidayat ternyata juga suka olahraga sepakbola. "Suka nontonnya, ya, bukan bermainnya. Saya suka menonton liga Inggris di televisi," katanya sambil tertawa menutup perbincangan dengan *Sharing*.

■ YS

■ YS

Kurban Menjadi Perekat Hati

Tidak ada suatu **amalan yang paling dicintai oleh Allah** dari Bani Adam ketika hari raya Idul Adha selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat (sebagai saksi) dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban telah terletak di suatu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Karena itu, **bahagiakan dirimu dengannya.**"

(HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim)

Di kesempatan yang ke 16 kali sejak lima belas tahun yang lalu, Tebar Hewan Kurban telah menjadi salah satu saluran kebajikan untuk kalangan dhuafa di setiap momentum Idul Adha. Rutinitas ini tentu saja dinanti-nanti oleh mereka yang memang membutuhkan, khususnya mereka yang berada di pelosok-pelosok negeri yang mungkin jarang terjangkau oleh para pekurban. Mereka ada di daerah terpencil dari Aceh hingga di pedalaman Irian Jaya.

Semburat cahaya bahagia, terkadang di balut oleh air mata keharuan, daging kurban yang barangkali tidak seberapa bagi Anda tetapi begitu berarti bagi mereka. Namun, hanya sebatas itulah makna Kurban yang ingin kita berikan pada mereka? Berulangkali—tiap tahun kita tunaikan, dan sekejap itu pula dirasakan manfaatnya.

Kurban mestinya bukan hanya menjadi ajang kebajikan pendek, tapi lebih tinggi dari itu bisa menjadi perekat cinta kasih dan jalinan hati antara kita. Antara Anda Pekurban dengan para penerima kurban, para mitra di pelosok dan demikian pula dengan kami selaku penyelenggara. Kedekatan seperti inilah yang diharapkan mampu memberikan manfaat kebajikan lebih panjang dan menerus melalui program-program pemberdayaan yang diberikan kepada mereka para dhuafa.

Kedekatan hati yang seperti ini pula yang akan kita bangun bersama melalui Tebar Hewan Kurban tahun ini 1430 H/ 2009 M. Melalui program ini, diharapkan tengadah tangan mereka disuatu saat nanti akan berbalik menjadi tangan yang siap membantu dan memberi. Kurban sedekat hati semoga menjadi perekat hati diantara kita.

Nilai Lebih Program Tebar Hewan Kurban

- Memudahkan pekurban dari kesulitan memilih hewan kurban yang sesuai syariah
- Hewan kurban didistribusikan ke kantong-kantong kemiskinan, daerah bencana di seluruh Indonesia
- Meningkatkan pemberdayaan peternak di daerah-daerah.
- Memberi energi positif hikmah silatulukhuwah dari kaum muslimin perkotaan ke daerah – daerah.
- Membantu kegiatan syiar dan dakwah Islam melalui Kurban di daerah – daerah

Kapan Sebaiknya Kurban di Tunaikan?

Hewan kurban yang Anda amanahkan pada kami insyaAllah akan didistribusikan ke berbagai daerah di pelosok Indonesia, yang tidak jarang membutuhkan waktu cukup panjang untuk sampai dilokasi karena jauh dan sulitnya medan. Melalui dukungan mitra di daerah, kurban Anda akan sampai pada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Oleh karenanya, akan sangat baik jika penyaluran hewan kurban Anda sedini mungkin dilakukan. Disamping penunaian ibadah kurban memang tidak harus di 3 (tiga) hari Tasyrik. Semakin cepat kurban Anda kami terima akan semakin cepat pula kurban tersebut sampai pelosok dan dilokasi yang tepat.

Harga Hewan Kurban

- Kambing/domba Rp. 888.000,- berat hidup : \pm 25 s/d 27,5 Kg
- Sapi Rp. 6.550.000,- berat hidup \pm 225 s/d 300 Kg.

Harga tersebut sudah termasuk:

- Operasional pengiriman
- Pemotongan Hewan
- Publikasi nama Pekurban di HU republika dan Website : www.tebarhewan.or.id
- Layanan jemput (minimal 3 ekor kambing)
- Buku Kurban
- Laporan kurban dikirim langsung ke alamat pekurban
- Foto hewan kurban sebelum dan saat dipotona

■ Fitria Nahdi

Modal Cekak Bukan Halangan

Bukan hanya sebagai pelengkap berbusana, kini aksesoris sudah menjadi bagian dari penampilan seseorang. Membacanya sebagai peluang, ia menerjuni bisnis ini kendati hanya bermodal Rp 300 ribu!



Perubahan mode yang begitu pesat di bidang fashion, telah mampu melahirkan ide-ide kreatif. Salah satunya adalah aksesoris wanita, yang merupakan teman setia dalam berbusana. Berbagai jenis aksesoris seperti cincin, gelang, kalung, anting hingga ikat pinggang dengan desain unik kini mempunyai daya pikat tersendiri; banyak diburu dan dikoleksi kaum Hawa.

Bagi Fitria Nahdi, ceruk ini dipandang sebagai peluang bisnis. Maka, perempuan yang sebelumnya telah mapan berkarier di sebuah perusahaan asing inipun memutuskan untuk mengibarkan benderanya sendiri, "Nahdi Jewellry". Ia meninggalkan kariernya dan mantap ingin membesarkan usahanya. Urusan mendesain perhiasan, ia cukup berpengalaman.

Keputusannya tak salah. Nahdi Jewellry kini kian berkibar. Beragam pameran diikuti dan kreasinya kerap diborong habis. Ia mempunyai pelanggan tetap yang kebanyakan adalah pada ekspatriat.

✧ BELAJAR SECARA OTODIDAK

Awal persinggungan Fitria dengan dunia aksesoris diawali saat ia masih menjadi wanita kantor. Perusahaan tempatnya bekerja menuntutnya untuk berpakaian rapi. Ia melengkapi penampilannya dengan berbagai jenis aksesoris. "Yang tidak mahal namun tampak cantik," ujarnya.

Ternyata penampilannya itulah yang mengawali usahanya. Aksesoris yang dikenakannya menarik perhatian para ekspatriat di kantornya hingga ada yang ingin membeli sebagai buah tangan pulang ke negaranya.

Ia pun menjadi "pedagang perantara". Ia membeli dari toko langganannya untuk dijual kembali ke teman-temannya yang berminat.

Makin lama, pesanan makin banyak. Ia pun berpikir untuk memproduksi sendiri. "Saya pikir, ini memiliki nilai jual. Saya tertarik untuk membuatnya sendiri," ujarnya kepada *Sharing*. Ia pun otodidak belajar. Namun tak perlu waktu lama, ia memutuskan untuk total menerjuninya.

✧ TAK ADA BISNIS INSTAN

Ditemui di kediamannya yang juga merupakan tempat produksi, ia banyak berbagi cerita mengenai usahanya yang sudah berjalan selama lima tahun. Saat ditanya adakah rintangannya, ia sambil tergelak menjawab, "Banyak!"

Menurutnya, tak ada usaha yang berjalan tanpa rintangan. "Itu adalah sebuah proses, tidak ada bisnis yang instan," tuturnya. Namun, kata dia, sikap optimis





“menyelamatkan” usahanya.

Ketika memulai usaha modal awalnya adalah sebesar Rp 300 ribu. Modal itu didapat dari penjualan kalung mutiara yang ia buat sendiri. Ia lalu membelanjakannya untuk membeli bahan-bahan pembuat aksesoris baru yang sedang *in*.

Saat itu, mutiara sudah banyak yang meniru. Maka ia pun berganti materi. “Intinya, buatlah produk seunik mungkin, lalu biarkan pasar yang memilih,” tambahnya.

Didampingi satu orang asisten yang membantunya menggarap bisnis tersebut, ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama tim. Ia mengaggap pegawainya sebagai mitra yang harus diperhatikan kesejahteraannya.

Ia kerap memberi bonus pada para pegawainya semisal tawaran modal kerja atau hadiah umrah. Tawaran modal diberikan bagi karyawannya yang ingin bekerja mandiri. Saya ingin turut serta membuka peluang kerja bagi siapa saja yang ingin,” ujarnya.

✳ BERBURU BAHAN HINGGA MANCA NEGARA

Untuk memenuhi kebutuhan produksinya, ia membeli bahan-bahan produksi di berbagai tempat, salah satunya di Rawa Bening, Jakarta Timur. Ia cenderung mengumpulkan berbagai jenis bahan produksi terlebih dulu, baru kemudian merangkainya dengan ide-ide kreatifnya.

Selain itu ia juga berburu bahan produksi ke luar kota seperti Bali, Lombok hingga keluar negeri saat mengikuti berbagai pameran. “Selalu saya sempatkan keluar di sela pameran untuk melihat yang khas di negara itu,” tambahnya.

Selain dari batu-batuan, bahan dasar yang digunakan untuk permak-perniknya berasal dari perak, tembaga, kuningan. Untuk

mendapatkan aksesoris yang sesuai dengan desainnya, ia mereproduksi hingga ke daerah asalnya.

✳ KUNCINYA PADA KREATIVITAS

Ia berbagi rahasia sukses bisnisnya, yaitu kreativitas yang tinggi supaya aksesorisnya tetap digemari. Selain itu, jangan berpuas dengan satu dua model saja, tapi senantiasa berkreasi. “Jadi waktu orang sudah mulai meniru, saya sudah mengganti model,” jelasnya.

Selain itu, di dalam kreasinya itu, diselipkan bahan-bahan yang tidak pasaran. “Sehingga ada sesuatu yang beda di situ,” paparnya.

Selain itu untuk menghasilkan aksesoris yang diminati, ia mempelajari tren yang tengah digemari. Meskipun merasa apa yang dibuatnya itu tidak dibuat dari bahan yang mahal, misalnya, namun orang melihat dari keunikan dan usur seninya. “Saya lihat sejauh ini orang bangga mengenakan produk saya,” tambah Fitria.

Ia juga kerap memadupadankan unsur kebudayaan dalam menghasilkan aksesoris. Misalnya, beberapa *item* aksesoris yang dijualnya, lahir dari beberapa kebudayaan daerah di Indonesia. Di antaranya adalah dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Padang, Aceh, Jambi, Batak. Banyak yang bilang, di situlah kelebihan desain Fitria: ia memasukkan unsur kebudayaan dalam desainnya.

Fitria berharap, ke depan usahanya ini dapat berkembang semakin besar dan berkembang untuk dapat menghidupi orang banyak dengan membuka lapangan pekerjaan. Ia menyebut bisnisnya ini sebagai bisnis yang unik. “Dijual murah tak laku, dijual mahal orang malah berebut,” tuturnya sambil tertawa renyah.



Fitria Nahdi

Di usia kelima bisnisnya, ia memiliki satu mimpi yang belum terwujud, yaitu sebuah galeri sendiri. “Saya ingin meraihnya secara bertahap,” ujarnya.

✳ GEMAR BERBAGI

Selain menjual, ia juga suka berbagi cerita kepada calon konsumen. Ia tidak ingin benda-benda yang di jualnya, hanya diam teronggok menghiasi lemarnya saat pameran. “Selain menjual, saya sambil menceritakan latar belakang aksesoris tersebut,” tambahnya.

Misalnya saja tentang kreasi perhiasan yang diilhami dari *mamuli*, benda dari logam (bisa emas, perak, atau tembaga) berbentuk vagina. Menurutnya, *mamuli* adalah dan biasanya dijadikan mas kawin yang diserahkan pihak perempuan kepada mempelai laki-laki di Nusa Tenggara Timur. “Saya menempa langsung logam itu di Nusa Tenggara Timur (NTT),” tambahnya.

Baginya, meski pengunjung hanya sekedar bertanya, ia sudah cukup senang. “Karena saya membuatnya supaya masyarakat tahu bahwa itu merupakan bagian dari keragaman budaya kita,” tambahnya.

Selain itu ia juga berbagi ilmu dengan mengajarkan cara membuat aksesoris secara cuma-cuma di kediamannya. Anda berminat?

■ VA



Jelang dan ketika musim haji, pedagang oleh-oleh haji di Jakarta dan Bandung mampu meraih omset rata-rata dari Rp 5Juta per hari hingga Rp400 Juta per bulan.

Papan bertuliskan 'Menjual Perlengkapan Haji' terpampang di depan jongko Aisyah Collection, Los D, Blok A, Lantai B1, Pasar Tanah Abang Jakarta. Di samping papan, terdapat pemilik jongko, Hj Nursinah. Dia terlihat sibuk meladeni beberapa pesanan

"Kalau musim haji, biasanya yang ramai dibeli sajadah dan tasbih," ujar Nursinah. Ada juga yang membeli mukena dan sarung, namun jumlahnya lebih kecil dibandingkan Ramadhan. Meski demikian, dia menerima semua pemesanan. Konsumen tinggal memilih, beradu harga dan membungkusnya untuk dibawa pulang.

Harga yang ditawarkan beragam. Misalnya sajadah, dijual dengan harga Rp 20 ribu-Rp 35 ribu per buah. Lalu mukena Rp 40 ribu-Rp 75 ribu per buah, sarung Rp 30 ribu-Rp 50 ribu per buah, dan tasbih Rp 2.500-Rp 15.000 per buah. Bagi konsumen yang

oleh haji. Barang yang dijual didominasi buatan Turki, India serta Cina. Yang berbeda hanyalah paket diskon dan omzet yang diterima si pemilik toko.

"Kemarin-kemarin ada yang beli cukup besar sekitar Rp 10 juta," ujar Betri Oktaviani, penjaga toko Putri Bungsu, Blok A Los D, Lantai B1, No 37, Tanah Abang. Dia berasal dari Karawang, Jawa Barat. Betri mengaku, konsumennya tak hanya berasal dari Jakarta, namun seluruh Indonesia. Biasanya mereka datang dan membawa beberapa contoh, lalu melakukan pemesanan dan membayar uang muka.



Musim **Haji** Datang, Untung Menjelang

oleh-oleh haji, dari mulai menawarkan barang hingga paket diskon.

❖ MERAUP UNTUNG DI HILIR

Selama musim haji seperti sekarang, Nursinah memiliki kegiatan baru yakni meladeni pemesanan oleh-oleh haji. Oleh-oleh yang dimaksud adalah oleh-oleh yang biasanya dibawa jamaah haji sepulangnya beribadah di Mekah. Ada beberapa oleh-oleh yang biasanya dibagikan kepada saudara, tetangga dan handai tolan. Mulai dari sajadah, mukena, tasbih, sarung hingga makanan khas Arab seperti korma, kacang-kacangan dan tidak lupa air zamzam. Bagi sebagian calhaj, mereka membeli oleh-oleh langsung dari Mekah. Namun ada pula calhaj yang membeli barang yang sama di Indonesia, diantaranya di Tanah Abang, seperti di Aisyah Collection.

membeli dalam jumlah besar, Nursinah akan memberi diskon. Namun besarnya, tergantung dari jumlah uang yang dibelanjakan konsumen. Semakin besar uang yang dikeluarkan, semakin besar pula diskonnya.

"Belinya beda-beda, ada yang di atas Rp 5 juta, ada juga yang ngeteng datang beberapa kali. Sekali datang paling beli Rp 500 ribu," cetus Nursinah. Yang pasti, pemesanan sudah mulai ramai. Setiap hari, dia melayani konsumen oleh-oleh haji. Jika dikalkulasikan, peningkatannya hampir sama ketika Ramadhan, naik sekitar 50 persen.

Tak hanya Nursinah yang menjual perlengkapan ibadah haji. Jika kita berjalan di lantai B1 Blok A Tanah Abang, akan terlihat beberapa toko yang menjual oleh-

Betri mengaku tidak tahu berapa pendapatan yang diperoleh selama musim haji. Namun yang pasti setiap hari selalu ada pemesanan oleh-oleh haji dengan jumlah uang yang dibelanjakan rata-rata Rp 5 juta-Rp 10 juta.

❖ OMSET PER BULAN BISA TEMBUS RP400 JUTA

Peningkatan penjualan tak hanya dirasakan oleh pedagang di Tanah Abang, pusat perlengkapan muslim dan oleh-oleh haji terbesar di Indonesia, Aarti Jaya meraup keuntungan yang besar selama musim haji. Kepala Cabang Aarti Jaya Citarum Bandung, Hadi Nurzaman mengatakan omzet selama musim haji bisa mencapai Rp 400 juta per bulan, meningkat tajam dibanding bulan sepi penjualan (Februari-Maret 2009) sekitar Rp 50 juta, atau naik

"Kepala Cabang Aarti Jaya Citarum Bandung, Hadi Nurzaman mengatakan omzet selama musim haji bisa mencapai Rp 400 juta per bulan, meningkat tajam dibanding bulan sepi penjualan (Februari-Maret 2009) sekitar Rp 50 juta, atau naik 700 persen. Namun dibanding bulan biasa meningkat 10-20 persen".



"Dari harga asal di Tanah Suci, toko ini menaikkan harga antara 90-100%. Dari harga tersebut, dikurangi biaya transportasi, administrasi, dan sebagainya, Taksin mengaku hanya memperoleh untung antara 20-25%".

700 persen. Namun dibanding bulan biasa meningkat 10-20 persen.

"Itu peningkatan di toko Citarum. Aarti Jaya memiliki lima toko di seluruh Indonesia dan rata-rata omzet tiap toko hampir sama," tutur Hadi. Dikatakannya, penjualan musim haji berlangsung selama tiga bulan, yakni sebulan sebelum, ketika berlangsung, dan sebulan sesudah. Melihat tren penjualan tiap tahun, penjualan akan semakin meningkat di sebulan sesudah pelaksanaan haji.

Untuk meningkatkan penjualan, Aarti Jaya menggunakan beberapa strategi yang intinya, tidak mencari keuntungan semata, namun berkah buat penjual maupun pembeli. Makanya meskipun beli di toko, harga barang di Aarti Jaya sama halnya dengan pasar. Bahkan, disini konsumen sangat dimanjakan dengan beragam pilihan dan konsultasi gratis.

Barang yang dijual meliputi sajadah dari Turki, India, Belgia dan Saudi. Lalu pashmina, sorban Turki/India, tasbe (coca, kristal, tulang onta, dan lain-lain), gantungan kunci khas Arab, hiasan kristal/keramik, tempat pulpen, celak-celak, lisptik hare, pacar kuku, dan minyak wangi. Adapun makanan, Aarti Jaya menyediakan kurma Madinah, kurma Iran, kacang Arab, kacang Pistachio, kue Maamoul, air zam-zam, kismis Iran dan kismis Jumbo, kurma coklat, dan lain-lain. Semua oleh-oleh bisa dibeli secara eceran atau jumlah besar. Bagi yang suka dengan kemasan elegan, disini konsumen bisa membeli dalam bentuk paket souvenir. Keuntungannya, konsumen tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk kemasan cantik tersebut.

Selain melayani pembelian calhaj, Aarti Jaya juga sering menerima pesanan dari penjual dadakan. Karena selama musim haji, biasanya ada yang menjual perlengkapan haji dadakan.

* BEKERJASAMA DENGAN PENDUDUK TANAH SUCI

"Air zam-zam di Tanah Suci memang free, pembeli hanya mengganti ongkos kirim ke sini saja", ujar Manajer Oleh-Oleh Haji (<http://oleholehaji.com>) Muhammad Taksin kepada *Sharing* di Jakarta.

Air zam-zam AL Rafie adalah salah satu yang disediakan toko ini. Dikemas dalam botol seukuran 330 ml, pembeli dapat menebusnya seharga Rp12.500 per botol. Sebagai salah satu oleh-oleh paling populer dari Tanah Suci, zam-zam tidak mudah untuk membawanya dalam jumlah banyak.

Menurut Taksin, jika musim haji, mata air-mata air zam-zam ditutup untuk umum. Peruntukkannya khusus untuk jemaah haji di Makkah dan Madinah. Bekerjasama dengan penduduk setempat, Oleh-Oleh Haji mengumpulkan air zam-zam ketika tidak sedang musim haji.

Kurma lapis coklat, kurma biasa, madu hadramaut, serbuk kurma, buah zaitun kaleng, peci, Al quran, dan sebagainya tersedia di toko ini. Semua dijual tentu dengan harga lebih mahal jika kita membelinya di Tanah Suci. Namun, klaim Taksin, tokonya tidak berani menjual lebih mahal dibanding penjual sejenis yang betebaran di pusat perdagangan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

* HANYA AMBIL UNTUNG 20-30%

Dari harga asal di Tanah Suci, toko ini menaikkan harga antara 90-100%. Dari harga tersebut, dikurangi biaya transportasi, administrasi, dan sebagainya, Taksin mengaku hanya memperoleh untung antara 20-25%. Untuk pemesanan, bisa datang langsung ke cabang-cabang toko, memesan via telepon atau internet. Untuk pemesanan via telepon, minimum Rp250 ribu dibebaskan biaya antar. Di bawah itu dikenakan biaya antar.

Oleh-oleh Haji awalnya adalah toko biasa di Jl. Kh. Abdullah Syafe'i No.50A dekat Mesjid Attahiriyah Kampung Melayu Jakarta Timur. Toko ini menyediakan barang-barang dari Arab Saudi.

Tujuannya adalah menyediakan oleh-oleh haji dan umrah bagi jemaah haji yang telah kembali ke Indonesia dan merasa apa yang dibawanya dari tanah Suci masih kurang. Semua tahu, tidak sekenakanya orang bisa membawa bagasi di pesawat terbang sepulang haji, ada batasan berat.

Sekitar 1,5 tahun lalu, manajemen berpikir untuk memperluas pasar dan layanan. Jadi,

tidak hanya jemaah pulang haji dan umrah, yang pernah ke sana dan ingin merasakan kembali makanan minuman atau ingin memakai busana khas Tanah Suci bisa juga mendapatkannya.

Tidak hanya itu, aku Taksin dalam perkembangannya, masyarakat umum juga mulai membeli di tokonya. Pelayanan pun ditingkatkan, yang tadinya konvensional, kini bisa dipesan lewat internet dan telepon.

■ RS/IA

■ OLEH-OLEH HAJI YANG UNIK

Apa saja oleh-oleh haji? Kurma, air zam-zam, kacang Arab, madu Arab, peci, alat ibadah, itu biasa. Perluasan jenis buah tangan haji biasanya mencakup, kurma lapis coklat almond, buah zaitun kaleng, daun mint/nana, serbuk korma, kismis, dan sebagainya.

Memang, untuk jenis makanan, kebanyakan berasal dari Arab, namun untuk alat ibadah, seringkali sebenarnya berasal dari Tanah Air lalu di ekspor ke Arab Saudi atau cukup ke toko-toko penjual oleh-oleh haji di Tanah Air.

Salah satunya, dan ini agak unik adalah sajadah batik asli Pekalongan. Fariz Craft di Jalan HOS Cokroaminoto, Pekalongan, Jawa Tengah menjual produk ini. Sajadah ini menggabungkan kreatifitas budaya Indonesia dengan budaya ibadah dalam Islam. Menurut situs resmi Fariz Craft di <http://farizcraft.com>, sajadah batik Pekalongan dijual grosir dengan harga tidak dicantumkan. Namun jenis sajadah batik lainnya disebutkan harga per buahnya Rp50 ribu.

Untuk anak, ada juga oleh-oleh hajinya, misalnya tas onta dengan berbagai jenis, slempang, gendong, dan jinjing. Hanif Moslem, dari Nizimar Group, distributor oleh-oleh haji di Jakarta menyediakan tas onta yang dijual seharga Rp54 ribu. Tentu saja, ini buatan lokal.



Prof Acep Djazuli:

"Kelola Dana Haji dengan Ekonomi Syariah"

Haji sebagai rukun Islam yang kelima ternyata bukan saja bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan nilai-nilai spiritual pelakunya, namun juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Apakah kita sudah optimum dalam memanfaatkan potensi ekonomi umat? Karena justru umat Islam lebih banyak menjadi 'pasar' bagi barang-barang Amerika, Cina, dan Jepang yang notabene bukan Islam.

Mari kita mencoba menghitung dan mencermati sekaligus membayangkan. Jika setiap tahunnya ada 215 ribu calhaj dengan 16 ribu diantaranya haji plus. Jika diambil rata-rata setiap calhaj mengeluarkan ONH (regular maupun plus) sebesar Rp 30 juta, maka akan mendapat angka Rp 6,45 triliun. Angka ini akan membengkak hingga Rp 7,25 triliun bila setiap jamaah membawa bekal minimal 500 dolar AS. Dari kalkulasi sederhana ini kita mendapatkan, pengeluaran setiap jamaah diperkirakan Rp 35 juta. Jika umat Islam yang menunaikan ibadah haji ada 2,5 juta, berapa besar transaksi ekonomi yang terjadi? Angka fantastis ini akan sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik. Lalu, seperti apa sebaiknya Indonesia mengelola uang haji tersebut? Untuk mengupasnya, wartawan Sharing, Reni Susanti mewawancarai pakar Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Prof Acep Djazuli. Berikut petikannya:

Bagaimana sebaiknya mengelola potensi ekonomi haji ini? Idealkah dengan cara sekarang, pengelolaan tetap oleh pemerintah?

Memanfaatkan dana agar lebih maslahat untuk kepentingan umat, tentunya sangat baik. Namun tentunya harus hati-hati. Jangan sampai kasus-kasus dana haji zaman dulu kembali berulang. Zamannya Soekarno, ada swasta yang mengelola dana

haji. Mereka akan memanfaatkan dana haji untuk pembelian kapal, tapi ternyata kapal tidak pernah ada sedangkan uangnya juga hilang entah kemana. Penyaluran uang haji oleh pemerintah melalui deposito lebih baik daripada mereka diam saja. Asalkan deposito yang digunakan berbasis ekonomi syariah. Karena selama ini, masih menggunakan konvensional. Deposito secara syariah lebih bagus meskipun keuntungan bagi hasilnya bisa lebih kecil dibanding bank konvensional.

Saya tidak bisa begitu saja setuju atau tidak dengan pengelolaan yang sekarang, karena yang terpenting adalah pengawasan dana haji yang dilakukan dengan jujur. Kalau pun ingin mengembangkan dana dengan lebih baik harus dikelola dengan baik pula melalui konsep Islam. Bentuk pengawasan terhadap perbankan atau pengelola keuangan harus dipertegas dengan Undang-undang, baik mengenai investasi maupun sanksi bagi orang yang tidak bertanggungjawab.

Ada belasan sektor industri, manufaktur, perdagangan, dan jasa yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji. Diantara industri yang terlibat dalam perjalanan haji, ada transportasi, makanan, perhotelan, dan sebagainya. Bagaimana menjadikan ini sebagai peluang bagi kita?

Dalam hukum Islam yang terpenting adalah *hafidun harimun*. Orang itu mampu *hafidun* yakni memelihara dan *hariimun* yakni profesional, termasuk di dalamnya pengawasan dan kejujuran. Berbicara tentang investasi, kita masih memiliki kelemahan. Misalnya sekarang menghimpun dana, lalu tidak dikelola dengan baik. Akhirnya malah kacau dan menjadi kapok. Untuk itu, perlu pengorganisasian yang lebih baik, makanya dipilih pemerintah. Walaupun menurut saya pemerintah belum optimal karena belum menggunakan ekonomi syariah. Berbeda

dengan Malaysia. Dari pengalaman saya beribadah haji, pengelolaan Malaysia seperti fasilitas, jauh lebih baik dibanding Indonesia.

Indonesia adalah pengirim jamaah haji terbesar. Apa semestinya yang bisa dikelola dan diambil manfaat dari fakta ini?

Sebenarnya, manfaat yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat. Jika dikaitkan dengan manusia sebagai *kholifatullah fil ard*, yang memakmurkan kehidupan, kemakmuran itu ada yang secara material dan spiritual. Untuk kemakmuran material, digunakanlah ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Indonesia harus sudah mengoptimalkannya. Karena ekonomi syariah peluangnya cukup besar, bahkan diakui di negara-negara non muslim. Seperti di Inggris sudah berdiri bank syariah.

Mengapa kita tidak bisa berbuat seperti Tabung Haji Malaysia, yang mewajibkan penyetoran ONH 5 tahun ke muka. Jika pemerintah bisa menerapkan seperti Malaysia, maka ada kemungkinan ONH bisa lebih kecil, dan sektor perbankan dapat berbuat lebih banyak dengan adanya dana murah, karena tak kurang dari Rp 6,45 triliun dana umat akan masuk setiap tahunnya. Bagaimana anda melihat ini?

Banyak faktor yang menjadi penyebab. Sama halnya dengan dulu orang Malaysia datang ke Indonesia untuk belajar, sekarang terbalik, kitalah yang belajar kesana. Begitupun dengan persoalan haji. Di lihat dari kesungguhan, orang kita kurang profesional. Belum lagi kebocoran-kebocoran (korupsi, red) yang terjadi. Indonesia itu rawan kebocoran sehingga memerlukan badan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segala. Berbeda dengan Malaysia, kalau pun ada kebocoran, jumlahnya tidak sebesar di Indonesia. Tapi saya melihat, pemerintah sedang mencoba untuk memperbaiki itu semua. ■ Ren

"Penyaluran uang haji oleh pemerintah melalui deposito lebih baik daripada mereka diam saja. Asalkan deposito yang digunakan berbasis ekonomi syariah. Karena selama ini, masih menggunakan konvensional. Deposito secara syariah lebih bagus meskipun keuntungan bagi hasilnya bisa lebih kecil dibanding bank konvensional".

Pagelaran karya para IKM
(Industri Kecil Menengah) dalam

TREND FASHION 2010

perpaduan tren global dengan inspirasi lokal
yang akan digelar melalui acara

FASHION SHOW

7 NOVEMBER 2009
PHOENIX HOTEL
JL. JEND. SUDIRMAN
YOGYAKARTA
17.00 WIB

diselenggarakan oleh:



organized by:

BDADesign

Omus, Si “Jabang Bayi” Dagadu

Ingin merengkuh lebih luas lagi ceruk pasar, Dagadu mencoba peruntungan di segmen busana Muslim. Sejumlah jurus dimainkan.

Nama Dagadu sangat melekat dengan kota Yogyakarta. Produk cinderamata alternatif yang dulu dirintis oleh 25 mahasiswa Fakultas Teknik Arsitektur UGM ini terus bereksplorasi menciptakan kreasi. Celah pasar Muslim kaum muda pun digarap. Omus, demikian brand yang menampilkan produk T-shirt dengan pesan kebajikan yang bertema ajaran Islam, ternyata mendapat sambutan bagus dari konsumen. Rencananya, produk Omus akan dipasarkan di berbagai kota besar di luar Yogyakarta.

Dengan motto “Muslim Muda Merdeka”, yang menjadi target pasar adalah kaum muda berusia 15 hingga 25 tahun. Jika selama ini busana Muslim konotasinya adalah formal, maka Omus menawarkan busana Muslim alternatif yang berkesan aktif, energik, dinamis, gaya, modis dan tetap menjaga kesopanan. Pesan kebajikan yang disampaikan di T-shirt pun sangat inspiratif.

Direktur PT Aseli Dagadu Djokdja (ADD) Ahmad Noor Arief tidak menyangka jika Omus akhirnya mendapat sambutan yang luar biasa. Produk busana Muslim untuk anak muda berbahan kaos memang sudah banyak bermunculan. Namun, yang sudah ada masih pada pendekatan fashion, belum pada muatan dalam bentuk tulisan dan pesan





di kaus. Nilai lebih berupa grafis yang bermakna nilai kebajikan itulah yang membedakan Omus dengan produk lainnya.

“Omus mencoba menyampaikan pesan kebajikan, pesan moral. Pesan-pesan itu terinspirasi dari Alquran dan Hadis. Kita tidak menyampaikan secara *letterlijk*, tapi secara inspiratif. Misalnya, senyum itu ibadah, kita menyampaikan dengan kalimat *share your smile*,” ujar ayah empat anak ini.

Semangat Muslim oblong
Konsep Omus sendiri digodok mulai tahun 2005, yang saat itu belum diberi nama. T-Shirt dengan pesan nilai kebajikan melalui desainnya ini pertama kali diperkenalkan ke luar pada saat acara muktamar Muhammadiyah di Malang. Konsumen juga

anak muda yang aktif dan dinamis. Warna-warna yang dipilih juga sesuai selera anak muda. Model yang ditawarkan juga selalu mengikuti tren yang sedang *in*. Beberapa contoh pesan kebajikan yang disampaikan antara lain *Learn Work Pray, Knockin' o Heaven's Door, Fight Against Myself, No Earth Without Heart*, dan masih banyak pesan lain yang membawa inspiratif.

Karena sambutan yang bagus, maka pada tahun 2007 digarap lebih serius dengan penataan produk, evaluasi produk, mempermanis logo dan model yang dibuat lebih variatif. Jika sebelumnya modelnya hanya berupa T-Shirt berlengan panjang dengan kerah model baju koko, dibuatlah kaus lengan pendek yang dilengkapi dekker, dengan tetap disertakan pesan kebajikan. Tentu saja yang berlengan panjang juga tetap dibuat.

didesain untuk dipasarkan ke seluruh Indonesia. Kita membaca pasar, produk Omus akan bisa diterima karena produk kami memang berbeda,” papar Arif yang memang asli Yogyakarta ini.

Omset penjualan produk Omus, kata Arif dari waktu ke waktu mengalami trend peningkatan, yakni sebesar 20 – 30 persen pertahun. Dari sisi jumlah, dalam setahun bisa terjual 10 ribu helai. Harga jual produk Omus bervariasi, mulai dari Rp 75 ribu hingga yang paling mahal Rp 150 ribu. Nilai omset Omus masih di bawah 10 persen dibanding nilai total omset Dagadu karena produk ini masih baru.

Silaturahmi bisnis

Sejak awal Dagadu dirintis tahun 1990-an, Arif dan teman-temannya menginginkan bahwa apa yang mereka lakukan bisa membawa dampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Hal

Omus sendiri berasal dari singkatan kata oblong muslim, karena memang semua produk Dagadu adalah kaus oblong.

mulai diperkenalkan melalui gerai-gerai Dagadu yang ada. Ternyata sambutan pasar positif.

Omus sendiri berasal dari singkatan kata oblong muslim, karena memang semua produk Dagadu adalah kaus oblong. Nama ini pun sebenarnya tidak sengaja dibikin namun sebutan internal di Dagadu untuk membedakan produk oblong yang lain. Karena mudah diingat, akhirnya Omus dijadikan *brand*. “Waktu pertama dibuat, kita meyebutnya omus....., omus. Akhirnya nama itu yang kita pakai,” ujar Arif yang lahir 8 Januari 1969 ini.

Desain dan model yang diproduksi memang sangat berkesan anak muda. Bahannya terbuat dari bahan kaus, yang tentu nyaman dikenakan oleh

Tak hanya di Yogyakarta
Launching resmi Omus dilakukan pada awal tahun 2009, dengan dibuka gerai di Jalan Kaliurang KM 5,6 No 3/79 Yogyakarta. Omus juga bisa didisplay di gerai Jalan Pakuningaratan 15 Yogyakarta. Jika selama ini produk Dagadu tidak dijual di luar kota Yogyakarta, berbeda dengan Omus. Rencananya, akan dibuka gerai Omus di berbagai kota besar di Indonesia. Kota yang pertama disasar adalah Malang karena kota ini juga kota pendidikan, dengan segmentasi anak muda dan mahasiswa yang cukup banyak berjilbab. Direncanakan akhir tahun ini rencana tersebut akan diwujudkan. Menyusul kemudian kota Jakarta, rencananya di sekitar Margonda Depok dan Semarang. “Sejak awal, Omus memang

itu yang terus dijaga, yang saat ini sudah memasuki usia ke 16 tahun. Mereka menjaga agar tidak terjebak pada kerja yang sekedar mengumpulkan materi.

Bentuk kepedulian mereka antara lain dengan tetap mempertahankan mitra kerja untuk mendukung produksi mereka. Ada sekitar 25 mitra kerja yang mereka libatkan. Jika dihitung secara bisnis, akan lebih menguntungkan jika memproduksi sendiri dengan membuat pabrik. Namun hal ini tidak dilakukan. Para mitra kerja ini mengerjakan penjahitan, sablon, dan bordir. Para mitra kerja ini bisa mempekerjakan karyawan sehingga makin banyak tenaga kerja yang bisa diberdayakan.

Untuk pembelian bahan kaus dan pengguntingan bahan, tetap dikerjakan sendiri oleh awak



Dagadu dengan alasan menjaga mutu produk. Pemilihan bahan kaus misalnya, harus dipilih bahan yang benar-benar berkualitas. Sedangkan untuk pengguntingan, tetap dikerjakan sendiri untuk menghindari adanya produk yang hasilnya tidak sama.

“Yang bisa dikerjakan orang lain, tetap dipertahankan untuk dikerjakan mitra bisnis. Syarat menjadi mitra bisnis ya harus menjaga kualitas dan bisa amanah. Kita ingin tetap melakukan silaturahmi bisnis. Sehingga kita makin punya banyak teman dan bisa memberdayakan umat. Kita ingin berbagi rezeki dengan orang lain,” paparnya.

Karena tuntutan kualitas dan harus selalu mengikuti perkembangan, tak jarang produk Dagadu harus

dikerjakan dengan mesin yang berteknologi baru. Untuk hal ini, Dagadu memberikan *support* dengan membelikan terlebih dahulu mesin yang diperlukan, yang kemudian akan dicicil oleh mitra kerja dari order yang mereka terima. Tidak ada ketentuan harus dikembalikan selama berapa lama. “Yang ditekankan adalah jumlah cicilan yang dibayar ke Dagadu harus masih menyisakan untuk kebutuhan mereka dan membayar karyawan mitra kerja tersebut,” ujarnya.

Begitu juga untuk tenaga pemasaran yang bertugas sebagai *customer service* dan *public relation*. Dagadu memiliki program Garda Depan yang dipertahankan sejak tahun 1996. Mereka terdiri dari mahasiswa yang direkrut untuk magang selama

8 bulan dan akan disebar di berbagai gerai yang ada. Saat ini sudah memasuki angkatan ke 37 dengan jumlah alumni sekitar 700 orang. Setiap empat bulan sekali, dilakukan rekrutmen.

PT ADD sendiri mempekerjakan karyawan tetap sebanyak 53 orang dengan 50 garda depan. Tim kreatifnya sebanyak 8 orang yang masing-masing diberi tanggungjawab untuk satu produk. Meski masing-masing tim kreatif diberi tanggungjawab untuk satu produk, namun mereka juga harus membantu tim kreatif lainnya jika diperlukan.

“Sebenarnya sih kalau dari segi biaya, dengan merekrut empat bulan sekali itu biayanya lebih mahal jika dibanding merekrut pegawai langsung. Tapi kita ingin memberi kesempatan

pada mahasiswa untuk belajar bisnis,” katanya

Dari 25 orang yang mendirikan Dagadu, yang masih aktif hanya Arif yang dipercaya oleh teman-temannya memegang kendali Dagadu. Sebanyak 23 orang masih memiliki saham di PT ADD dan mereka menunjuk tiga orang sebagai komisaris.

“Kita agak berbeda dengan perusahaan lain. Kalau kita lagi mengadakan RUPS, seperti punya hajat yang besar. *Lha*” pemegang sahamnya banyak,” ujar Arif sambil tertawa.

■ SM

Let Us be Your Companion in Your Business and Leisure Travel



Swiss-Belhotel Mangga Besar, Jakarta



Swiss-Belhotel Ambon (2009)



Swiss-Belhotel Kendari (2010)



Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya (2010)

Our fine hotels in Indonesia

Sumatera:

Grand-Swiss-Belhotel Medan
Swiss-Belhotel Batam
Swiss-Inn Batam

Kalimantan:

Swiss-Belhotel Borneo Banjarmasin
Swiss-Belhotel Borneo Samarinda
Swiss-Belhotel Tarakan
Swiss-Belhotel Balikpapan (2011)
Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya (2010)

Java:

Hotel Ciputra Jakarta
Swiss-Belhotel Mangga Besar
Swiss-Belhotel Bogor (2011)
Arion Swiss-Belhotel Bandung
Hotel Ciputra Semarang
Ciputra Golf, Club and Hotel Surabaya

Bali:

Pat-Mase Villas Jimbaran
Swiss-Belhotel Bay View, Nusa Dua
Swiss-Belhotel Segara, Nusa Dua (2011)

Sulawesi:

Swiss-Belhotel Silae Palu
Swiss-Belhotel Maleosan Manado
Swiss-Belhotel Kendari (2010)

Maluku:

Swiss-Belhotel Ambon (2009)

Papua:

Swiss-Belhotel Manokwari
Swiss-Belhotel Papua Jayapura
Swiss-Belhotel Merauke (2011)

 **swiss-belhotel INTERNATIONAL**
HOTELS & RESORTS

Swiss-Belhotel International, Indonesia Regional and Sales Office
c/o Hotel Ciputra Jakarta, 7th Floor, Suite 701
Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Jakarta 11470, Indonesia
Telephone: +62-21 560 6040, 566 9710 Facsimile: +62-21 568 1548, 566 0139
E-mail: rso-ind@swiss-belhotel.com
www.swiss-belhotel.com

GDS Chain Code: ON

CHINA • VIETNAM • PHILIPPINES • MALAYSIA • INDONESIA • AUSTRALIA • KUWAIT • JORDAN • OMAN • QATAR • SAUDI ARABIA • UAE • YEMEN

Oleh: **Muhamad Said Fathurrohman**

Direktur Penelitian Lembaga Pengembangan Ekonomi Syariah (LPES) FE Unair



Memacu Pertumbuhan Bank Syariah



Pada akhir tahun 2008 lalu, banyak pemerhati ekonomi syariah kecewa dengan kegagalan bank syariah mencapai target 5 persen pangsa aset perbankan nasional. Nampaknya kekecewaan itu akan berlanjut tahun ini karena hingga akhir bulan Agustus lalu aset perbankan syariah masih 2,4 persen dari aset perbankan nasional.

Walau pangsa aset gagal mencapai target, namun dari sisi pertumbuhan aset

bank syariah sebenarnya menunjukkan prestasi sangat baik tahun lalu, yakni mencapai 50 persen. Kenaikan aset ini jauh lebih tinggi daripada tahun 2007 yang hanya tumbuh 23,6 persen. Rata-rata pertumbuhan aset bank syariah yang sekitar 30 persen juga masih dua kali lipat dari pertumbuhan aset bank konvensional.

Namun angka menggembirakan ini tidak cukup memuaskan jika tujuannya adalah agar bank syariah bisa sejajar dengan bank konvensional sesegera mungkin. Jika rata-

rata pertumbuhan aset bank syariah bertahan sekitar 30 persen, dan bank konvensional sekitar 15 persen, maka butuh waktu 32 tahun agar aset bank syariah bisa menyamai bank konvensional.

Dapatkah kita bersabar selama itu sekedar untuk menyamai bank konvensional, belum mendominasinya? Satu-satunya cara memangkas waktu adalah dengan mempercepat pertumbuhan bank syariah. Hambatan-hambatan perlu disingkirkan dan perlu langkah-langkah terobosan agar bank

syariah bisa melaju lebih cepat

✱ HAMBATAN

Ada beberapa dugaan sebab kelambanan pertumbuhan bank syariah ini. Pertama, masyarakat yang sadar syariah sebenarnya berjumlah banyak dan sebagian besar masih belum tergabung dalam bank syariah manapun. Akan tetapi, mereka kecewa pada bank syariah yang tidak memenuhi harapan atau standar kesyariahan mereka. Kelompok masyarakat ini tidak bersedia

pindah dari bank konvensional ke bank syariah karena menganggap tidak ada bedanya menabung dan meminjam di bank konvensional atau bank syariah.

Hambatan juga terjadi dari kebijakan industri keuangan. Hingga awal 2008 lalu, bank syariah tidak memiliki instrumen investasi yang likuid sebagaimana bank konvensional. Terpaksa bank syariah menaruh seluruh DPK di pembiayaan yang berisiko dan tidak likuid. Risiko pembiayaan dan risiko likuiditas yang tinggi membuat bank syariah menerapkan margin laba lebih tinggi daripada bank konvensional. Hal ini menyebabkan bank syariah sulit bersaing dengan bank konvensional baik pada sisi pendanaan maupun pembiayaan.

Aspek kekeliruan kebijakan lainnya adalah penerapan aturan kehati-hatian (prudential) pada bank syariah yang sama dengan yang diterapkan pada perbankan konvensional. Padahal, bank syariah pada prinsipnya harus mau menanggung risiko pembiayaan yang tinggi karena mengandalkan akad bagi hasil. Dipaksa oleh aturan kehati-hatian yang ketat, bank syariah pada praktiknya lebih banyak menggunakan akad jual-beli yang mirip dengan kredit konvensional. Kemiripan ini menimbulkan masalah kedua di atas, di mana masyarakat yang peduli syariah menjadi tidak peduli terhadap bank syariah. Kemungkinan terakhir, bank syariah sulit tumbuh cepat karena mayoritas bank syariah saat ini merupakan cabang atau anak perusahaan bank konvensional. Tentunya bank konvensional sebagai induk hanya akan merestui perkembangan anaknya selama tidak mengganggu dirinya. Begitu bank konvensional merasa terusik oleh bank syariah anaknya, ia akan

menghambat perkembangan si anak tanpa harus mematakannya.

❖ MENGATASI HAMBATAN

Kelambatan pertumbuhan bank syariah bisa disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari berbagai kemungkinan sebagai berikut. Bank syariah dapat kembali tumbuh cepat jika hambatan-hambatan tersebut diatasi.

Dari sisi bank syariah sendiri, mereka harus merombak desain produk dan cara kerja agar masyarakat dapat dengan jelas melihat perbedaan mereka dengan bank konvensional. Perbedaan yang paling jelas dapat dilihat adalah jika bank syariah menggunakan akad bagi hasil dalam pembiayaan produktif mereka.

Akad jual beli hanya digunakan untuk pembiayaan konsumtif, namun praktiknya harus diperbaiki sehingga bank syariah berlaku sebagaimana penjual, bukan kreditor. Sebagai penjual, bank syariah harus bisa menyebutkan barang apa yang ia jual dan melakukan sendiri pembelian barang dagangnya, bukan diwakilkan lagi ke pembeli sehingga kelihatan menyiasati akad untuk mensyariahkan praktik kredit konvensional.

Kondisi likuiditas bank syariah kini sudah membaik karena sejak pertengahan 2008 tersedia SBI Syariah dan Sukuk Negara sebagai instrumen investasi yang likuid. Di sisi lain, persoalan aturan kehati-hatian nampaknya belum akan diperbaiki dalam waktu dekat. Karenanya, bank syariah masih terdorong untuk lebih mengembangkan pembiayaan jual beli yang berisiko lebih kecil daripada pembiayaan bagi hasil.

Sejak 2008, beberapa unit usaha syariah sudah dilepaskan

(spin off) menjadi bank umum syariah. Pelepasan ini sudah merupakan langkah maju karena bank syariah tersebut akan lebih bebas mengelola dan bersaing dengan bank induknya. Namun sebagaimana telah disampaikan, kepemilikan bank induk ke bank syariah baru hasil pelepasan ini berpotensi tetap menyisakan kendali dari bank induk, sehingga perkembangan bank syariah baru ini tidak bisa maksimal. Walau demikian kita masih bisa berharap banyak karena sudah ada contoh sebelumnya di mana bank umum syariah hasil pelepasan bisa berkembang pesat, jauh melebihi cabang-cabang syariah bank konvensional.

❖ TEROBOSAN

Setelah hambatan hilang, bank syariah bisa tumbuh lebih cepat, namun mungkin belum cukup cepat. Perlu langkah-langkah terobosan yang bisa semakin mempercepat pertumbuhan bank syariah. Pertama, pemain baru perlu didatangkan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Kedua, bank konvensional bisa dikonversi seutuhnya menjadi bank syariah.

Bank syariah baru yang tidak lahir dari induk konvensional berpotensi untuk tumbuh lebih cepat dan lebih progresif dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah pada produk perbankan. Pemerintah perlu melonggarkan syarat pendirian bank syariah dan membuka peluang lebar-lebar bagi investor domestik maupun asing yang berniat mendirikan bank syariah.

Pemerintah juga bisa intervensi langsung dengan mendirikan BUMN bank syariah. Langkah ini tidak tabu diambil pemerintah, walau nampak bertentangan dengan arus privatisasi. Perkembangan industri keuangan di negara

berkembang seringkali harus diinisiasi oleh pemerintah. Faktanya, sebagian besar bank konvensional besar saat ini pada awalnya merupakan BUMN yang kemudian diprivatisasi. Bank syariah bentukan pemerintah inipun suatu saat bisa diprivatisasi, jika perlu.

Skala intervensi yang lebih besar dapat dilakukan pemerintah dengan mengharuskan bank konvensional untuk beralih sepenuhnya menjadi bank syariah. Intervensi besar ini bukan sebuah langkah gegabah, namun dilandasi untuk menjaga kepentingan publik.

Perbankan konvensional mengandung risiko besar terkena krisis. Negara dan masyarakat mengeluarkan biaya besar untuk mencegah terjadinya krisis ini, yakni dengan melakukan penjaminan simpanan. Biaya jauh lebih besar akan ditanggung masyarakat jika krisis benar-benar terjadi. Pengalaman krisis perbankan tahun 1997 telah menelan biaya ratusan triliun.

Mengkonversi sepenuhnya perbankan konvensional menjadi perbankan syariah meniadakan kebutuhan biaya tersebut. Penyesuaian otomatis sisi kewajiban terhadap sisi aset membuat bank syariah terhindar dari risiko gagal bayar (default) pada penabung. Sudah menjadi sifat industri keuangan bahwa bentuk dan perkembangannya sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Bentuk industri keuangan saat ini adalah buah dari kebijakan di masa lalu yang dipertahankan hingga sekarang. Maka bukanlah sebuah keanehan jika pemerintah menata ulang kebijakan dan bentuk industri keuangan demi kepentingan masyarakat.

Demi Menekan Risiko

Model syariah mulai diminati untuk meminimalisasi risiko unbankable pembiayaan hutan tanaman rakyat (HTR).



Harapan masyarakat sekitar hutan untuk menjadi lebih sejahtera sudah menari

di pelupuk mata. Setidaknya, pemerintah mengucurkan dana bergulir Badan Layanan Umum (BLU) Rp 1,4 triliun pada 2009 ini. Namun bukan berarti, persoalan selesai. Karena sampai sekarang dana Dephut masih kebingungan mencari pola pinjaman dana agar meringankan beban masyarakat.

❖ PEMBIAYAAN TERLALU LAMA

Selama ini, penyaluran dana melibatkan bank konvensional. Namun program ini dinilai *unbankable*. Pasalnya, hasil produksi HTR baru bisa ditebang delapan tahun kemudian terhitung sejak penanaman. Bank konvensional menilai HTR berisiko tinggi, karena masa pengembalian delapan tahun, belum lagi risiko yang ditimbulkan seperti kebakaran. Kondisi ini diperparah dengan enam prinsip perkreditan perbankan yang dikenal dengan 6C yakni *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *constraint*, tidak bisa dipenuhi debitur hutan tanaman rakyat (HTR).

Pilihan selanjutnya adalah penyaluran langsung BLU. Yakni lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara, dikelola secara otonom, tidak bertujuan mencari laba, menghasilkan barang/jasa yang diperlukan masyarakat. Namun hal inipun sulit karena persoalan pengalaman.

❖ PETANI MINATI BANK SYARIAH

“Kemarin ada debitur yang menyarankan mungkinkah menggunakan syariah,” ujar Kepala Pusat Pembangunan Hutan Departemen Kehutanan, Deny Kustiawan, dalam Workshop Pembiayaan Pembangunan HTR dengan Pola Syariah, beberapa waktu lalu. Karena itu pula, penajakan dengan perbankan syariah mulai dilakukan. Walaupun belum tentu penyaluran dana ini melibatkan bank syariah. “Bisa saja kami menyalurkannya sendiri dengan cara ekonomi syariah,” katanya menjelaskan.

Kalaupun Dephut akan melibatkan bank syariah, bank

yang akan dipilih adalah bank-bank yang mempunyai anak cabang di mana-mana. Karena program HTR didominasi oleh luar Jawa. Di Pulau Jawa sendiri, program ini hanya berada di Yogyakarta.

“Sampai sekarang, dana Rp 1,4 Triliun belum terserap sama sekali, walaupun memang tidak ada target kapan dana harus terserap,” ungkap Deny. Dia menambahkan, pemberian dana akan diberikan pada debitur yang mengajukan dana serta memenuhi persyaratan. Hingga kini, baru tiga lembaga yang mengajukan proposal untuk pembangunan HTR dan hutan tanaman industri (HTI). Mereka adalah Koperasi Madina di Sumatera Utara, koperasi di Maluku Utara dan PT Cipta Mas yang akan mengembangkan HTI di Sumatera Selatan. Namun untuk sementara, pihaknya menengguhkan sementara proposal PT Cipta Mas karena mereka belum memiliki izin definitif dari Dephut.

Deny menjelaskan, total permintaan ketiga pemohon mencapai Rp 7,2 Miliar dari sekitar 8.000 hektare lahan

yang akan ditanami. Itu berarti baru sedikit dana yang terserap. Penyaluran dananya sendiri untuk sementara menggunakan bank konvensional, sampai pemerintah menemukan cara penyaluran dana yang tepat. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan perbankan swasta dan setiap debitur terkena bunga non komersial sekitar 7 persen. Walaupun buat masyarakat, bunga tersebut masih sangat tinggi.

Dikatakan Deny, plafon pinjaman dana bergulir untuk HTR maksimal Rp 11.731.365 dan plafon terendah sebesar Rp 8.531.900 per hektare. Adapun lahan yang bisa mendapatkan pembiayaan dari program ini maksimal 300 ha. Bagi setiap kelompok tani hutan (KTH) atau koperasi akan mendapat dana 100 persen dari lahan yang dikelola. Sedangkan untuk badan usaha pelaksana HTI hanya akan menerima 40%. Dana Rp 1,4 Triliun sendiri, sebanyak 60 persen dialokasikan untuk HTR dan sisanya untuk HTI.

Dalam pendanaan sendiri, selama ini KTH terbagi menjadi tiga. Pertama, mandiri

Pembiayaan Hutan

yakni petani atau koperasi membangun secara mandiri dengan modal sendiri. Kedua, petani/koperasi bekerjasama dengan pemegang izin bermitra. Nantinya petani akan dibantu oleh mitra yang merupakan perusahaan. industri, namun petani harus menjual semua hasil tanamnya kepada mitra. Ketiga adalah developer. Prinsip awalnya seperti perumahan, developer membangun lalu petani mencicil ke bank. "Tiga kelompok ini bisa mendapat bantuan BLU dengan cara yang berbeda," cetus dia.

❁ MODEL SYARIAH YANG PAS

Pakar ekonomi syariah dari Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI), Agustianto M.ag menilai, akad yang pas untuk pembangunan HTR ini adalah mudharabah. Ia mengacu kepada model pembiayaan yang biasa diberikan kepada sektor pertanian. Hasil hutan juga hasil Bumi layaknya pertanian. Dalam sejarah akad-akad bagi hasil sejak jaman Nabi Muhammad SAW untuk sektor pertanian, juga diawali dengan model bagi hasil, antara lain mudharabah.

Model mudharabah bisa diterapkan langsung antara BLU dengan petani (debitor). Dana murni dari satu pihak yaitu BLU sebagai shaibul maal (investor) kepada petani sebagai mudharib (pengelola modal).

Jika melibatkan perbankan, model yang dipakai bisa saja mudharabah muqayyadah (*restricted investment*) di sisi

BLU dan bank syariah. Di sisi petani atau pihak lainnya, akadnya lain lagi, bisa saja murabahah (jual beli).

Corporate Business Manager Bank Muamalat Indonesia (BMI) Mustofa Kamil juga melihat dua sisi tersebut. Apalagi jika melibatkan bank syariah. Di sisi BLU dan bank syariah akad yang terjadi adalah mudharabah muqayyadah tadi. Ini adalah model investasi bagi hasil dengan penetapan tujuan investasi di awal. "Jadi, investor maunya ini digunakan untuk pembangunan HTR," ujar Mustofa yang juga menjadi pembicara. Ini mirip *cash collateral*, jadi aman untuk bank-nya, karena ada jaminan dana dari pemerintah.

Bank hanya sebagai *arranger* yang akuntansinya bisa off balance sheet maupun on balance sheet. Tentu dengan pertimbangan risiko yang menyertainya. Sebagai kompensasi atas pengelolaan dana ini, bank mendapat *ujroh* (komisi). Di sisi petani, menurut Mustofa, "Harus dilihat dulu si petani dapat apa dan apa kewajibannya. Ini semuanya harus memiliki kekuatan legal yang kuat. Harus ditentukan beberapa pihak yang terlibat, konsep bagi hasilnya, bank sebagai *arranger*, BLU sebagai penjamin, lalu ada pihak-pihak yg *me-monitoring*, baru memunculkan nisbah bagi hasil berapa bagi petani akibat pengelolaan HTR itu", jelas Mustofa.

Misalnya, untuk pengelolaan kemitraan atau developer bisa saja diterapkan akad *istishna*



paralel. Ini adalah jual beli (pemesanan) dengan uang di muka sementara barangnya belum ada kemudian oleh pemesan, barang tersebut dijual lagi kepada pihak lain, dalam hal ini misalnya koperasi atau industri kehutanan.

Dananya, tetap berasal dari BLU, bukan dana pihak ketiga (DPK) bank syariah. Mudharabah muqayyadah dulu dengan BLU, itu memungkinkan. Kalau pakai DPK, dana masyarakat perlu kami kaji ulang soalnya waktunya 8 tahun", ujar Mustofa. Dana dari BLU tersebut sebenarnya berlaku layaknya *cash collateral* saja. Di sisi petani juga, mesti memiliki jaminan beli dari pihak lain (*off taker*). Namun demikian pada prinsipnya, pihaknya mendukung program ini dan akan terus mengkajinya.

Selama ini, menurut Mustofa, BMI belum memberikan pembiayaan ke sektor kehutanan. "Kalau kelapa sawit kami pernah di Pontianak dan Jambi. Itu pun program pemerintah jangka panjang", ujar Mustofa. Modelnya kurang lebih sama, yaitu ada *off taker*-nya.

■ RS/IA

❑ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna Paralel.

- 1 Jika LKS melakukan transaksi *Istishna'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna'* kedua.
- 2 LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani'*) karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah.
- 3 Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *Istishna'* (Fatwa DSN nomor 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam *Istishna'* Paralel.

❑ Ilustrasi Jual Beli Berdasarkan Pesanan Tiga Pihak (Istishna Paralel):

Bank syariah membuat kontrak dengan koperasi untuk membeli hasil Bumi melalui pesanan. Saat kontrak dibuat, hasil Bumi belum ada. Koperasi berkewajiban memenuhi pesanan bank syariah sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Syarat jumlah, harga, dan metode pembayaran disepakati di muka. Pembayaran dari bank dapat dilakukan di muka atau dicicil.

Bank syariah dapat mengizinkan koperasi menggunakan sub kontraktor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini petani. Jadi, koperasi dapat membuat kontrak *istishna* kedua.

"Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shodaqoh jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya". (H.R. Muslim)



Mengoptimalkan Wakaf : dari Liability ke Asset Management

Zaim Saidi, Direktur Tabung Wakaf Indonesia-Dompot Dhuafa Republika

Studi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2006), menunjukkan bahwa harta wakaf di Indonesia secara nasional sangatlah besar. Jumlah unit wakaf yang terdata mencapai hampir 363 ribu bidang tanah, dengan nilai secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 triliun! Ini setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS (kurs Rp 9.250/ dolar). Jumlah ini tentu saja sangat besar. Andai saja seluruh harta wakaf ini dijual, hasilnya dapat menutupi 100% total utang luar negeri Pemerintah Republik Indonesia di awal-2008), yang besarnya 'cuma' 60 milyar dolar AS. Untuk memahami betapa besarnya harta wakaf ini, dalam konteks lain, bandingkan nilainya yang setara dengan sekitar 85% APBN RI yang besarnya sekitar Rp 700 triliun/tahun.

Tapi, menjual aset wakaf tentu tidak dapat kita lakukan begitu saja, karena itu berarti menyalahi prinsip wakaf: mengelola aset pokoknya, dan memanfaatkan hasilnya. Dengan kata lain, kemungkinan

yang dapat kita peroleh dari pengelolaan wakaf, justru jauh lebih hebat lagi. Bukan saja aset-pokok triliunan rupiah itu tetap dapat kita pertahankan, dan tidak dijual seperti yang terjadi ada aset-aset BUMN yang kini mulai berpindah ke tangan kapitalis asing, sumber utama persoalan bangsa kita (utang luar negeri) akan dapat kita selesaikan.

Tetapi mengapa saat ini wakaf yang begitu besar itu tidak memperlihatkan kontribusi sosialnya pada kehidupan umat, yang justru semakin terpuruk dalam kesulitan hidup? Mengapa kita, sebagai bangsa, masih juga "mengemis" utang kepada para kapitalis internasional?

Jika dikaji lebih rinci, Ratusan ribu aset wakaf di atas tersebar di seluruh Indonesia, dengan luasan lahan yang sangat bervariasi. Kalau diambil rata-ratanya, luas lahan wakaf di Indonesia sekitar 0.5 hektar per unit, memang tidaklah luas. Namun, kalau diuangkan, nilainya sekitar Rp 1.6 milyar/unit. Persoalan yang lebih mendasar tampaknya adalah pada

pemanfaatannya: 79% dari perwakafan tersebut digunakan untuk pemebangunan masjid/mushola, 55% untuk lembaga pendidikan, 9% untuk pekuburan dan 3% atau kurang untuk fasilitas umum lainnya (sarana jalan, sarana olah raga, WC umum, dan sejenisnya).

Data tersebut merupakan jawaban multiple dari survei UIN di atas, yang dapat kita simpulkan bahwa pemanfaatan wakaf di Indonesia hampir sepenuhnya untuk keperluan konsumtif. Tentu ada contoh-contoh pengelolaan wakaf yang lebih produktif, dan karenanya kontribusi sosialnya sangat dinikmati oleh umat. Ambil kasus wakaf Pondok Modern Gontor, sebuah lembaga pendidikan yang sama-sama kita kenal mumpuni. Pondok ini ditopang oleh sekitar 320 hektar lahan wakaf, 212 hektar di antaranya adalah sawah produktif. Dari sini Pondok Gontor memperoleh hasil panen senilai Rp 726 juta, tiap dua musim panen (data 2003). Selain itu, Pondok Gontor juga memperoleh pendapatan dari kebun cengkeh dan kegiatan niaga lainnya

meski relatif lebih kecil. Dengan dukungan dana wakaf ini, Pondok Gontor mampu menyediakan jasa pendidikan bermutu, bagi sekitar 35 ribu siswa, dengan relatif murah.

Bercermin pada kasus Pondok Gontor kita dapat melihat bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia umumnya mengikuti paradigma yang tidak tepat, yakni seperti mengelola sedekah biasa, dana wakaf dipakai untuk kegiatan cost center. Sumberdaya yang disumbangkan langsung dibelanjakan. Dalam bahasa finansial inilah yang acap disebut sebagai liability management, yang memang merupakan tujuan dari bentuk-bentuk sedekah umumnya, tapi bukan wakaf. Sedang wakaf, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah "menahan pokoknya dan hanya memanfaatkan buahnya". Dalam bahasa finansial ini dikenal sebagai asset management. Dalam tradisi wakaf aset ini dapat berupa sawah, perkebunan, toko, pergudangan, serta aneka bentuk usaha niaga – yang intinya segala jenis kegiatan produktif.



Kantor Pusat
Tabung Wakaf Indonesia
Perkantoran Margaguna No. 11
Radio Dalam Raya, Jakarta Selatan
Telp. 021 7211 035
Fax. 021 7211 005
e-mail : kontak@tabungwakaf.com
website : www.tabungwakaf.com

REKENING WAKAF

Bank Danamon Syariah Cab. Ciracas
No.Rek 58337981

BNI Syariah Cab. Jakarta Selatan
No.Rek.91538995

Bank Syariah Mandiri Cabang Pondok Indah
No.Rek. 004-002-3300

BII Syariah Platinum Access Cab Thamrin
No.Rek 2-700-00138-2

a.n. Yayasan Dompot Dhuafa Republika



Countrywood Wakaf Junction

Tunaikan Wakaf Uang Anda untuk Program Countrywood Wakaf Junction TWI, tempat pahala mengalir abadi

“Tempat Pahala Mengalir Abadi”

Program Wakaf Terpadu TWI : Countrywood Wakaf Junction

COUNTRYWOOD WAKAF JUNCTION (CWJ) Tabung Wakaf Indonesia-Dompot Dhuafa adalah kawasan wakaf terpadu yang terdiri atas wahana komersial dan sosial. Di atas lahan seluas 845 m2, tanah wakaf dari Ibu Eni Nuraeni, ini akan berupa kompleks pertokoan, ruang perkantoran, food court, dan lahan perparkiran, sebagai sarana niaga yang disewakan kepada umum.

Sarana wakaf produktif ini terintegrasi dengan sejumlah sarana sosial, seperti play ground (sarana bermain) untuk anak-anak, musholla, WC umum, dan lahan terbuka untuk keperluan pedagang kaki lima (PKL) dan UKM (Usaha Kecil dan Mikro), yang digabung dengan lahan parkir.

Hasil sewa berbagai sarana komersial ini akan disalurkan kepada kaum dhuafa, dalam bentuk bantuan biaya pendidikan, kesehatan, dapur umum, dan santunan sosial lainnya. Penyaluran surplus wakaf ini akan dilakukan baik secara langsung oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) sendiri maupun melalui jejaring Yayasan Dompot Dhuafa lainnya.

Salah satu program rutin yang akan diselenggarakan di CWJ Tabung Wakaf Indonesia - Dompot Dhuafa adalah pasar Sabtu-Minggu bagi PKL dan UKM, dengan tanpa dipungut biaya sewa, dan terbuka untuk setiap orang.

Program ini akan dikelola bersama Baitul Mal Nusantara (BMN) dan menjadi bagian dari Festival Hari Pasaran Nusantara (HPN) yang telah berlangsung di kota-kota Bandung,

Yogyakarta, dan Jakarta. Selain sebagai sarana perdagangan, HPN juga dimaksudkan sebagai hari rekreasi keluarga, utamanya bagi kelas menengah bawah. Kegiatan Dapur Umum Dompot Dhuafa akan melengkapi kemeriahan HPN ini.

Pembangunan CWJ Dompot Dhuafa merupakan wujud dari visi dan misi TWI Dompot Dhuafa untuk menjadikan gerakan wakaf produktif dan wakaf terpadu sebagai pilar pemerataan kesejahteraan masyarakat yang lestari dan mandiri. Partisipasi Anda dalam mewujudkan CWJ ini akan mengabadikan pahala Anda di dunia dan akhirat dan melestarikan manfaatnya bagi kaum dhuafa. ■

Rencana Anggaran CWJ Dompot Dhuafa

1. Biaya Persiapan (Rancang Bangun, Perizinan, dll)
2. Biaya Pembangunan Sarana Niaga (6-9 unit, 500-800 m2)
3. Biaya Pembangunan Food Court (5 unit, 60 m2)
4. Biaya Pembangunan Taman dan Play Ground (1 unit, 100 m2)
5. Biaya Pembangunan Musholla dan WC Umum (1 unit, 60 m2)
6. Biaya Pembangunan Lahan Perdagangan/Parkir (beratap kanopi, 300 m2)

Total biaya

Rp. 100.000.000,-
Rp. 1.200.000.000,-
Rp. 75.000.000,-
Rp. 75.000.000,-
Rp. 100.000.000,-
Rp. 200.000.000,-
Rp 1.750.000.000,-



STOP INFLASI !

Miliki **Dinar Emas** Sekarang

Sarana lindung nilai yang kokoh
Apresiasi rata-rata 25, % per Tahun

Telp : 021 721 1035

kontak@tabungwakaf.com
www.wakalanusantara.com



Tunaikan WAKAF Tunai Anda untuk Rumah Cahaya

membaca dan
mengHASilkan KarYA

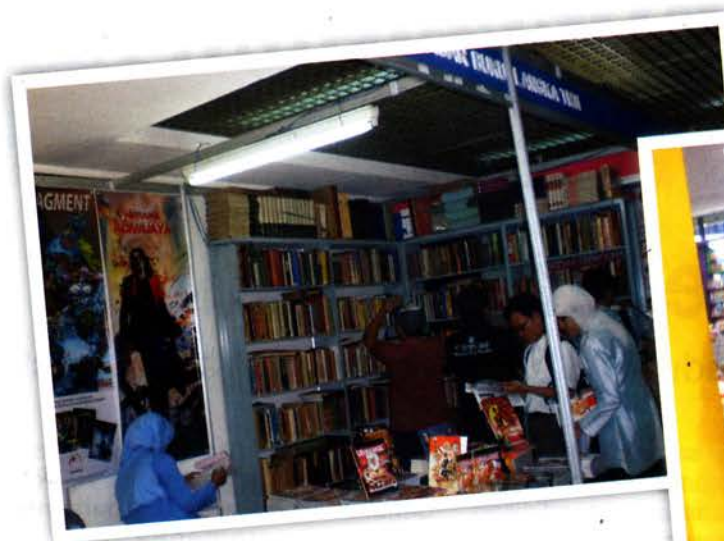
Rumah Cahaya adalah program WAKAF Terpadu dari TWI, yang terletak Jl. Keadilan No. 13, Depok Timur, Jawa Barat.

Di lokasi ini sedang dibangun asset wakaf sosial berupa rumah baca, dan asset wakaf produktif berupa sarana niaga.

Informasi Selengkapnya, hub :
Noviati (021-7211035 ext. 311)



22 karat - 4.25 gram



Indonesia Library

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional menyelenggarakan Indonesia Library & Publishing Expo 2009 yang bertajuk Tingkatkan Budaya Baca, Profesionalisme Perpustakaan dan Penerbitan di Gedung Istana Olah Raga (Istora) Senayan Jakarta, pertengahan Oktober, 17-25 Oktober 2009.

Untuk pertama kalinya, Ikapi menggelar pameran buku dan perpustakaan akbar ini di Istora Senayan Jakarta. Acara ini mendapat apresiasi yang tinggi dari seluruh penggeliat perpustakaan, penerbit buku serta masyarakat umum.

Ketua Panitia Indonesia Library & Publisher Expo 2009, Robinson Rusdi, dalam sambutannya mengatakan, pameran buku dan perpustakaan ini diikuti oleh seluruh perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten, kota BUMN, Departemen, Universitas, Perbankan, Perpustakaan Perusahaan Swasta, Penerbit Buku serta sejumlah penerbit anggota maupun non anggota Ikapi. Ia berharap pameran ini dapat memberikan peluang komunikasi yang efektif antara pustakawan, penerbit, toko buku, distributor dan masyarakat luas. Namun yang terpenting adalah terjalinnya komunikasi antara masyarakat, penerbit dan penggeliat perpustakaan.

“Kita harapkan adanya komunikasi dan informasi secara timbal balik antara penerbit, pemustaka dan masyarakat serta pustakawan, yang dapat memberikan

masukan bagi perkembangan perpustakaan dan penerbit,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini pula perpustakaan dari seluruh Indonesia memamerkan buku unggulan dan koleksi setiap perpustakaan. Sedangkan penerbit dapat memamerkan buku-buku terbarunya yang bisa menambah koleksi perpustakaan. Sehingga perpustakaan dan penerbit dapat ikut serta untuk memajukan pendidikan dan kemajuan bangsa.

❖ MENARIK UNTUK DIKUNJUNGI

Aneka ragam kegiatan dikemas di rangkaian pameran ini. Ada acara-acara ilmiah maupun hiburan. Berbagai kegiatan seperti diskusi, bedah buku, seminar, lomba mendongeng, lomba perpustakaan, serta jumpa penulis buku turut meramaikan pameran tersebut.



& Publisher Expo 2009

Pameran ini sangat menarik untuk dikunjungi. Banyak buku yang ditawarkan mulai dari buku anak, agama, umum hingga buku-buku langka dengan harga murah dan diskon yang beragam hingga 70%. Selain itu perpustakaan dari seluruh Indonesia yang mengikuti pameran tersebut turut memamerkan buku unggulan dan koleksi yang dapat menambah wawasan.

Sedikit disayangkan pameran buku yang banyak memberikan manfaat dan wawasan sekaligus hiburan bagi masyarakat, kurang dibanjiri pengunjung. Seperti yang disampaikan Lilif, penjaga *stand* dari salah satu penerbit. "Sempat terkejut karena sepi pengunjung, biasanya pengunjung ramai saat pameran jika dibandingkan dengan pameran yang sudah-sudah," ungkapnya.

Untuk meningkatkan jumlah pengunjung, Lilif menyarankan, panitia

mengundang anak sekolah atau karyawan dari salah satu institusi secara khusus. Dengan mengundang mereka, jumlah pengunjung otomatis akan meningkat, dan kegiatan ini tersosialisasi maksimal.

Karena dari pengalamannya beberapa hari menjaga stand, banyak pengunjung yang mengeluhkan minimnya informasi pameran tersebut. "Kemarin ada pengunjung yang mengeluh info pamerannya kurang sampai. Bahkan untuk mendapat info pameran dia mencarinya di internet," ujarnya. Sepinya pengunjung juga membuat penerbit tidak terlalu banyak mengeluarkan stok buku..

Dari informasi yang diperoleh *Sharing*, di hari pertama, tak banyak pengunjung yang datang. Kondisi ini kemungkinan disebabkan masyarakat belum banyak yang tahu. Di hari berikutnya, pengunjung mulai terlihat, namun tidak terlalu ramai.

Kebanyakan pengunjung menyerbu gerai-gerai yang menawarkan diskon tinggi. Mereka sampai membeli beberapa kantong buku.

■ VA

"Banyak buku yang ditawarkan mulai dari buku anak, agama, umum hingga buku-buku langka dengan harga murah dan diskon yang beragam hingga 70%".

Prof. DR. Reni Akbar Hawadi, Psi

Antara Islam dan Psikologi

Selesai acara, sang guru besar didaulat menyanyi. Begitu mendayu dan menjiwai. "Saya sedang rindu dengan suami, yang berada di Amsterdam, dia sedang tugas. Belum lama ditinggal sih, baru sepuluh hari", ujar Prof. DR. Reni Akbar Hawadi, Psi dalam perbincangan dengan *Sharing* usai menyanyi di Milad Pasca Sarjana Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (PSTTI-UI), Oktober lalu.

Siapa dia? Dia adalah pakar psikologi yang memimpin sebuah program pascasarjana terkait Timur Tengah dan Islam. Bukanlah sesuatu yang janggal lantaran gelar guru besar ilmu psikologi pendidikan yang disandanginya, bersanding dengan dunia pendidikan yang dipimpinnya. Dengan latar belakang psikologinya, ia ikut menggagas bidang kekhususan Kajian Islam dan Psikologi, yaitu salah satu dari lima bidang kekhususan program Megister Sain (M.Si) yang ada di PSTTI-UI.

"Mengapa saya pegang Kepala Program Studi (KPS) PSTTI-UI, Islam Psikologi merupakan salah satu peminatan dari Kajian Islam dan Psikologi, dan saya salah satu pendiri yang menset up program tersebut," katanya.

Menurutnya, kajian PSTTI-UI ini adalah bukan merupakan program studi kajian wilayah, karena jika bicara Timur Tengah dan Islam bukan berarti bicara seluruh hampir setengah dunia. Kesannya berat dan luas sekali, jadi bukan hanya kajian wilayahnya tapi lebih kepada konteks Islamnya.

"Nah ini menarik sekali dan belum banyak digarap, karena sejauh ini yang hanya dilihat karena syariah yaitu ekonomi keuangannya. Padahal ada penilaian-penilaian lain yang bisa digali lebih jauh, seperti kajian Islam Psikologi," ungkapnya.

PSTTI-UI merupakan program studi pertama yang menyelenggarakan pendidikan ke-Islaman di lingkungan perguruan tinggi umum yang ada di Departemen Pendidikan Nasional. "Saya berharap bahwa PSTTI-UI akan bisa menjadi suatu program studi yang utama di Indonesia, karena secara kesejarahan kita adalah yang pertama. Jadi kita harus mempertahankan posisi itu," tegasnya.

Kembali soal menyanyi, itu memang hobinya. "Salah satu hobi, walaupun suaranya tidak bagus. Sebenarnya bernyanyi itu untuk menyehatkan mental dan itu merupakan salah satu sarana relaksasi," katanya. ■



Andi Arsyil Rahman:

"Semoga Tidak Kena Bencana"

"Tidak menutup kemungkinan akan terjadi di mana saja Waallahualam. Audzubillahimindzalik Semoga kita tidak terkena," kata artis muda yang tengah naik daun ini.

Andi yang memerankan Furqon dalam film *Ketika Cinta Bertasbih 1&2* (KCB 1&2) menilai, dibalik setiap musibah pasti ada hikmahnya. Kita harus mengambil pandangan positif agar melihat, bencana bisa terjadi di mana saja.

Sore cerah di bundaran Senayan Jakarta, Dompot Dhuafa menggelar aksi solidaritas untuk gempa Sumatera Barat, awal Oktober lalu. Andi hadir mendukung aksi tersebut.

"Walaupun saya tidak berada disana secara langsung, saya cukup merasakan bagaimana jika kita ditinggalkan keluarga, saudara atau terkena

musibah. Saat saya diberitahu ada kegiatan Aksi Solidaritas Gempa Indonesia, tanpa pikir panjang saya langsung datang untuk ikut membantu, walaupun ini merupakan hal yang kecil tapi menurut saya bisa menjadi dampak yang besar bagi mereka," papar pemuda yang sempat menjadi Duta Pariwisata Makasar itu.

Andi juga memberi sumbangan lo! Berapa? Andi hanya tersipu dengan senyumnya yang manis dan hanya menjawab, "Saya berharap, dengan adanya kegiatan aksi solidaritas ini bisa meringankan beban mereka".

Tapi, omong-omong, memangnya Andi penyumbang via DD juga ya? "Iya", jawabnya mantap.



sharⁱng

inspirator ekonomi & bisnis syariah

mengucapkan

SELAMAT
HARI RAYA IDUL ADHA
1430 H



✓ **LENGKAP**

✓ **AKTUAL**

✓ **INSPIRATIF**

INFORMASI TERKINI PERKEMBANGAN
EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH
DALAM DAN LUAR NEGERI

Dapatkan Majalah **Sharing** di :

1 TOKO BUKU GRAMEDIA :

- Taman Anggrek Mall, Jakarta
- Citraland Mall, Jakarta
- Pondok Indah Mall, Jakarta
- Mega Mall, Pluit, Jakarta
- Hero Gatot Subroto, Jakarta
- Melawai, Jakarta
- Matraman, Jakarta
- Kelapa Gading Mall, Jakarta
- Artha Gading, Jakarta
- Cempaka Mas, Jakarta
- Pintu Air, Jakarta
- Gajah mada, Jakarta
- Cinere Mall, Jakarta
- Metropolitan Mall, Bekasi, Jakarta
- Bintaro Plaza, Jakarta
- Meruya, Jakarta
- Plaza Semanggi, Jakarta
- Depok Plaza, Depok
- WTC, Tangerang
- Karawachi Mall, Tangerang
- Daan Mogot Mall, Tangerang
- ITC, Cibinong
- Hero Padjajaran, Bogor
- Ekalokasari, Bogor
- Manyar, Surabaya

2 TB. GUNUNG AGUNG

- Taman Anggrek Mall, Jakarta
- Blok M Plaza, Jakarta
- Kwitang 38, Jakarta
- Kramat Jati Indah, Jakarta
- Atrium Plaza, Jakarta
- Arion Plaza, Jakarta
- Citraland Mall, Jakarta
- Sunter Mall, Jakarta
- Senayan City, Jakarta
- Pondok Gede, Bekasi
- Tambun, Bekasi
- Juanda, Bekasi

3 TB. WALI SONGO, JAKARTA

Kantor Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)
Jl. Setiabudi Tengah No.29, Setia Budi, Kuningan
Jakarta Pusat – 12910
Telp. : 021- 5290 1515
Fax : 5290 1516

4 AGEN-AGEN SELURUH INDONESIA :

Jakarta Selatan

Dona Agency (Dona Sihite)
Jl. Sunan Kalijaga No. 64
Terminal Blok M-Jakarta Selatan
Telp. : 021-722 0004

Mataradja Agency (Benhard Simarmata, S.Sos)
Jl. Cilandak KKO No. 59
(Depan Pintu Masuk Pom Bensin Trakindo)
Jakarta Selatan

Jakarta Pusat

Program Pasca Sarjana PSSTTI-UI (Ferry)
Jl. Salemba Raya – Jakarta Pusat
Telp. : 021-3924 713

Jakarta Timur

Yanti Agency (Yanti Hadi)
Jatinegara Kaum No. 19, Rt.001/003
Jakarta Timur 13250
Hp. : 0816 – 1850 689

Daya Sapa Cita "DSC" Agency (Fitri Herfianti)

Jl. Cilugup II No. 51, Rt. 02/012
Duren Sawit-Jakarta Timur
Telp. : 86607173
Hp. : 0812 106 9395/0813-9811 2816
021- 3394 5358/021 326 73941

Jakarta Barat

Cahaya Agency
Jl. Kemanggisian Utama Raya No.37
Telp. : (021)-533 0340
Hp. : 0818-083 66390

Lily Sekarwati Agency

Komplek Green Ville Blok M/2
Tomang Barat-Jakarta Barat
Telp. : 021-563 0833/021-567 3841
Fax.: 021-565 5953

Depok

Bursa Nurul Fikri (Rusdi Mukhtar)
Margonda Raya 219A- Pondok Cina
Telp : 021-788 3803
Fax : 021-7869787, 912 67331

Madinah Agency (Abu Umar Abdul Aziz)

Jl. Margonda Raya No. 513 A-Depok
Telp/Fax : 021-7871 118
Hp. : 0816-1107 859

Arif Media Agency

Jl. Margonda Raya No. 521, Gg. Sawo-Depok
Telp. : 021-980 99 265
Hp. : 0813- 180 15 221

Bogor

Ritha Artha Kesuma
Komplek Ciluar Asri Blok B7 No.30,
Ciluar-Bogor 16156
Telp. : 0251-658549
Hp. : 0818-0807 9900

Serang

Drs. H Lufti Iskandar
Apotik Yumaga Jl. Yusuf Martadilaga No. 4 Serang
Banten
Telp. : 0254 201752

Bandung

Gunaraya Agency (Erick Wahyudin)
Komplek Ruko Cikawau Permai B 12
Bandung
Telp. : 022-4232 513

Maju Terus Agency (Aan)

Jl. Sukagali No. 42 – Bandung
Telp. : 022 – 2043 090

Jawa Tengah

ABC Agency (Edy Dwinanto)

Jl. Slamet Riyadi No. 30 A
Solo-Jawa Tengah
Telp. : 0271- 644 345
Hp. : 0816 1110 925

Sendang Mulya Agency (Iskandar Narto Atmodjo)

Jl. Pasar Gede Wetan No.8
Solo – Jawa Tengah
Telp. : 0271 – 633 751
Hp. : 0815 4853 4567

Siti Hasanah Agency (Siti hasanah)

Jl. Lamongan Barat IV No.23
Sampangan Semarang-Jawa tengah
Telp. : 024 – 7029 8397
Hp. : 0815 761 2547

Sleman

Alvi
Jl. Layur 3 no. 1 Minomartani Ngaglik Sleman 55581
Telp :085729542701

DI Yogyakarta

Esyar Agency (Andi Mujahid)
Jl. Pandega Marta IV No.1
Yogyakarta 55281
Hp. : 0813 2804 4471

Yani Agency (Linda)

Jl. Veteran No. 171 (Sebelah Hotel Dewa Ruci)
Yogyakarta
Telp. : 0274-367 867

Surabaya

SYAIFUDIN AGC
Ketintang baru X No. 7 Kel. Ketintang Kec. Gayungan
SURABAYA 60231
HP : 031 72468620/0819 3800 4200

Batam

R. Endy Junaidi Sastra
PT. BATAM LINK PUBLISHER Graha Sulaiman Lt. 3
Jl. Sultan Abdul Rahman Nagoya- Batam 29432
Telp. : +62819814900/07789113204

5 AGEN-AGEN KAMPUS

UNJ

Sekretariat BSO KSEI FE-UNJ
Jl. Rawa mangu Muka, Gd. L.
Lantai I Kampus A-UNJ, Jakarta Timur
Cp. : Imam Punarko
Hp. : 0856 765 2604

TRISAKTI

Asrama IKAMI Sul sel
Jl. Talang 39, Pegangsaan , Menteng Jakarta Pusat
Cp. : Hendriyadi
Telp. : 021–951 891 27
Hp. : 0852 55 904 934

UNIVERSITAS INDONESIA (UI)

Sekretariat Forum Studi Islam (FSI)
Gedung Student center, FE-UI, Depok
Telp. : 021-9202 8996
CP. : Giri Suseno, HP. : 0856- 9237 1591

STAN

Jl. Ceger Raya Blok A No. 1 A, Pondok Aren
Jurang Mangu Timur, Tangerang 15222
(Belakang Masjid As Shuhada)
Cp. : Zia'ul haq As Shidqi
Telp. 021-914 361 77
Hp. : 0856-400 411 72

STEI SEBI

Jl. Ir. H. Juanda, Komplek Ciputat Indah Permai
Blok C. No. 25-26, Ciputat-Tangerang
Cp. : M. Wiwil
Hp. : 0812 1355 4881

STEI TAZKIA (Faqih)

Jl. Raya Darmaga KM. 7, Bogor 16680
Telp. : 0251-421 309
Hp. : 0857 2039 9470

UIN

Riza Agency (Riza Rizky Pratama)
Komplek Ciater Permai Blok D 6 No. 6
Serpong -Tangerang
Telp. : 021- 7564 764
Hp. : 0856 7946 071

STAIN CIREBON

Mochammad Adriyanul Latif
Jl. Perjuangan Bypass Cirebon
Hp. : 085224853430



* MENERIMA AGEN DI SELURUH INDONESIA

INDONESIA BOOK FAIR *Ke 22*

**4-8 November
2009**

Jakarta Convention Center

Check this out!

- Comic Corner •
- Mini Library •
- Film Screening •
- Workshops •

Programs :

- Workshop Komik Bersama Akademi Samali •
- Book Launching, Book Review & Book Signing •
- Konsultasi Komik Bersama Komikus - Komikus Muda •
- Talkshow Bedah Buku "New Moon" bersama •
- Komunitas Buku "New Moon" Oleh Majalah Cita Cinta •
- Talkshow "Peran Jogja Dalam Perkembangan Komik Indonesia" •
- Children Story Telling Oleh Majalah Reader's Digest Indonesia •
- Konferensi Penulis Cilik Indonesia 2009 Oleh Mizan Publika •
- Talkshow Al-kalam : Al-quran Tajwid Digital Oleh Penerbit Diponegoro •

**DAPATKAN !
DISKON BUKU
S/D
70%**

penyelenggara :



pelaksana :



media partner :



1 buku = 1 juta ilmu untuk anak bangsa

Info lebih lanjut: **PT. Kerabat Dyan Utama** Telp. : 021 - 3926867

www.indonesia-bookfair.com



Pembiayaan Investasi iB

- ✓ Bagi hasil sesuai perkembangan usaha
- ✓ Prinsip kemitraan yang saling menguntungkan
- ✓ Fleksibel sesuai rencana keuangan
- ✓ Leasing alat produksi

Perbankan syariah menyediakan pembiayaan Investasi iB dengan skema keuangan yang lebih beragam sesuai rencana dan perkembangan usaha Anda, fleksibel dan saling menguntungkan.

Temukan logo iB di bank-bank terkemuka di seluruh Indonesia, dan nikmati kelebihan layanan perbankan syariah yang modern, melayani, adil dan transparan.

Karena perbankan syariah lebih dari sekedar bank.



Informasi lebih lanjut:
Gerai Info Bank Indonesia Lobby Menara Sjafruddin Prawiranegara
atau Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Menara Radius Prawiro
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, T. 6221 381 8371 F. 6221 350 1989
www.bi.go.id

Bank Bukopin Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Ekspor Indonesia Syariah, Bank IFI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Niaga Syariah, Bank Permata Syariah, Bank Syariah BRI, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mandiri, BII Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, BTPN Syariah, HSBC Amanah, BPD Syariah, BPR Syariah.

